



**TESIS No. 142353**

**KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR  
PERKOTAAN MAUMERE SEBAGAI KAWASAN  
MINAPOLITAN KABUPATEN SIKKA  
(Studi Kasus : Kecamatan Alok Barat,  
Kabupaten Sikka)**

**PRIMUS ARYUNTO  
NRP. 3214205002**

**DOSEN PEMBIMBING  
Dr-Ing.Ir. Haryo Sulistyarso  
Dr. Ir. Rima Dewi Suprihardjo., MIP**

**PROGRAM MAGISTER  
BIDANG KEAHLIAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA  
JURUSAN ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER  
SURABAYA  
2016**



**TESIS No. 142353**

**CONSEPTUAL DEVELOPMENT OF THE MAUMERE  
COASTAL URBAN AREA AS A MINAPOLITAN ZONE  
OF THE SIKKA DISTRICT  
(Case Study : Alok Barat Subdistrict)**

**PRIMUS ARYUNTO  
NRP. 3214205002**

**SUPERVISOR  
Dr-Ing.Ir. Haryo Sulistyarso  
Dr. Ir. Rima Dewi Suprihardjo., MIP**

**MASTER PROGRAM  
URBAN DEVELOPMENT MANAGEMENT  
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND PLANNING  
SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
SURABAYA  
2016**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Teknik (M.T)  
di  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :  
Primus Aryunto  
Nrp. 3214205002

Tanggal Ujian : 10 Juni 2016  
Periode Wisuda : September 2016

Disetujui oleh :

  
1. Dr.-Ing. Ir. Haryo Sulistyarso  
NIP : 195504281983031001

(Pembimbing I)

  
2. Dr. Ir. Rima Dewi Suprihardjo, MIP  
NIP : 195403041981032001

(Pembimbing II)

  
3. Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.Rer.Reg  
NIP : 19610726 198903 1 004

(Penguji)

  
4. Dr. Ir. Murni Rachmawati, M.T  
NIP : 196206081987012001

(Penguji)



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Primus Aryunto  
NRP : 3214205002  
Program Studi : Magister  
Jurusan : Arsitektur

Dengan ini menyatakan, bahwa isi sebagian maupun keseluruhan tesis saya dengan judul :

**“Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere Sebagai Kawasan Minapolitan Kabupaten Sikka (Studi Kasus : Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka)”**

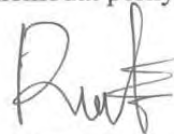
adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka.

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 25 Juli 2016

yang membuat pernyataan;



Primus Aryunto

NRP : 3214205002

**KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR PERKOTAAN  
MAUMERE SEBAGAI KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN SIKKA  
(Studi Kasus : Kecamatan Alok Barat)**

Nama : Primus Aryunto  
NRP : 3214205002  
Pembimbing : (1) Dr-Ing.Ir. Haryo Sulistyarso  
: (2) Dr. Ir. Rima Dewi Suprihardjo., MIP

**ABSTRAK**

Kawasan Pesisir Kabupaten Sikka memiliki potensi kelautan dan perikanan yang mempunyai prospek ekonomi yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di pesisir perkotaan Maumere tepatnya di Kecamatan Alok Barat. Namun sejumlah permasalahan masih harus diatasi antara lain masih rendahnya produktifitas, tingkat pendapatan nelayan yang rendah, kegiatan distribusi dan perdagangan masih sederhana, kurangnya infrastruktur serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan untuk mengidentifikasi karakteristik, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan minapolitan, dan menyusun konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan teknik non probability sampling dalam menentukan sampel. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa statistik deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan, analisa deskriptif dengan validasi teknik delphi untuk menentukan faktor yang berpengaruh, dan analisa triangulasi dalam penyusunan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan.

Hasil dari penelitian ini adalah konsep pengembangan kawasan minapolitan di Pesisir Perkotaan Maumere dikelompokkan dalam tiga zona yaitu zona inti yang di dalamnya terdapat aktifitas produksi yang dibagi menjadi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, zona pendukung yang merupakan sentra industri pengolahan dengan tujuan menambah nilai jual produksi perikanan yang ada dan yang terakhir adalah Zona terkait yaitu terkait sektor pemasaran produksi. Masing-masing zona memiliki konsep pengembangan yang merupakan penjabaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat

**Kata Kunci :** *Pengembangan wilayah, perikanan dan kelautan, kawasan minapolitan.*

**CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF THE MAUMERE COASTAL URBAN  
AREA AS A MINAPOLITAN ZONE OF THE SIKKA DISTRICT  
(Case Study: Alok Barat Subdistrict)**

Name : Primus Aryunto  
NRP : 3214205002  
Supervisor : (1) Dr-Ing.Ir. Haryo Sulistyarso  
                  : (2) Dr. Ir. Rima Dewi Suprihardjo., MIP

**ABSTRACT**

The Sikka District Coastal Area has marine and fisheries potential having high economic prospects and designated as a Minapolitan Zone by virtue of Decree of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number Kep.35/Kepmen-KP/2013 on Designation of the Minapolitan Zone in the Maumere Coastal Urban Area, more precisely in the Alok Barat Subdistrict. However, a number of issues remains to be addressed, e.g. low productivity levels, low income levels of fishermen, relatively simple distribution and trade activities, lack of infrastructure and supporting facilities and utilities. Therefore, it is necessary to conduct a research on the conceptual development of the Alok Barat Subdistrict coastal area as a minapolitan zone for identifying the characteristics and analyzing the excellent fisheries and marine zone potential, analyzing the factors influencing the minapolitan zone development, specifying the criteria and establishing the conceptual development of the Alok Barat Subdistrict coastal area as a minapolitan zone of the Sikka District.

This research uses a rationalistic approach of the descriptive research type using non probability sampling techniques in determining samples. The method of analysis used in this research is the descriptive statistical analysis to identify the zone's characteristics, growth share analysis to identify the potential commodities, descriptive analysis using the delphi validation technique to determine the influential factors, interpretation based on theory and best practices to determine the criteria for a minapolitan zone as well as the triangulation analysis in establishing the conceptual development of the Alok Barat Subdistrict coastal area as a minapolitan zone.

Result from this study is the conceptual development of the Maumere coastal urban area as a minapolitan zone of the Sikka District ini Alok West grouped into three zones: a core zone in which there are production activities are divided into the production of capture fisheries and aquaculture, zones supporting a center of industries processing with the aim of increasing the sale value of fisheries production existing and the latter is related zone that is related to the marketing sector of production. Each zone has a concept of development which is a translation of the factors that influence the development Minapolitan in District Alok West

**Keywords:** *regional development, fisheries and marine, minapolitan zone.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan penyertaanNya, sehingga laporan tesis dengan judul **“KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR PERKOTAAN MAUMERE SEBAGAI KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN SIKKA (Studi Kasus : Kecamatan Alok Barat, kabupaten Sikka)”** dapat terselesaikan. Laporan tesis ini merupakan tahapan akhir yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa pada Program Magister Arsitektur, Bidang Manajemen Pembangunan Kota, Institut Teknologi Sepuluh November dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar S-2.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun proposal tesis ini, yaitu :

1. Bapak Dr-Ing.Ir. Haryo Sulistyarso
2. Ibu Dr. Ir. Rima Dewi Suprihardjo., MIP

Sebagai pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan dan mengevaluasi proposal tesis ini. Penulis menyadari bahwa laporan tesis ini merupakan laporan awal yang tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran serta masukan yang dapat membangun dan menyempurnakan laporan ini sehingga pada akhirnya nanti dapat menjadi penelitian yang bermutu, punya nilai ilmiah tinggi, serta dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah. Akhir kata, penyusun mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian proposal tesis ini.

Surabaya, Juli 2016

Penulis

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xvi</b>
<b>Daftar Peta .....</b>	<b>xviii</b>
<b>Daftar Diagram .....</b>	<b>xix</b>

## **BAB I      PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Sasaran .....	6
1.3.1. Tujuan .....	6
1.3.2. Sasaran .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1. Manfaat Praktis .....	7
1.4.2. Manfaat Teoritis .....	7
1.5. Lingkup Penelitian .....	8
1.5.1. Lingkup Substansi .....	8

1.5.2. Lingkup Pembahasan .....	8
1.5.3. Lingkup Lokasi .....	9

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pengembangan Wilayah Pesisir .....	13
2.1.1 Definisi Wilayah Pesisir .....	13
2.1.2 Pengembangan Wilayah .....	15
2.1.3 Pengembangan Wilayah Pesisir .....	23
2.2. Kawasan Minapolitan .....	32
2.3. Sintesa Kajian Pustaka .....	47

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Penelitian .....	49
3.2. Jenis Penelitian .....	49
3.3. Variabel Penelitian .....	50
3.4. Metode Penentuan Responden .....	52
3.4.1. Populasi Responden .....	52
3.4.2. Penentuan Sampel Responden .....	53
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	56
3.6. Metode Analisis Data .....	58
3.6.1. Analisis Dalam Mengidentifikasi Karakteristik Kawasan Pesisir di Kecamatan Alok Barat .....	58
3.6.2. Analisis Penentuan Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Alok Barat .....	59

3.6.3.	Ananlisis Penentuan Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Kecamatan Alok Barat Sebagai Kawasan Minapolitan .....	64
3.7	Tahapan Penelitian .....	65

#### **BAB IV HASIL & PEMBAHASAN**

4.1.	Gambaran Umum Wilayah Studi .....	71
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Sikka .....	71
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Alok Barat .....	75
4.1.3	Kondisi Fisik Wilayah Kecamatan Alok Barat .....	76
4.1.4	Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat .....	79
4.1.5	Kependudukan Kecamatan Alok Barat .....	80
4.1.6	Perikanan Kecamatan Alok Barat .....	83
4.1.7	Sarana dan Prasarana di Kecamatan Alok Barat .....	86
4.1.8	Alur Rantai Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kecamatan Alok Barat .....	89
4.1.9	Kebijakan Terkait Sektor Perikanan di Kecamatan Alok Barat ....	91
4.2.	Analisa Dan Pembahasan .....	91
4.2.1	Analisis Karakteristik Kawasan Pesisir di Kecamatan Alok Barat ..	91
4.2.1.1	Karakteristik Tingkat Pendidikan Masyarakat Pesisir Kecamatan Alok Barat .....	92
4.2.1.2	Karakteristik Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat .....	93
4.2.1.3	Karakteristik Tingkat Pendapatan Tenaga Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat .....	95
4.2.1.4	Karakteristik Kontribusi Sektor Perikanan Kecamatan Alok Barat Terhadap PDRB .....	97
4.2.1.5	Karakteristik Ketersediaan Lahan Produksi	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Ringkasan Definisi Wilayah Pesisir .....	14
Tabel 2.2.	Ringkasan Komponen Pengembangan Wilayah .....	22
Tabel 2.3.	Ringkasan Aspek Pengembangan Wilayah Pesisir .....	28
Tabel 2.4.	Rangkuman Dari Berbagai Sumber Mengenai Aspek Yang Berpengaruh Dalam Konsep Pengembangan Wilayah Pesisir .....	29
Tabel 2.5.	Indikator Pengembangan Wilayah Pesisir .....	31
Tabel 2.6.	Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan .....	44
Tabel 2.7.	Indikator Pengembangan Kawasan Minapolitan .....	45
Tabel 2.8.	Indikator dan Variabel .....	47
Tabel 3.1.	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional .....	50
Tabel 3.2.	Responden Penelitian .....	54
Tabel 3.3.	Daftar Data Survey Sekunder .....	57
Tabel 3.4.	Aspek Analisa Triangulasi .....	65
Tabel 3.5.	Tahapan Penelitian .....	67
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Kabupaten Sikka Dirinci Perkecamatan .....	72
Tabel 4.2.	Luas Kelurahan dan Persentasi Terhadap Luas Kecamatan Alok Barat .....	75
Tabel 4.3.	Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat .....	79
Tabel 4.4.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Alok Barat Tahun 2010-2014 .....	80
Tabel 4.5.	Potensi Budidaya rumput laut Kecamatan Alok Barat	

	Tahun 2012 .....	84
Tabel 4.6.	Potensi Perikanan Tangkap Kecamatan Alok Barat	
	Tahun 2014 .....	85
Tabel 4.7.	Output Deskriptif Statistik Karakteristik Tingkat	
	Pendidikan Masyarakat Kecamatan Alok Barat .....	92
Tabel 4.8.	Output Deskriptif Statistik Ketersediaan Tenaga Kerja	
	Sektor Perikanan & Kelautan Kecamatan Alok Barat .....	94
Tabel 4.9.	Output Deskriptif Statistik Tingkat Pendapatan Tenaga Kerja	
	Sektor Perikanan & Kelautan Kecamatan Alok Barat .....	96
Tabel 4.10.	Output Deskriptif Statistik Kontribusi Sektor Perikanan	
	Kecamatan Alok Barat Terhadap PDRB .....	98
Tabel 4.11.	Output Deskriptif Statistik Ketersediaan Lahan Produksi	
	Perikanan Kecamatan Alok Barat .....	99
Tabel 4.12.	Output Deskriptif Statistik Ketersediaan Lahan Industri	
	Kecamatan Alok Barat .....	101
Tabel 4.13.	Analisa Deskriptif Penentuan Faktor Pengembang	
	Kawasan Minapolitan Kecamatan Alok Barat .....	107
Tabel 4.14.	Hasil Eksplorasi Analisis Delphi .....	119
Tabel 4.15.	Basis Faktor Untuk Tahap Iterasi .....	123
Tabel 4.16.	Hasil Iterasi Analisis Delphi .....	124
Tabel 4.17.	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan	
	Minapolitan Berdasarkan Zona Pengembangan .....	128
Tabel 4.18.	Analisis Triangulasi Penentuan Konsep Pengembangan	

	Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai	
	Kawasan Minapolitan .....	133
Tabel 4.19.	Klasifikasi Zona Kawasan Minapolitan	
	Kecamatan Alok Barat .....	153
Tabel 4.20.	Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan	
	Di Kecamatan Alok Barat .....	163

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Skema Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan .....	36
Gambar 3.1.	Bagan Alur Proses Statistik Deskriptif .....	59
Gambar 3.2.	Tahapan Analisis Delphi Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan .....	63
Gambar 3.3.	Konsep Analisa Triangulasi .....	64
Gambar 3.4.	Kerangka Tahapan Penelitian .....	69
Gambar 4.1.	Gardu Listrik Kecamatan Alok Barat .....	87
Gambar 4.2.	Jalan Kolektor Primer di Kelurahan Wolomarang .....	88
Gambar 4.3.	Jalan Lingkungan di Kelurahan Hewuli .....	88
Gambar 4.4.	Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Wolomarang .....	89
Gambar 4.5.	Bagan Alur Rantai Tataniaga Sumberdaya Perikanan Kecamatan Alok Barat .....	90
Gambar 4.6.	Skema Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Alok Barat .....	129
Gambar 4.7.	Ilustrasi Alat Tangkap .....	144
Gambar 4.8.	Arahan Lokasi Konsep Pengadaan SPDN .....	147
Gambar 4.9.	Arahan Lokasi Konsep Pembangunan TPI .....	148
Gambar 4.10.	Arahan Lokasi Konsep Pusat Penjualan Alat & Bahan Penangkapan Ikan .....	149
Gambar 4.11.	Arahan Lokasi Konsep Pemasangan Jaringan Air Bersih .....	150
Gambar 4.12.	Arahan Lokasi Perbaikan & Pembangunan Jalan .....	151



Gambar 4.13. Arahan Lokasi Konsep Pembangunan Jalan

Lokal Primer ..... 158

Gambar 4.14. Arahan Lokasi Konsep Pembangunan Pasar Ikan Olahan ..... 160

Gambar 4.15. Arahan Lokasi Konsep Pengembangan Wisata Kuliner ..... 161

## DAFTAR PETA

Peta	1.1.	Peta Batas Lokasi Penelitian .....	11
Peta	4.1.	Wilayah Administrasi Kabupaten Sikka .....	73
Peta	4.2.	Lokasi Penelitian (Kecamatan Alok Barat) .....	77
Peta	4.3.	Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat .....	81
Peta	4.4.	Pembagian Zona Kawasan Minapolitan Kecamatan Alok Barat .....	131
Peta	4.5.	Klasifikasi Zonasi Kawasan Minapolitan.....	155
Peta	4.6.	Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat.....	166
Peta	4.6.	Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Alok Barat.....	167

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1. Karakteristik Tingkat Pendidikan Masyarakat	
Kecamatan Alok Barat .....	92
Diagram 4.2. Karakteristik Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor	
Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat .....	94
Diagram 4.3. Karakteristik Tingkat Pendapatan Tenaga Kerja Sektor	
Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat .....	96
Diagram 4.4. Karakteristik Kontribusi Sektor Perikanan	
Kecamatan Alok Barat Terhadap PDRB .....	97
Diagram 4.5. Karakteristik Ketersediaan Lahan Produksi	
Sektor Perikanan Kecamatan Alok Barat .....	99
Diagram 4.6. Karakteristik Ketersediaan Lahan Industri	
Kecamatan Alok Barat .....	101

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah berbagai jenis sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagai sebuah negara kepulauan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Indonesia juga terkenal sebagai negara kepulauan dengan 17.508 buah pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup> atau 62 % dari luar teritorialnya (Dahuri dkk, 2001). Menurut Dahuri, wilayah pesisir dan lautan yang kaya dan beragam sumber daya alam merupakan potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan, mengingat semakin menipisnya sumber daya alam di daratan akibat semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan penggunaan lahan. Sehingga wilayah pesisir merupakan wilayah yang diprioritaskan untuk dikembangkan.

Berdasarkan aspek geografis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir. Mereka menggantungkan kelangsungan hidupnya dari upaya mengelola sumberdaya alam yang tersedia di lingkungannya, yakni di kawasan pesisir, perairan (laut) dan pulau – pulau kecil. Secara umum, sumberdaya perikanan (tangkapan dan budidaya) merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Karena itu, sumberdaya perikanan mengambil peran yang sangat besar sebagai penggerak dinamika ekonomi lokal di desa – desa pesisir (Bengen, D.G., 2001).

Namun pada dasarnya kondisi masyarakat pesisir yang pada umumnya adalah nelayan sebagai pelaku yang ikut menentukan dinamika ekonomi lokal menimbulkan beberapa persoalan dalam pembangunan masyarakat pesisir antara lain sebagai

berikut (Kusnadi, 2006).

- i. Masalah sosial yang mencakup isu kemiskinan, kesenjangan sosial dan konflik sosial nelayan.
- ii. Masalah lingkungan yang mencakup isu kerusakan ekosistem pesisir – laut, pulau – pulau kecil dan kelangkaan sumber daya ikan.
- iii. Masalah model pembangunan yang mencakup isu pengelolaan potensi sumber daya yang belum optimal dan masalah kepunahan desa nelayan atau surutnya peranan ekonomi desa nelayan serta tradisi maritimnya.

Dampak dari beragam persoalan di atas adalah terganggunya akses sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat pesisir, sehingga menurunkan kualitas SDM, optimalisasi pengelolaan sumber daya lingkungan terbatas, dan kawasan pesisir belum mampu menjadi basis pertumbuhan pendorong dinamika ekonomi wilayah. Pengabaian penanganan masalah sosial masyarakat pesisir terjadi karena belum mantapnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada pendayagunaan sumberdaya kemaritiman nasional (Kusnadi, 2006). Karena itu, masyarakat pesisir harus didorong untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memberdayakan dirinya secara berkelanjutan. Dalam hal ini, filosofi dan strategi pemberdayaan yang mendasarinya harus berakar kuat pada pandangan hidup, sistem nilai lokal, adat-istiadat, pranata sosial budaya, atau kebudayaan setempat. Dalam proses dan aktivitas pemberdayaan, negara dan seluruh komponen stakeholders memiliki tanggungjawab kolektif – sinergis untuk mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir (Suyanto, 2005).

Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan potensi pesisir khususnya pada sumber daya kelautan dan perikanan melalui berbagai kebijakan, antara lain adalah dengan ditetapkannya Konsepsi Minapolitan. Konsepsi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan. Dalam Peraturan Menteri tersebut,

Minapolitan didefinisikan sebagai sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. Dengan demikian pada dasarnya Kawasan Minapolitan merupakan kawasan dengan pusat kegiatan utama ekonomi yang memanfaatkan, mengelola dan membudidayakan sumberdaya kelautan dan perikanan serta mempunyai keterkaitan fungsional dengan sistem permukimannya yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menumbuhkan daya saing regional (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan).

Untuk mendukung Konsepsi Minapolitan, diterbitkan pula Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, dimana dalam Keputusan tersebut disebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan 197 Kawasan Minapolitan di 33 Provinsi di Indonesia dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 7 (tujuh) Kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan, dan salah satunya adalah pesisir Kabupaten Sikka dengan fokus pengembangan sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Alok Barat (Kep.35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan).

Kawasan Pesisir Kabupaten Sikka memiliki potensi kelautan dan perikanan yang mempunyai prospek ekonomi yang tinggi. Wilayah Kabupaten Sikka yang luasnya 7.553,24 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari luas laut mencapai 5.821,33 Km<sup>2</sup> atau 77,07 % merupakan perairan laut (Website Pemkab Sikka, 2013). Didalamnya terdapat 17 buah pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 444,50 km. Wilayah administrasi Kabupaten meliputi 16 kecamatan pantai dengan 66 desa pantai. Kecamatan yang

berada di pesisir pantai utara dan menghadap ke laut Flores berjumlah 9 kecamatan dan 7 kecamatan lainnya terletak di pesisir pantai selatan dan menghadap laut Sawu (Profil Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, 2014).

Potensi lestari perairan Kabupaten Sikka mencapai 21.175 ton pertahun, namun belum dimanfaatkan secara baik. Produksi ikan pertahun cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data tahun 2000 hingga tahun 2008, produksi ikan tahun 2000 sebanyak 7.322,6 ton (34,58%), tahun 2001 sebanyak 7.927,9 ton (37,44 %), tahun 2002 sebanyak 8.230,2 ton (38,87 %), tahun 2003 sebanyak 8.475,2 ton (40,2 %). Sementara pada tahun 2004 naik menjadi 9.240,6 ton (43,63%), tahun 2005 sebanyak 9.702,6 ton (45,82 %), tahun 2006 sebanyak 9.785,50 ton (46,21 %), tahun 2007 sebanyak 9.976,70 ton (47,12 %), dan tahun 2008 sebanyak 10.951 ton (51,70 %) (Sudianto dkk, 2010). Hal ini berarti baru 51,70 % potensi lestari yang dimanfaatkan dan masih banyak peluang pengembangannya.

Dari sisi pendapatan perekonomian daerah, sub-sektor perikanan menunjukkan tren yang positif. Kontribusi sub-sektor perikanan terhadap perekonomian (PDRB) meningkat sejak tahun 2003. Pada tahun 2003, sub-sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 6,01 % terus mengalami peningkatan hingga tahun 2008 menjadi 6,72 % terhadap perekonomian Kabupaten Sikka dengan nominal Rp. 53,25 milyar. Hal ini menggambarkan kontribusi yang cukup besar dari sub-sektor perikanan terhadap perekonomian daerah dan apabila dapat dioptimalkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kecamatan Alok Barat merupakan salah satu Kecamatan di wilayah perkotaan Maumere ibukota Kabupaten Sikka. Kecamatan Alok Barat merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Sikka yang mendominasi perekonomian di sub sektor perikanan. Di Kecamatan ini kontribusi sub sektor perikanan mencapai lebih dari 20 % yaitu 20,55 % terhadap PDRB pada tahun 2008, sedangkan rata-rata kontribusi di Kecamatan pesisir lainnya berkisar antara 2 % hingga 10 % (Sudianto dkk, 2010). Hal ini menunjukkan Kecamatan Alok Barat sebagai pusat aktifitas kegiatan perikanan dan kelautan di wilayah pesisir Kabupaten Sikka yang memiliki peran paling tinggi



sektor perikanan dalam sehingga perlu dikembangkan.

Dengan ditetapkannya sebagai salah satu kawasan minapolitan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan Kabupaten Sikka dapat kembali meningkatkan produksinya terutama di kecamatan yang telah ditetapkan. Namun hingga saat ini masih terdapat kendala lainnya yaitu kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai sebagai perwujudan prinsip efisiensi pada konsep minapolitan. Untuk mendukung sebuah aktivitas perikanan budidaya dan tangkap yang ideal perlu ada bangunan infrastruktur seperti dermaga, lokasi dan tempat penjemuran, gudang, kapal pengangkut, dan sarana komunikasi. Infrastruktur tersebut belum semuanya dimiliki oleh sentra perikanan di Kabupaten Sikka. Kendala lainnya adalah beberapa lokasi produksi perikanan yang tersebar di pulau-pulau kecil membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar untuk memasarkan komoditinya di beberapa wilayah yang tersebar di Kota Maumere karena belum adanya sentra lokasi pemasaran yang jelas. Selain itu belum ada kebijakan khusus mengenai pengembangan kawasan minapolitan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, sehingga belum ada strategi pengembangan yang diupayakan untuk mengatur dan mengoptimalkan kegiatan di sub sektor perikanan.

Dari beberapa hal di atas dapat menunjukan bahwa kondisi potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Sikka cukup baik, terutama di Kecamatan Alok Barat sehingga ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan namun masih terdapat beberapa kendala dan belum optimal dikembangkan. Dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Sikka maka diperlukan suatu upaya pengembangan pada kawasan pesisir perkotaan Maumere terutama di Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan secara terpadu, sehingga akan meningkatkan sumberdaya masyarakat pesisir.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dimana dapat diketahui bahwa sektor perikanan dan kelautan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan minapolitan terutama di Kecamatan Alok Barat, namun kondisi sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Sikka yang ada saat ini yang masih rendah kontribusinya dan belum ada kebijakan pengembangan kawasan minapolitan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sendiri menjadikan belum berkembangnya fungsi kawasan minapolitan. Adapun pertanyaan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah ini adalah faktor apa yang mempengaruhi pengembangan kawasan pesisir perkotaan Maumere sebagai kawasan minapolitan di Kabupaten Sikka?

## **1.3 Tujuan Dan Sasaran**

Dalam sub bab ini akan dijabarkan tentang tujuan dari penelitian ini serta sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

### **1.3.1. Tujuan**

Dengan bertitik tolak pada perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan konsep pengembangan kawasan pesisir perkotaan Maumere sebagai kawasan minapolitan.

### **1.3.2. Sasaran**

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi karakteristik kawasan pesisir di Kecamatan Alok Barat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat.
3. Menentukan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang kegunaan apa yang ingin dicapai oleh penulis setelah terselesaikannya penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menuliskan manfaat penelitian kedalam dua kelompok manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian terhadap dunia praktis merupakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yang diperuntukkan bagi pihak pemerintah selaku penanggung jawab pembangunan di Kabupaten Sikka khususnya instansi terkait dan pihak swasta sebagai partner pembangunan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sikka khususnya instansi terkait dalam upaya menentukan kebijakan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan melalui upaya pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis menjelaskan manfaat yang ingin dicapai dari sebuah penelitian yang diperuntukkan untuk pihak akademis yang membutuhkan khususnya pihak yang sedang melakukan penelitian. Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penerapan ilmu serta kajian-kajian terkait dengan pengembangan ekonomi perkotaan yang berbasis kawasan serta upaya mengembangkan kawasan minapolitan dan fungsinya dalam pengembangan perkotaan, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.

## **1.5 Lingkup Penelitian**

Pada lingkup penelitian akan dibahas mengenai batasan-batasan yang akan digunakan pada penulisan penelitian ini, dimana lingkup penelitian terdiri dari

lingkup materi dan lingkup lokasi yang bertujuan untuk memberikan batasan secara jelas mengenai materi yang dibahas dan lokasi yang menjadi fokus penelitian.

#### **1.5.1 Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi ini menjelaskan mengenai teori-teori pendukung dan penjabar pola pikir dalam penelitian. Penelitian ini mencakup lingkup keilmuan pengembangan kawasan pesisir perkotaan sebagai kawasan minapolitan. Oleh karena itu landasan teori dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan teori pengembangan kawasan/wilayah pesisir, pengembangan sektor perikanan dan kelautan, dan teori mengenai konsep minapolitan.

#### **1.5.2 Lingkup Pembahasan**

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini perlu adanya batasan yang jelas agar arahan yang akan dicapai dapat dirumuskan dengan tepat. Untuk itu perlu adanya lingkup materi dimana dapat digunakan sebagai batasan dan acuan dalam pembahasan materi. Pada penelitian ini membahas mengenai upaya mengembangkan kawasan pesisir sebagai kawasan minapolitan dengan konsep pengembangan perkotaan yang tepat, dari pentahapan pembahasan yang diawali dengan mengidentifikasi karakteristik kawasan perikanan dan kelautan terutama yang berhubungan dengan aspek ekonomi, aspek sosial budaya masyarakat, aspek fisik dan aspek kelembagaan. Kemudian akan ditentukan potensi komoditas unggulan yang dimiliki, dimana karakteristik kawasan dan potensi komoditas ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan sehingga dapat ditentukan kriteria pengembangan yang dapat menjadi poin untuk perumusan konsep pengembangan kawasan minapolitan.

#### **1.5.3 Lingkup Lokasi**

Ruang lingkup lokasi studi adalah Kawasan Pesisir perkotaan Maumere Kabupaten Sikka, yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dalam Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan yaitu di Kecamatan Alok Barat :

Adapun Batas Batas Lokasi Penelitian adalah :

Utara	: Laut Flores
Timur	: Kecamatan Alok
Selatan	: Kecamatan Nita
Barat	: Kecamatan Magepanda

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengembangan Wilayah Pesisir

##### 2.1.1. Definisi Wilayah Pesisir

Menurut Sorenson dan Mc. Creary (1990) ” *The part of the land affected by it's proximity to the land...any area in which processes depending on the interaction between land and sea are most intense*”. Diartikan bahwa daerah pesisir atau zone pesisir adalah daerah intervensi atau daerah transisi yang merupakan bagian daratan yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan daratan, dimana prosesnya bergantung pada interaksi antara daratan dan lautan

Ketchum dalam Kay dan Alder (1999) “ *The band of dry land adjacent ocean space (water dan submerged land) in wich terrestrial processes and land uses directly affect oceanic processes and uses, and vice versa*”. Diartikan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang merupakan tanda atau batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan.

Pengertian wilayah pesisir menurut kesepakatan terakhir internasional adalah merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*) (Beatley *et al*, dalam Dahuri *et al*, 2001).

Menurut Rustiadi (2001) “Wilayah pesisir adalah suatu daerah yang unik dari arah lautan ke daratan seperti terjadinya pasang surut, vegetasi mangrove, terumbu karang (*coral reef*), *tidal flats*, *sea beaches*, *storm waves*, *estuarine* dan *barrier islands* yang hanya dapat ditemukan di wilayah pesisir. Batasan wilayah pesisir bisa digambarkan secara luas dan sempit tergantung dari tujuan program (misalnya di Indonesia ada batasan secara administrasi, ekologi dan Perencanaan).”

Secara sempit (ekologis) wilayah pesisir meliputi zona *intertidal* dan *supratidal* dari tepi perairan ditandai adanya tumbuhan pesisir yang tergenang, vegetasi mangrove, *marshes*, *tide flats*, *beaches*, *dunes* (gundukan pasir) dan *fringing reef* (terumbu karang tepi) (Rustiadi, 2001)

Menurut Suprihayono (2000) “wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.”

Sedangkan Menurut UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa batasan wilayah pesisir, kearah daratan mencakup wilayah administrasi daratan dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

Tabel 2.1. Ringkasan Definisi Wilayah Pesisir

Sumber Teori (1)	Defenisi Pesisir (2)
Kay dan Alder (1999)	Wilayah yang merupakan tanda atau batasan daratan dan perairan yang aktivitasnya masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan.
Suprihayono (2000)	Wilayah pertemuan antara daratan dan laut. Ke arah darat bagian daratan. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat.
Beatley <i>et al</i> , dalam Dahuri <i>et al</i> , 2001	Wilayah peralihan antara laut dan daratan
Rustiadi (2001)	Daerah yang unik dari arah lautan ke daratan seperti terjadinya pasang surut, vegetasi mangrove, terumbu karang

Sumber Teori (1)	Defenisi Pesisir (2)
	Zona intertidal dan supratidal dari tepi perairan ditandai adanya tumbuhan pesisir yang tergenang, vegetasi mangrove, marshes, tide flats, beaches, dunes (gundukan pasir) dan fringing reef (terumbu karang tepi)
Sorenson dan Mc. Creary (1990)	Daerah daratan yang merupakan kawasan transisi yang dipengaruhi pada interaksi antara daratan dan lautan.
UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Batasan wilayah pesisir, kearah daratan mencakup wilayah administrasi daratan dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

*Sumber: Hasil Kajian, 2016*

Dapat dilihat dari beragam definisi wilayah pesisir di atas bahwa terdapat kesamaan dalam focus pemahaman dari berbagai sumber. Focus pemahaman terhadap definisi wilayah pesisir tersebut yaitu merupakan wilayah batasan atau peralihan antara lautan dan daratan. Berdasarkan pada beberapa pengertian dari berbagai sumber yang telah dijelaskan dan sesuai dengan fokus kajian maka dapat dikemukakan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang menjadi kawasan transisi, batas, tanda, peralihan antara laut dan daratan yang aktivitasnya masih mempengaruhi proses dan fungsi yang terjadi di lautan dan daratan.

### **2.1.2. Pengembangan Wilayah**

Dalam banyak kepustakaan tentang pengembangan wilayah, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menyebut beberapa diantaranya adalah *growth theory*, *rural development theory*, *agro first theory*, *basic needs theory*, *sustainable theory*, dan lain sebagainya. Teori-teori pengembangan wilayah sangat erat hubungannya dengan teori pembangunan memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepas landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga

bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari “*transisi orisinal*”. Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Hettne, 2001).

Salah satu teori pengembangan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (*unbalanced growth*) yang dikembangkan oleh Hirschman dan Myrdal. Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pengembangan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

Teori pengembangan wilayah terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten dan langgeng bagi persoalan yang dihadapi para peneliti. Muncul berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan. Satu diantaranya adalah mengenai isu pengembangan wilayah. Secara luas, pengembangan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Dahuri, 2004).

Menurut Hoover (1977) Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan

pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Poernomosidi (1975), bahwa pengembangan wilayah dimungkinkan karena ada modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, dan sumber daya alam, berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Arus barang sebagai salah satu gejala ekonomi, merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar Negara (Cahyadin, 2006).

Friedman (1976) berpendapat bahwa pengembangan wilayah merupakan proses memformulasikan tujuan-tujuan sosial dan pengaturan ruang untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan. Friedman berpendapat pula bahwa untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan wilayah dibutuhkan sumberdaya melalui aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Parr (1999) menyatakan bahwa pengembangan suatu wilayah dapat didekati dengan teori sektor dan teori tahapan perkembangan wilayah, yaitu:

1. Teori Sektor

Berkembangnya wilayah dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama yakni:

- a. Sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan)
- b. Sektor sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, utilitas)
- c. Sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa)

2. Teori Tahapan Perkembangan

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat digambarkan dalam lima tahapan, yaitu:

- a. Tahap spesialisasi ekspor

Dalam tahap ini wilayah dicirikan oleh adanya industri yang dominan. Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada produk yang dihasilkan industri tersebut.

- b. Tahapan ekspor kompleks

Tahapan ini menggambarkan bahwa wilayah telah mampu mengekspor selain komoditas dominan juga komoditas kaitannya.

c. Tahapan kematangan ekonomi

Tahapan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi wilayah telah terdiservikasi dengan munculnya industri substitusi impor, yakni industri yang memproduksi barang dan jasa yang sebelumnya harus diimpor dari luar wilayah.

d. Tahapan pembentukan metropolis

Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi dan melayani kebutuhan barang dan jasa di wilayah pinggiran.

e. Tahapan kemajuan teknis

Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah yang memberikan peran yang sangat nyata terhadap perekonomian nasional.

Dapat dilihat dari beberapa teori di atas terdapat perbedaan dalam focus pembahasan pengertian pengembangan wilayah itu sendiri. Hirschman dan Myrdal serta Friedman (1976) lebih mengartikan pengembangan wilayah sebagai suatu proses perumusan dan pengimplementasian suatu tujuan dalam kegiatan pembangunan suatu wilayah. Sedangkan menurut Hoover (1997) dan Parr (1999) Pengembangan wilayah lebih diartikan sebagai upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah. Dari pengertian-pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan tujuan memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup dan memperkecil kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun juga memberikan pengaruh pada wilayah sekitarnya.

Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktis. Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sektor – sektor utama pada lokasi – lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh wilayah. Menurut Hoover (1977), pengembangan dari suatu wilayah melibatkan hubungan berbagai kegiatan

dalam perekonomian daerah yang luas. Berbagai rangkaian kegiatan memberikan peluang-peluang produksi dari suatu kegiatan ke kegiatan lain di dalam perekonomian daerah, sehingga berakibat pada pertumbuhan atau kemunduran wilayah. Beberapa kondisi yang menentukan perkembangan wilayah antara lain, yaitu:

- a. Biaya komparatif dalam produksi barang dan jasa;
- b. Perolehan keuntungan dari skala ekonomi dalam kegiatan produksi;
- c. Perolehan keuntungan dari kondisi transportasi untuk pengangkutan dan pemasaran produk;
- d. Perolehan keuntungan dari peluang substitusi impor;
- e. Pemanfaatan peluang melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang.

Giarratani (*dalam* Dahuri, 2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pengembangan wilayah, yaitu:

1. Keunggulan komparatif (*imperfect mobility of faktor*). Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.
2. Aglomerasi (*imperfect divisibility*). Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.

3. Biaya transpor (*imperfect mobility of good and service*). Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Ilmu-ilmu atau kajian-kajian mengenai pengembangan wilayah secara umum ditunjang oleh empat pilar pokok yaitu (Rustiadi, Sunsun, Panuju, 2009) :

1. Inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi sumberdaya. Sumberdaya adalah segala bentuk-bentuk input yang dapat menghasilkan utilitas (kemanfaatan) proses produksi atau penyediaan barang dan jasa. Pilar utama dari suatu pengembangan wilayah didasarkan pada pemikiran di atas. Mengingat distribusi yang tidak merata, tahap pertama dari suatu pengembangan wilayah teknokratik adalah mengidentifikasikan sumberdaya yang ada melalui kegiatan evaluasi sumberdaya, baik sumberdaya alami, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, maupun sumberdaya social. Evaluasi sumber daya merupakan pilar yang paling utama dalam suatu perencanaan dan pengembangan wilayah.
2. Aspek ekonomi  
Mengingat keterbatasan/kelangkaan (*scarcity*) dan ketidakmerataan sumberdaya, maka potensi sumberdaya yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sumberdaya harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam pengembangan wilayah aspek ekonomi berperan penting untuk mengalokasikan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Aspek Kelembagaan  
Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya sangat ditentukan oleh sistem kelembagaan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, dapat menentukan pembagian tanah atau lahan bagi anggota masyarakat.



#### 4. Aspek Lokasi/Spasial.

Sumberdaya alam seringkali memiliki lokasi yang melekat pada posisi geografisnya sehingga. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pengembangan wilayah perlu mempertimbangkan aspek lokasi dan ekonomi. Dalam konteks spasial, jarak bukanlah satu-satunya unsur, namun aspek-aspek spasial lain juga penting menyangkut arah dan konfigurasi spasial yang lebih luas.

Friedman (1976) berpendapat pula bahwa untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan wilayah dibutuhkan melalui beberapa aspek yaitu:

1. sumberdaya
2. aspek social
3. aspek ekonomi
4. aspek lingkungan.

Menurut Parr (1999) pendekatan yang digunakan dalam pengembangan wilayah berdasarkan pendekatan spasial yang perlu mempertimbangkan komponen-komponen pengembangan wilayah yang meliputi beberapa aspek, diantaranya :

1. Aspek Sosial
  - Peran Serta Masyarakat
  - Kebutuhan Dasar Masyarakat
2. Aspek Ekonomi
  - Potensi Ekonomi Lokal
  - Kemampuan Daya Saing
3. Aspek Lingkungan
  - Daya dukung lingkungan
  - Baku mutu lingkungan
  - Kelestarian Lingkungan
4. Aspek Kelembagaan
  - Kemampuan aparat

- Manajemen Pembangunan
- Kebijakan Publik

Untuk lebih jelasnya mengenai ringkasan komponen pengembangan wilayah dari beberapa teori dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2 Ringkasan Komponen Pengembangan Wilayah

No.	Pendapat Para Ahli (1)	Komponen Pengembangan Wilayah (2)
1.	Hoover, (1977)	1) Aspek Sosial Budaya 2) Aspek Ekonomi 3) Aspek lingkungan Fisik 4) Aspek kelembagaan
2.	Giarratani, ( <i>dalam Dahuri 2004</i> )	1) Aspek Ekonomi 2) Aspek Sumber Daya 3) Aspek Lokasi/Jarak transportasi
3.	Rustiadi, Sunsun, Panuju, (2009)	1) Dimensi ekonomi 2) Dimensi kelembagaan 3) Dimensi Sumberdaya 4) Dimensi Lokasi/Jarak transportasi
4.	Friedman (1976)	1) Aspek social budaya 2) Aspek ekonomi 3) Aspek lingkungan/fisik
5.	Parr (1999)	1) Aspek Sosial Budaya 2) Aspek Ekonomi 3) Aspek lingkungan Fisik 4) Aspek kelembagaan

Sumber: Hasil Rangkuman, 2016

Dari beberapa teori menyangkut konsep pengembangan wilayah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan konsep pengembangan perlu mempertimbangkan komponen-komponen pengembangan wilayah yang meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek sosial budaya, aspek ekonomi, spasial, lingkungan, dan kelembagaan. Dari uraian terkait aspek-aspek yang berpengaruh dalam konsep pengembangan wilayah terdapat beberapa kesamaan criteria baik secara tersurat maupun tersirat (kesamaan makna). Hoover (1977) dan dan Parr (1999) berpendapat bahwa dalam suatu pengembangan wilayah perlu mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan. Hal itu sependapat dengan Friedman (1976) bahwa untuk mewujudkan

pengembangan wilayah dibutuhkan sumberdaya melalui aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Giaratani (2004) dan Rustiadi, Sunsun dan Panuju (2009) ditambahkan dua aspek baru yaitu aspek sumberdaya dan aspek lokasi/jarak transportasi.

### **2.1.3. Pengembangan Wilayah Pesisir**

Pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, didefinisikan oleh Cicin-Sain dan Knecht (1998), sebagai suatu proses dinamis dan kontinu dalam membuat keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan kawasan pesisir dan lautan beserta sumberdaya alamnya secara berkelanjutan. Jadi pada dasarnya pengembangan wilayah pesisir secara terpadu adalah bertujuan agar pemanfaatan sumberdaya bisa berkelanjutan, yakni pemanfaatan (pembangunan) yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Secara ringkas Munasinghe (1994) menyatakan bahwa Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial.

Munasinghe (1994) menyatakan konsep pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan harus berdasarkan pada empat faktor yaitu (1) terpadunya konsep "equity" lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan; (2) dipertimbangkan secara khusus dimensi ekonomi; (3) dipertimbangkan secara khusus dimensi lingkungan; dan (4) dipertimbangkan secara khusus dimensi sosial budaya.

Selanjutnya Reid (1995) *dalam* Kay dan Alder (2005) mengemukakan persyaratan agar pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dapat terwujud, yaitu:

- 1) integrasi antara konservasi dan pengembangan wilayah pesisir;
- 2) pemenuhan kebutuhan dasar nelayan;
- 3) peluang untuk memenuhi kebutuhan nelayan yang bersifat non-materi;
- 4) berkembang ke arah keadilan sosial dan kesejahteraan nelayan;
- 5) penghormatan dan dukungan terhadap keragaman budaya di wilayah pesisir;

- 6) memberikan peluang penentuan identitas diri secara sosial dan menumbuhkan sikap percaya diri pada masyarakat di wilayah pesisir; dan
- 7) memelihara integritas ekologi di wilayah pesisir.

Pitcher dan Preikshot (2001) membagi komponen pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan dalam lima dimensi, yaitu ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan etika. Sedangkan Charles (2001) mengemukakan konsep pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan mengandung dimensi : 1) Keberlanjutan ekologi, yaitu: memelihara keberlanjutan stok/biomass sehingga melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistem sebagai perhatian utama, 2) Keberlanjutan sosio-ekonomi, yaitu: memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu. Mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan perhatian keberlanjutan. 3) Keberlanjutan komunitas, yaitu: keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian pembangunan perikanan yang berkelanjutan, dan 4) Keberlanjutan kelembagaan, yakni: menyangkut pemeliharaan dimensi finansial dan administrasi yang sehat.

Pendekatan dalam pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan terus berkembang seiring kemajuan jaman, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan tempat. Secara ideal pembangunan berkelanjutan tujuannya sangat tidak tersentuh. Karena itu, berdasarkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan harus memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum. Hal ini berguna untuk menjamin keberlanjutan sumber daya pesisir dan lautan yang efisien dan efektif (Munasinghe, 1994).

Bengen dan Rizal (2002) mengusulkan 6 hal yang perlu dikerjakan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan secara berkelanjutan di Indonesia, yaitu:

- 1) rehabilitasi kawasan pesisir dan lautan yang telah mengalami kerusakan;
- 2) internalisasi biaya eksternalitas ke dalam setiap kegiatan pembangunan;
- 3) penetapan retribusi atas setiap pemanfaatan sumberdaya kelautan;

- 4) laut dikelola secara co-management;
- 5) reorientasi laut sebagai milik negara ke milik rakyat;
- 6) laut harus dianggap sebagai bagian dari ekosistem global.

Dimensi keberlanjutan dalam pengembangan wilayah pesisir oleh Susilo (2003), dijelaskan dalam lima atribut pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan yaitu ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan.

- 1) Atribut ekologis mencerminkan bagaimana pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan berdampak secara ekologis terhadap keberlanjutan sumberdaya dan lingkungan serta ekosistem tersebut sehingga kegiatan pemanfaatannya berkelanjutan, misalnya untuk usaha budidaya rumput laut berkelanjutan. Sebab praktek pemanfaatan sumberdaya yang melebihi daya dukungnya akan mengarah kepada ketidakberlanjutan aktifitas tersebut. Tingkat eksploitasi atau tekanan eksploitasi akan membatasi peluang pengembangan pemanfaatan sumberdaya tersebut. Tingkat pemanfaatan yang melebihi daya dukung lingkungannya akan membahayakan keberlanjutan sumberdaya tersebut yang ditandai dengan menurunnya produktivitas sumber daya pesisir. Karena itu penurunan produktivitas modal alam/ sumber daya pesisir yang muncul dalam kondisi lingkungan yang jelek dapat dijadikan indikator ekologis negatif tentang keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya tersebut.
- 2) Atribut ekonomis mencerminkan bagaimana pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan pesisir berdampak secara ekonomi terhadap keberlanjutan secara ekologis. Suatu kegiatan yang menimbulkan kerugian secara ekonomis, misalnya karena rendahnya produktivitas ataupun karena kerusakan-kerusakan sumber daya alam di pesisir, pasti tidak akan berlanjut. Hal ini, berpotensi untuk merusak lingkungan sehingga juga berpotensi mengancam keberlanjutan ekologis. Penurunan produktivitas dapat menjadi indikator dimensi ekonomi, juga penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap pendapatan.
- 3) Atribut sosial mencerminkan bagaimana kegiatan pembangunan di wilayah pesisir berdampak terhadap keberlanjutan sosial budaya komunitas nelayan atau

masyarakat pesisir setempat yang pada akhirnya juga akan berdampak terhadap keberlanjutan ekologis. Pemahaman masyarakat yang tinggi terhadap lingkungan, tingkat pendidikan yang tinggi, tingkat kesehatan yang baik, bekerja dalam kelompok akan mendorong ke arah keadilan sosial dan kemudahan pengelolaan pemanfaatan yang mengarah ke keberlanjutan dimensi sosial. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik serta tingkat pendapatan yang memadai pada akhirnya juga akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan (ekologis). Sebaliknya, frekuensi konflik yang tinggi baik dalam sektor yang sama maupun dengan sektor lain akan mengancam keberlanjutan sosial.

- 4) Atribut kelembagaan mencerminkan seberapa jauh tersedia perangkat kelembagaan dan hukum yang dapat mendorong keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

Dimensi ekologi (lingkungan), ekonomi, sosial dan kelembagaan merupakan empat dimensi yang harus seimbang dalam pembangunan berkelanjutan (Charles 2001). Dan pada akhirnya, keberhasilan suatu pengelolaan wilayah pesisir sangat ditentukan oleh kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat (Susilo, 2003).

Beberapa indikator ekosistem wilayah pesisir dapat digunakan sebagai salah satu cara memonitor keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menurut OECD (1993), indikator-indikator tersebut adalah:

- 1) **Parameter fisik:** luas lahan yang masih alami; luas lahan pemukiman, industri, komersial, dan rekreasi; volume dan luas pembuangan sampah, reklamasi, dan drainase tahunan; tingkat ekstraksi tahunan dari mineral, pasir, kerikil, gas, dan minyak bumi; perubahan volume pasir pantai; tingkat abrasi pantai; perubahan tingkat permukaan laut;
- 2) **Parameter kimia/biologi:** indikator kualitas air; kandungan klorofil; distribusi vegetasi wilayah pesisir; persen habitat alami yang dilindungi; jumlah species terancam punah;

3) **Parameter Sosial:** kepadatan populasi penduduk; perlindungan terhadap situs yang bernilai budaya dan arkeologi; rasio lahan yang telah dikembangkan terhadap yang belum dikembangkan; tingkat infrastruktur yang ada; peluang akses publik terhadap pantai; partisipasi publik dan dunia usaha (industri) dalam penentuan kebijakan dan tujuan pengelolaan; dan kemauan politik pemerintah dan politikus.

Bengen (2004) menyatakan bahwa, selain memiliki potensi sumberdaya yang besar, wilayah pesisir juga memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitas yang dimaksud adalah 1) penentuan wilayah pesisir baik ke arah darat maupun ke arah laut sangat bervariasi tergantung karakteristik lokal kawasan tersebut; 2) adanya keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan kawasan lahan atas dan laut lepas; 3) memiliki berbagai jenis sumberdaya dan jasa lingkungan, sehingga menghadirkan berbagai penggunaan/pemanfaatan sumberdaya pesisir yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor pembangunan; 4) secara sosial ekonomi, wilayah pesisir biasa dihuni oleh lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki preferensi yang berbeda; 5) adanya sifat *common property* dari sumberdaya pesisir yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap sumberdaya tersebut; dan 6) sistem sosial budaya masyarakat pesisir memiliki ketergantungan terhadap fenomena alam. Karena kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir cukup tinggi, maka alternatif yang sesuai untuk pengelolaannya adalah pengelolaan secara terpadu. Sebaliknya pengelolaan secara sektoral hanya akan memperbesar ancaman terhadap kelangsungan sumberdaya pesisir dan laut. Berkaitan dengan pengembangan rumput laut di wilayah pesisir, maka pengelolaan yang dilaksanakan harus terpadu dengan sektor-sektor lain agar tidak saling mematikan sehingga pengembangan rumput laut dapat berkelanjutan dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat digambarkan secara ringkas terkait dengan konsep pengembangan wilayah pesisir sebagai berikut:

Tabel 2.3 Ringkasan Aspek Pengembangan Wilayah Pesisir

No.	Pendapat Para Ahli (1)	Aspek Pengembangan Wilayah Pesisir (2)
1.	Munasinghe, (1994)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) terpadunya konsep "equity" lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan;</li> <li>2) dipertimbangkan secara khusus dimensi ekonomi;</li> <li>3) dipertimbangkan secara khusus dimensi lingkungan;</li> <li>4) dipertimbangkan secara khusus dimensi sosial budaya.</li> </ul>
2.	Reid (1995) dalam Kay dan Alder, 2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Integrasi antara konservasi dan pengembangan wilayah pesisir; (ekologi/lingkungan)</li> <li>2) Pemenuhan kebutuhan dasar nelayan; (ekonomi)</li> <li>3) peluang untuk memenuhi kebutuhan nelayan yang bersifat non-materi; (ekonomi)</li> <li>4) Berkembang ke arah keadilan sosial dan kesejahteraan nelayan; (social budaya)</li> <li>5) Penghormatan dan dukungan terhadap keragaman budaya di wilayah pesisir; (social budaya)</li> <li>6) Memberikan peluang penentuan identitas diri secara sosial dan menumbuhkan sikap percaya diri pada masyarakat di wilayah pesisir; (social budaya)</li> <li>7) memelihara integritas ekologi di wilayah pesisir. (ekologi/lingkungan)</li> </ul>
3.	Pitcher dan Preikshot (2001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ekologi;</li> <li>2) Ekonomi;</li> <li>3) Sosial;</li> <li>4) Teknologi;</li> <li>5) Etika.</li> </ul>
4.	Charles (2001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Keberlanjutan ekologi</li> <li>2) Keberlanjutan sosio-ekonomi</li> <li>3) Keberlanjutan komunitas</li> <li>4) Keberlanjutan kelembagaan.</li> </ul>
5.	Bengen dan Rizal, 2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) rehabilitasi kawasan pesisir dan lautan yang telah mengalami kerusakan; (ekologi/lingkungan)</li> <li>2) internalisasi biaya eksternalitas ke dalam setiap kegiatan pembangunan; (ekonomi)</li> <li>3) penetapan retribusi atas setiap pemanfaatan sumberdaya kelautan; (ekonomi)</li> <li>4) laut dikelola secara co-management; (kelembagaan)</li> <li>5) reorientasi laut sebagai milik negara ke milik rakyat; (social budaya)</li> <li>6) laut harus dianggap sebagai bagian dari ekosistem global.(ekologi/lingkungan)</li> </ul>



No.	Pendapat Para Ahli (1)	Aspek Pengembangan Wilayah Pesisir (2)
6.	Susilo, 2003	1) Atribut ekologis 2) Atribut ekonomis 3) Atribut sosial 4) Atribut kelembagaan
7.	OECD, 1993	1) Parameter fisik 2) Parameter kimia/biologi (ekologi/lingkungan) 3) Parameter sosial

Sumber: Hasil Rangkuman, 2016

Dari berbagai sumber terkait konsep pengembangan wilayah pesisir di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan konsep pengembangan perlu mempertimbangkan komponen-komponen pengembangan wilayah pesisir yang meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek sumberdaya, sosial budaya, aspek ekonomi, spasial, lingkungan, dan kelembagaan. Beberapa aspek pengembangan yang disebutkan memiliki kesamaan dengan aspek pengembangan sumber lain. Sedangkan dalam beberapa aspek tertentu memiliki kesetaraan sehingga dapat saling menggantikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Rangkuman dari Berbagai Sumber mengenai Aspek yang Berpengaruh Dalam Konsep Pengembangan Wilayah Pesisir

Sumber Teori	Indikator dari Sumber					
	Aspek Sosial-Budaya (1)	Aspek Ekonomi (2)	Aspek Lingkungan Fisik (3)	Aspek Kelembagaan (4)	Aspek Sumberdaya (5)	Aspek Lokasi /Jarak (6)
Munasinghe (1994)	√	√	√	—	—	—
Reid (1995) dalam Key dan Alder, 2005	√	√	√	—	—	—
Pitcher dan Preikshot (2001)	√	√	√	—	—	—
Charles (2001)	√	√	√	√	—	—
Bengen dan Rizal, 2002	√	√	√	√	—	—
Susilo, 2003	√	√	√	√	—	—
OECD, 1993	√		√	—	—	—

Sumber: Hasil Kajian Pustaka, 2016

Dari uraian terkait dengan aspek pengembangan wilayah pesisir menurut beberapa sumber di atas, ada beberapa kesamaan kriteria baik itu secara tersurat maupun tersirat (makna kriteria). Oleh karena itu dilakukan sintesa untuk menyederhanakan aspek-aspek tersebut, namun tetap mengandung semua unsur yang telah dijabarkan menurut beberapa sumber di atas dan menurut kesesuaian serta kebutuhan penelitian yaitu:

- 1) Aspek sosial budaya : Dalam hal ini menyangkut kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pesisir. Aspek sumberdaya dalam table di atas disederhanakan dan digabung ke aspek sosial budaya karena memiliki kesamaan makna. Kebutuhan dasar masyarakat yang dimaksud dalam aspek sosial budaya diperoleh dari hasil sintesa teori antara lain meliputi tingkat pendidikan masyarakat, ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan, dan tingkat pendapatan/penghasilan.
- 2) Aspek ekonomi : Dalam hal ini menyangkut potensi ekonomi kawasan masyarakat dalam sebulan di wilayah pesisir yang akan dikembangkan. Tingkat pendapatan ini berkaitan dengan semua perhitungan ekonomi seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya transportasi dll sehingga aspek lokasi/jarak transportasi disederhanakan dan digabung ke aspek ekonomi.
- 3) Aspek Lingkungan Fisik : Dalam hal ini menyangkut kondisi fisik lingkungan untuk kebutuhan nelayan di wilayah pesisir yang akan dikembangkan sebagai kawasan minapolitan seperti luas lahan usaha tani (budidaya dan tangkap) dan luas lahan industri,
- 4) Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan wilayah pesisir: Adalah sejauh mana perhatian pemerintah yang tertuang dalam bentuk kebijakan yang berkaitan langsung dan mendukung perencanaan pengembangan kawasan di wilayah yang akan dikembangkan.

Dari kesamaan teori aspek-aspek yang berpengaruh dalam pengembangan wilayah pesisir diatas maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian terkait dengan pengembangan wilayah pesisir ini meliputi aspek sosial-budaya, aspek ekonomi, aspek lingkungan fisik, dan aspek kelembagaan yang akan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.5 Indikator dalam Pengembangan Wilayah Pesisir

No.	Indikator (1)	Variabel (2)
1.	Aspek sosial budaya: Kemampuan masyarakat pesisir dalam pemenuhan kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendidikan masyarakat pesisir</li> <li>• Ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan</li> <li>• Tingkat pendapatan/penghasilan</li> </ul>
2.	Potensi ekonomi kawasan di wilayah pesisir yang akan dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB;</li> </ul>
3.	Aspek fisik lingkungan terkait lahan untuk kebutuhan usaha perikanan di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan lahan usaha tani (budidaya dan tangkap);</li> <li>• Ketersediaan lahan industry (pengolahan)</li> </ul>
4.	Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tata ruang pengembangan kawasan perikanan.</li> </ul>

Sumber: Hasil Sintesa, 2016

## 2.2. Kawasan Minapolitan

Istilah minapolitan serupa dengan istilah agropolitan yang telah lama dikenal. Agropolitan dikenalkan oleh Friedman dan Douglas pada tahun 1967 melalui konsep agropolitan distrik. Hanya saja berbeda dalam segi komoditas yang diunggulkan. Secara definisi Agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian. Menurut Departemen Pertanian (2003) Agropolitan merupakan kota yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, dan menarik kegiatan pertanian (agribisnis) di wilayah-wilayahnya. Minapolitan bila dilihat dari definisi yang serupa dengan agropolitan, dalam bahasa sansekerta *Mina* berarti ikan, sehingga mina bias diartikan sebagai Kota Perikanan yang konsep pengembangan dan pembangunan kelautan dan perikanannya berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan

meliputi prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi agar wilayah tersebut cepat tumbuh layaknya sebuah kota (KKP, 2009).

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi (Suaib, 2012). Sedangkan kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya (Kementrian Pekerjaan Umum, 2012). Sunoto berpendapat bahwa konsep Minapolitan mempunyai dua unsur utama yaitu, Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pada beberapa pengertian dari berbagai sumber yang telah dijelaskan maka dapat dikemukakan bahwa minapolitan merupakan suatu konsep pembangunan dan pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan meliputi prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi agar wilayah tersebut dapat berkembang dan mengalami percepatan pertumbuhan layaknya sebuah kota.

Konsep Minapolitan dapat didefinisikan sebagai kota perikanan dengan konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan berprinsip integrasi, efisien, kualitas, akselerasi tinggi. Menyangkut luasan wilayah Minapolitan menurut Rustiadi *et al*, (2006) menyatakan lebih cocok pada skala kecamatan oleh karena: (1) kemudahan akses, (2) cukup luas untuk mengembangkan wilayah pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi produk, (3) pengetahuan lokal yang mudah disinergisasi dalam proses perencanaan.

Kawasan Minapolitan berdasarkan turunan kawasan Agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem

permukiman dan sistem minabisnis. Pengembangan Minapolitan ini lebih menekankan kepada pengembangan wilayah, kelestarian lingkungan, kelembagaan, peningkatan produk lokal dan partisipasi masyarakat.

Pengembangan kawasan Minapolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Sedangkan tujuan dari pengembangan Minapolitan (KKP, 2010), yaitu:

1. Meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata.
3. Mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian rakyat.

Sasaran pelaksanaan Minapolitan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.12, 2010), meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
  - a. penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
  - b. pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
  - c. penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
  - d. pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
  - e. pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.

2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
  - a. deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
  - b. pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
  - c. penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif *barriers*);
  - d. pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran; dan
  - e. pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
  - a. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
  - b. pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
  - c. revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
  - d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

Adapun karakteristik kawasan Minapolitan meliputi (Kepmen Kelautan dan Perikanan No.18, 2011):

- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
- c. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan
- d. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

Menurut pedoman umum minapolitan (2011) Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu

1. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat,
2. Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan
3. Penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat – bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Dengan konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.

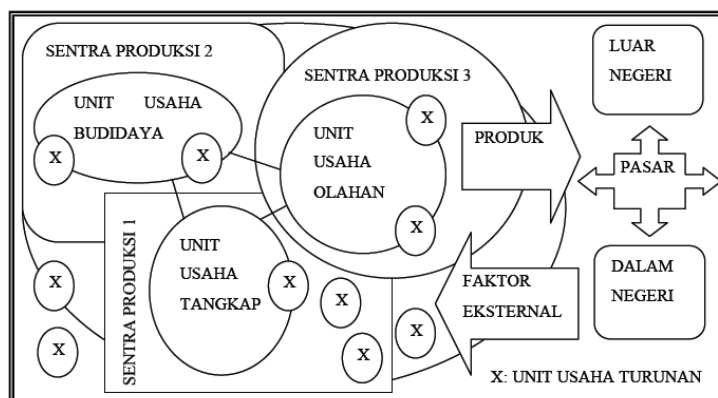
1. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders, baik instansi sektoral, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik.
2. Prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.
3. Prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil

produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif.

4. Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan market share produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.

Berdasarkan beberapa pembahasan mengenai konsep Minapolitan diatas, dapat disimpulkan mengenai konsep Minapolitan pada dasarnya adalah konsep pengembangan wilayah dimana konsep ini menitik beratkan pada pengembangan komoditas unggulan pada sektor perikanan di suatu wilayah pesisir sebagai kutub tumbuh kemandirian daerah berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi tinggi sesuai pedoman kawasan minapolitan.

Konsep Minapolitan pada dasarnya merupakan perpaduan teori-teori lokasi yang berkembang dalam konsep agropolitan seperti teori Christaller, teori Losh dan teori Von Thunen, kesemua teori ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa setiap wilayah memiliki hirarki dan fungsi yang berbeda, sehingga membentuk suatu interaksi yang tetap dan berlanjut antara kota dan desa. Atas dasar fungsi dan hirarki tersebut dapat ditentukan lokasi untuk setiap aktivitas ekonomi yang akan dikembangkan.



Gambar 2.1 Skema Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan (Sunoto, 2010)



Pada Gambar 2.1 diatas Sunoto (2013) menjelaskan bahwa penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa fasilitas sentra produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, fasilitas pengolahan ikan ataupun kombinasi kedua hal tersebut. Dari sentra-sentra produksi tersebut akan menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Soenarno (2003) terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan kawasan minapolitan antara lain :

1. Penyusunan master plan pengembangan Kawasan Minapolitan yang akan menjadi acuan masing-masing wilayah/propinsi. Penyusunan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sehingga program yang disusun lebih akomodatif. Master plan disusun dalam jangka waktu panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1-3 tahun) yang bersifat rintisan dan stimulan.
2. Penetapan lokasi minapolitan yang kegiatannya dimulai dari usulan penetapan kabupaten oleh pemerintah propinsi, untuk selanjutnya oleh pemerintah kabupaten mengusulkan Kawasan Minapolitan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi potensi dan masalah untuk mengetahui kondisi dan potensi lokal (komoditas unggulan), antara lain: potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, iklim usaha dan sebagainya serta terkait dengan sistem pemukiman nasional, propinsi dan kabupaten.
3. Sosialisasi program minapolitan dilakukan kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan pengembangan program minapolitan baik di pusat maupun di daerah, sehingga pengembangan program minapolitan dapat lebih terpadu dan terintegrasi.

Sunoto menjelaskan strategi pengembangan kawasan minapolitan ini lebih ke pendekatan kelembagaan dimana pemerintah memiliki kewenangan penuh didalamnya. Selain itu terdapat aspek sumberdaya dan fasilitas pendukung juga dibahas dalam strategi pengembangan kawasan minapolitan ini.

Menurut KKP (2010) bahwa pendekatan yang harus dilakukan dalam pengembangan minapolitan antara lain:

1. Ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumberdaya sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam kesisteman yang mapan.

2. Kawasan ekonomi unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (a) bernilai ekonomis tinggi; (b) teknologi tersedia, (c) permintaan pasar besar dan (d) dapat dikembangkan secara masal.

3. Sentra produksi

Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.

4. Unit usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam satu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

5. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan Minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

## 6. Lintas sektor

Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses dan BBM.

Konsep kawasan minapolitan sendiri sangat erat hubungannya dengan teori-teori perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan perikanan tangkap merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Dahuri (2012) berpendapat pada dasarnya perikanan tersusun oleh tiga subsistem, yaitu sumberdaya ikan, sumberdaya manusia, dan manajemen. Ikan merupakan sumberdaya alam yang bersifat *renewable* atau mempunyai sifat dapat pulih/dapat memperbaharui diri. Di samping *renewable*, menurut Dahuri (2001), sumberdaya ikan mempunyai sifat *„open access“* dan *„common property“*, artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum.

Untuk sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan perikanan terdiri dari nelayan, pengolah hasil perikanan, dan seluruh pelaku yang terlibat dalam usaha pendukung perikanan (Effendi, 2006). Sedangkan menurut Dahuri (2001), pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan diantaranya:

1. Nelayan
2. Tengkulak ikan atau pedagang pengumpul
3. Koperasi perikanan
4. Pengusaha perikanan
5. Konsumen ikan, dan

6. Departemen Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten/kota.

Pengelolaan perikanan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan wilayah pesisir secara keseluruhan. Pengintegrasian perikanan ke dalam pengelolaan wilayah pesisir dilakukan karena wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat rapuh dengan berbagai kepentingan yang saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya cenderung menyulut konflik (Effendi, 2006).

Pembangunan perikanan serta pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut harus mampu mentransformasikan berbagai usaha perikanan masyarakat ke arah bisnis dan swasembada secara menyeluruh dan terpadu. Pendekatan menyeluruh (*holistic*) dan terpadu ini berarti melihat usaha perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait (Dahuri, 2001), yaitu:

1. Sumberdaya perikanan, yaitu sumberdaya alam (baik yang berada di laut, pesisir, perairan tawar), SDM, dan sumberdaya buatan.
2. Sarana dan prasarana, meliputi perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, infrastruktur pada sentra produksi, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (Seperti BBM, benih, mesin dan alat tangkap), serta sistem informasi tentang teknologi baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien.
3. Produksi perikanan, meliputi usaha budidaya dan penangkapan yang menyangkut usaha perikanan skala kecil maupun besar.
4. Pengolahan hasil perikanan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen sampai produk siap dipasarkan.
5. Pemasaran hasil perikanan, meliputi kegiatan distribusi dan pemasaran hasil-hasil perikanan atau olahannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk pula di dalamnya kegiatan pemantauan distribusi informasi pasar (*market development*) dan pengembangan produk (*product development*).

6. Pembinaan, mencakup kegiatan pembinaan institusi, iklim usaha yang kondusif, iklim poleksosbud yang mendukung, peraturan dan perundangan yang kondusif, pembinaan SDM, serta kepemimpinan yang baik agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai seefektif mungkin.

Sumberdaya perikanan oleh berbagai negara dijadikan sebagai salah satu produk andalan. Dikarenakan sifat dasar produk perikanan memiliki daur hidup yang sangat rentan terhadap gangguan ekosistem, maka dirumuskan suatu tata laksana untuk perikanan yang bertanggung jawab yaitu *Code Conduct of Fisheries* pada tanggal 31 Oktober 1995. Hal-hal yang menjadi cakupan dari pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkesinambungan adalah:

- a. Aspek Lingkungan

Dalam kegiatan usaha perikanan perlu didahului dengan Analisa Dampak Lingkungan karena aktifitas tersebut mempunyai dampak yang serius terhadap ekosistem sumberdaya perikanan. Ekosistem perairan pada hakekatnya tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan ekosistem lain.

- b. Aspek Efisiensi Usaha

Efisiensi usaha dapat dicapai dengan tidak hanya mengacu pada kenaikan volume tangkapan akan tetapi dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi usaha ke akuakultur. Prinsip internal eksternal yang dijalankan oleh usaha perikanan tidak hanya untuk mendapatkan profit, akan tetapi juga termasuk di dalamnya kelestarian sumberdaya perikanan.

- c. Teknologi Penangkapan

Penggunaan teknologi penangkapan sejak dini harus ramah lingkungan karena faktor ini memiliki daya rusak sumberdaya perikanan.

- d. Hukum

Pengaturan dan penerapan hukum merupakan hal yang sangat penting karena kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan akan dapat terlaksana bila hal ini dijalankan. Hal ini sering dirisaukan mengingat para penentu kebijakan justru menjadi sumber ketidakpatuhan.

e. Mobilisasi Input

Berbagai pendapat ahli menyatakan bahwa penggunaan input yang semakin meningkat, potensial akan menjadi ancaman terhadap sumberdaya perikanan. Modernisasi kapal penangkap ikan, menyediakan modal kerja menyebabkan daya jelajah penangkapan akan meluas dan ini berarti peluang untuk menurunkan stok ikan juga semakin besar.

f. Pengendalian/pengawasan.

Faktor ini sering menjadi lemah dari seluruh proses pengelolaan atau pelaksanaan suatu kebijakan. Monitoring, controlling dan surveillance amat penting artinya dan prosesnya dilaksanakan bersama dengan kebijakan tersebut.

Adapun menurut Ghufroon (2008), faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi kegiatan perikanan yang meliputi pemilihan lokasi, tenaga kerja, sarana prasarana transportasi, alat dan bahan, harga dan pasar, serta partisipasi dan kemitraan.

1. Pemilihan lokasi

Lokasi yang dipilih untuk pengembangan kegiatan perikanan harus jelas sehingga tidak berbenturan dengan kepentingan instansi atau lembaga lain.

2. Tenaga Kerja

Usaha perikanan yang berskala besar membutuhkan tenaga kerja yang lebih luas, dibandingkan dengan usaha perikanan berskala kecil.

3. Prasarana dan Sarana Transportasi

Lokasi kegiatan perikanan harus dijangkau dengan mudah dari berbagai arah agar produksi, pemasaran dan keperluan kebutuhan lainnya dapat berjalan lancar. Artinya, prasarana dan sarana transportasi telah memadai.

4. Alat dan Bahan

Ketersediaan alat dan bahan di sekitar lokasi kegiatan perikanan dapat menekan biaya yang diperlukan baik dilihat dari segi biaya transportasi maupun tenaga kerja yang dibutuhkan.

## 5. Harga dan Pasar

Tingkat kemampuan penyerapan hasil produksi oleh pasar yang tinggi dengan harga jual yang sesuai tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi nelayan.

## 6. Partisipasi dan Kemitraan

Partisipasi masyarakat dalam usaha perikanan, baik dalam setiap kegiatan minabisnis maupun pemasaran perlu dikoordinasikan dengan baik. Kerjasama antara pemerintah sebagai pengontrol dan pengawas, swasta sebagai mitra kerja dan masyarakat sebagai pelaku usaha.

Dari beberapa teori dan pembahasan di atas maka dapat diketahui unsur yang mempengaruhi pengembangan Minapolitan adalah sektor perikanan. Berdasarkan teori *code of conduct for fisheries*, indikator yang mempengaruhi pengembangan sektor perikanan adalah aspek lingkungan, aspek efisiensi usaha, teknologi penangkapan, hukum, mobilisasi input, penerapan kebijakan, dan pengendalian kawasan. Aspek mobilisasi input terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan digolongkan dalam aksesibilitas yang memfasilitasi adanya arus perpindahan barang. Sedangkan menurut Dahuri (2001), pengembangan sektor perikanan tidak hanya pada produksi saja, tetapi juga sampai pemasaran hasil perikanan. Indikator yang berpengaruh adalah sumberdaya perikanan (SDA dan SDM), prasarana dan sarana, produksi perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, dan pembinaan. Untuk kegiatan pemasaran digolongkan ke dalam fasilitas pendukung kegiatan pemasaran. Tidak berbeda jauh dengan Dahuri (2001), Ghufroon (2008) berpendapat indikator yang berpengaruh adalah lokasi, tenaga kerja, prasarana dan sarana, transportasi, alat dan bahan, harga dan pasar, serta partisipasi dan kemitraan. Dua teori ini memiliki cakupan pembahasan yang cukup lengkap bila dibandingkan teori-teori lainnya dari Sunoto (2003), Soenarno (2013), KKP (2010) dan Code of Conduct For Fisheries. Terkait dengan upaya pengembangan kawasan minapolitan

aspek-aspek utama yang mempengaruhi pengembangan kawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan

Sumber Teori	Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan					
	Sumberdaya Manusia (1)	Aksesibilitas (2)	Kelembagaan (3)	Fasilitas Pendukung (4)	Infrastruktur (5)	Teknologi dan informasi (6)
Sunoto (2010)		√		√	√	
Soenarno (2003)	√		√	√		
KKP (2010)	√		√	√		
<i>Code of Conduct for Fisheries</i>		√	√	√	√	√
Dahuri (2001)	√	√	√	√	√	√
Ghufron (2008)	√	√	√	√	√	√

Sumber: Hasil Kajian Pustaka, 2016

Dari kesamaan teori aspek-aspek yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan minapolitan diatas maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan dari kajian pustaka di atas meliputi :

1. **Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang mengelola usaha perikanan di kawasan minapolitan.** Ketersediaan ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja dan kualitas SDM tenaga kerja yang mengelola usaha perikanan baik dari kegiatan produksi/penangkapan, pengolahan hingga pemasaran.
2. **Aksesibilitas yang menghubungkan berbagai kegiatan yang ada di kawasan minapolitan** meliputi jarak lokasi, kondisi jalan, serta sarana transportasi yang menghubungkan kegiatan produksi terhadap aktifitas terkait lainnya
3. **Manajamen Kelembagaan,** menyangkut kebijakan lembaga terkait yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan meliputi Ketersediaan



Lembaga Masyarakat (Kelompok nelayan), ketersediaan lembaga permodalan (Koperasi), ketersediaan lembaga penyuluhan/pelatihan, serta badan pengelola kawasan minapolitan

4. **Fasilitas yang terdapat di kawasan minapolitan** sebagai pendukung kegiatan produksi meliputi jumlah sentra produksi perikanan, jumlah tempat pelelangan ikan, jumlah fasilitas pengolahan ikan, dan jumlah pasar ikan
5. **Infrastruktur yang terdapat di kawasan minapolitan** sebagai pendukung kegiatan produksi meliputi, kondisi jaringan listrik, kondisi jaringan air bersih, kondisi jaringan pembuangan limbah, kondisi jaringan drainase, kondisi jaringan telekomunikasi
6. **Teknologi informasi yang digunakan**, sebagai pendukung kegiatan di kawasan minapolitan meliputi jenis teknologi yang digunakan dalam proses produksi/penangkapan ikan, jenis teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan ikan, jenis teknologi yang digunakan dalam proses pemasaran produksi kondisi jaringan informasi

Tabel 2.7 Indikator Pengembangan Kawasan Minapolitan

No.	Indikator (1)	Variabel (2)
1.	Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang mengelola usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tenaga kerja sektor perikanan</li> <li>- Kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan</li> </ul>
2.	Aksesibilitas yang menghubungkan berbagai kegiatan yang ada di kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarak lokasi kegiatan perikanan dengan pusat perkotaan</li> <li>- Kondisi jalan yang menghubungkan kegiatan produksi terhadap aktifitas terkait lainnya</li> <li>- Sarana transportasi yang menghubungkan kegiatan produksi terhadap aktifitas terkait lainnya</li> </ul>

No.	Indikator (1)	Variabel (2)
3.	Manajemen Kelembagaan, terkait pengembangan kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Lembaga Masyarakat (Kelompok nelayan)</li> <li>- Ketersediaan Lembaga permodalan (Koperasi)</li> <li>- Ketersediaan Lembaga penyuluhan/pelatihan</li> <li>- Ketersediaan badan pengelola kawasan minapolitan</li> </ul>
4	Fasilitas pendukung yang terdapat di kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sentra produksi perikanan</li> <li>- Ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan</li> <li>- Ketersediaan Fasilitas Pengolahan ikan</li> <li>- Ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan</li> <li>- Ketersediaan pasar ikan</li> </ul>
5.	Jaringan Infrastruktur yang terdapat di kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan.</li> </ul>
6.	Teknologi informasi yang digunakan dalam mengelola kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis teknologi yang digunakan dalam kegiatan/aktivitas perikanan</li> <li>- Kondisi jaringan informasi</li> </ul>

Sumber: Hasil Sintesa, 2016

### 2.3 Sintesa Kajian Pustaka

Dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya rumput laut di Kabupaten Sikka maka diperlukan suatu konsep optimalisasi pada kawasan pesisir di Kabupaten Sikka sebagai Kawasan Minapolitan secara terpadu, sehingga akan meningkatkan sumberdaya masyarakat pesisir. Berdasarkan tujuan penelitian, terdapat beberapa sasaran penelitian yang digunakan dalam mencapai tujuan. Sehingga diperlukan penentuan variabel-variabel dalam mengerjakan sasaran penelitian. Untuk indikator dalam penelitian ini adalah dengan mengaitkan kajian pustaka terhadap kondisi lapangan. Berdasarkan diskusi dari berbagai teori di atas dapat disintesa indikator dan variabel terkait dalam penelitian. Adapun variabel tersebut secara jelas, ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Indikator & Variabel

Kajian (1)	Indikator (2)	Variabel (3)
Pengembangan Wilayah Pesisir	Aspek sosial budaya: Kemampuan masyarakat pesisir dalam pemenuhan kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendidikan masyarakat pesisir</li> <li>• Ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan</li> <li>• Tingkat pendapatan/penghasilan</li> </ul>
	Potensi ekonomi kawasan di wilayah pesisir yang akan dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB</li> </ul>
	Aspek fisik lingkungan terkait lahan untuk kebutuhan usaha perikanan di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan lahan usaha tani (budidaya dan tangkap);</li> <li>• Ketersediaan lahan industri (pengolahan)</li> </ul>
	Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tata ruang pengembangan kawasan perikanan..</li> </ul>
Pengembangan Kawasan Minapolitan	Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang mengelola usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tenaga kerja sektor perikanan</li> <li>- Kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan</li> </ul>
	Aksesibilitas yang menghubungkan berbagai kegiatan yang ada di kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi jalan yang menghubungkan kegiatan produksi terhadap aktifitas terkait lainnya</li> <li>- Sarana transportasi yang menghubungkan kegiatan produksi terhadap aktifitas terkait lainnya</li> </ul>
	Manajemen Kelembagaan, terkait pengembangan kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Lembaga Masyarakat (Kelompok nelayan)</li> <li>- Ketersediaan Lembaga permodalan (Koperasi)</li> <li>- Ketersediaan Lembaga penyuluhan/pelatihan</li> <li>- Ketersediaan badan pengelola kawasan minapolitan</li> </ul>
	Fasilitas pendukung yang terdapat di kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sentra produksi perikanan</li> <li>- Ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan</li> <li>- Ketersediaan Fasilitas Pengolahan ikan</li> <li>- Ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan</li> <li>- Ketersediaan pasar ikan</li> </ul>
	Jaringan Infrastruktur dasar yang terdapat di kawasan minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan.</li> </ul>
	Teknologi informasi yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis teknologi yang digunakan</li> </ul>

<b>Kajian (1)</b>	<b>Indikator (2)</b>	<b>Variabel (3)</b>
	digunakan dalam mengelola kawasan minapolitan	dalam kegiatan/aktivitas perikanan - Kondisi jaringan informasi

Sumber : Hasil Tinjauan Pustaka, 2016

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik, dimana kebenaran bersumber pada teori dan fakta empiri suatu objek untuk melakukan analisis terhadap objek tersebut. Objek penelitian dilihat dalam konteksnya yang tercakup dalam konstruksi teoritik, karena pada dasarnya topik yang berkaitan dengan pengembangan kawasan dengan pendekatan minapolitan tidak dapat berdiri sendiri karena adanya keterkaitan antara faktor-faktor didalamnya.

Penelitian ini dimulai dengan mencari dan merumuskan batasan-batasan ruang lingkup pembahasan, wilayah dan kajian teori minapolitan sebagai pendekatan pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Sikka. Kajian pada analisis ini dijelaskan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terkait pengembangan minapolitan di wilayah penelitian dan merumuskan konsep pengembangan wilayah sebagai kawasan minapolitan. Tahap terakhir adalah tahap generalisasi hasil yang bertujuan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan didukung dengan landasan teori yang berhubungan dengan pengembangan minapolitan.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena, menerangkan hubungan, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

### 3.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan rangkuman dari tinjauan pustaka didapatkan beberapa indikator dan variabel yang sesuai untuk dipergunakan dalam analisa. Variabel penelitian terdiri dari variabel terkait (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*). Variabel *dependent* biasa disebut juga variabel “Y” ataupun variabel sebab. Sedangkan variabel *independent* adalah variabel yang menjelaskan/mempengaruhi variabel yang lain. Variabel ini biasa disebut juga variabel “X” ataupun variabel akibat (Subagyo, 2004). Dalam penelitian ini, variabel terikat (*dependent*) adalah indikator pengembangan wilayah, sedangkan variabel bebas (*independent*) adalah indikator pengembangan minapolitan.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator, variabel dan definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

No.	Indikator (1)	Variabel (2)	Definisi Operasional (3)
1.	Aspek sosial budaya: Kemampuan masyarakat pesisir dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Tingkat pendidikan masyarakat pesisir	Jumlah penduduk yang ada di wilayah pesisir berdasarkan tingkat pendidikan
		Ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan	Jumlah tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan di wilayah penelitian
		Tingkat pendapatan/penghasilan	Jumlah penduduk di wilayah pesisir berdasarkan tingkat pendapatan atau penghasilan
2.	Potensi ekonomi kawasan di wilayah pesisir yang akan dikembangkan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi produk/komoditas sektor perikanan terhadap PDRB
3.	Aspek fisik lingkungan terkait lahan untuk	Ketersediaan lahan usaha tani (budidaya dan tangkap);	Jumlah ketersediaan lahan usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang ada di lokasi penelitian

No.	Indikator (1)	Variabel (2)	Definisi Operasional (3)
	kebutuhan usaha nelayan di wilayah pesisir.	Ketersediaan lahan industry (pengolahan)	Jumlah ketersediaan lahan yang digunakan masyarakat pesisir sebagai tempat industry pengolahan perikanan dan kelautan
4.	Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan wilayah pesisir	Kebijakan tata ruang	Jenis kebijakan tata ruang yang mendukung pengembangan wilayah di wilayah penelitian
5.	Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang mengelola usaha perikanan	Jumlah tenaga kerja sektor perikanan	Jumlah tenaga kerja sektor perikanan yang menangkap, memproduksi, mengolah, memasarkan
		Kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan	Jumlah tenaga kerja sektor perikanan yang menangkap, memproduksi, mengolah, memasarkan perikanan berdasarkan tingkat pendidikan
6.	Aksesibilitas yang menghubungkan berbagai kegiatan yang ada di kawasan minapolitan	Kondisi jalan yang menghubungkan kegiatan produksi terhadap aktifitas terkait lainnya	Jenis kondisi jalan yang dapat ditempuh dalam memperlancar kegiatan produksi, pengolahan maupun pemasaran ikan
		Sarana transportasi yang menghubungkan kegiatan produksi terhadap aktifitas terkait lainnya	Jenis sarana transportasi yang dapat ditempuh dalam memperlancar kegiatan produksi, pengolahan maupun pemasaran ikan
7.	Manajemen Kelembagaan, terkait pengembangan kawasan minapolitan	Ketersediaan Lembaga Masyarakat (Kelompok nelayan)	Jumlah lembaga masyarakat terkait kegiatan di sektor perikanan dan kelautan misalnya kelompok nelayan di lokasi penelitian
		Ketersediaan Lembaga permodalan (Koperasi)	Jumlah lembaga yang dapat memberikan pinjaman/modal bagi masyarakat terkait kegiatan di sektor perikanan dan kelautan misalnya lembaga koperasi di lokasi penelitian
		Ketersediaan Lembaga penyuluhan/pelatihan	Jumlah lembaga yang dapat memberikan penyuluhan/pelatihan bagi masyarakat terkait kegiatan di sektor perikanan dan kelautan di lokasi penelitian

No.	Indikator (1)	Variabel (2)	Definisi Operasional (3)
		Ketersediaan Badan pengelola kawasan minapolitan	Ketersediaan badan pengelolaan kawasan daerah yang mengatur kebijakan sektor perikanan dan kelautan di lokasi penelitian
8.	Fasilitas pendukung yang terdapat di kawasan minapolitan	Ketersediaan sentra produksi perikanan	Jumlah sentra/pusat-pusat produksi perikanan yang ada di lokasi penelitian
		Ketersediaan tempat pelelangan ikan	Jumlah tempat pelelangan perikanan yang ada di lokasi penelitian
		Ketersediaan fasilitas sentra pengolahan ikan	Jumlah fasilitas pengolahan perikanan yang ada di lokasi penelitian
		Ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan	Jumlah jasa pelayanan umum terkait (cold storage, SPBU, sekolah perikanan, dll) yang ada di lokasi penelitian
		Ketersediaan pasar ikan	Jumlah pasar ikan yang ada di lokasi penelitian
9.	Jaringan Infrastruktur yang terdapat di kawasan minapolitan	Ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan	Ketersediaan dan kemampuan pelayanan infrastruktur dasar antara lain pelayanan listrik, air bersih, telekomunikasi, jaringan pembuangan limbah serta drainase yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan
10.	Teknologi informasi yang digunakan dalam mengelola kawasan minapolitan	Jenis teknologi yang digunakan dalam kegiatan/aktivitas perikanan	Jenis teknologi yang digunakan dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran ikan di lokasi penelitian
		Kondisi jaringan informasi	Kondisi jaringan informasi yang mendukung kegiatan sektor perikanan dan kelautan di lokasi penelitian

Sumber: Hasil Sintesa, 2016

### 3.4. Metode Penentuan Responden

#### 3.4.1. Populasi Responden

Populasi adalah kelompok elemen lengkap yang biasanya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian dimana peneliti tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2003). Populasi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sikka. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir di Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka,



narasumber dari para ahli yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sikka, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sikka.

### **3.4.2. Penentuan Sampel Responden**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*, dengan prosedur purposive sampling. *Non probability sampling* adalah pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Purposive sampling* merupakan teknik sampel yang digunakan untuk mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, melainkan didasarkan atas tujuan tertentu. Dalam penentuan responden, diambil pihak-pihak yang berkepentingan dan ahli dalam bidang tersebut. Penekanan *purposive sampling* ini adalah pada karakter anggota sampel yang karena pertimbangan mendalam dianggap peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi (Yunus, 2010).

Penentuan responden mengadaptasi dari 5 kriteria dalam pemilihan sampel informan yang dikemukakan oleh Spradley (1980) dalam Bungin (2010), kriteria-kriteria sampel yang dilibatkan adalah sebagai berikut :

1. Subjek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan terkait minapolitan/kawasan pesisir/perikanan dan kelautan sehingga mampu memberi informasi dengan sangat baik dan tepat tentang pertanyaan yang diajukan.
2. Subjek masih terlibat secara aktif dalam kegiatan pemanfaatan atau pengembangan kawasan minapolitan.
3. Subjek memiliki cukup banyak kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subjek tergolong apa adanya dalam memberikan informasi agar lebih factual dalam perolehan informasi.

5. Subjek yang keahlian atau pengetahuannya terkait dengan isu atau masalah yang diangkat.

Penentuan responden yang dilakukan, akan dipilih berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas. Alternatif responden terpilih tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Responden Penelitian

No	Komponen (1)	Instansi / Responden (2)	Kepakaran (3)
1	Pemerintah	Bappeda Kabupaten Sikka	Merumuskan kebijakan umum perencanaan dan pembangunan serta meningkatkan koordinasi perencanaan dan pembangunan serta pengembangan wilayah baik secara umum maupun spesifik mengenai kawasan minapolitan. Bappeda mampu memberikan pertimbangan dalam menentukan faktor, kriteria dan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka
		Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka	Mengetahui karakteristik kawasan perikanan dan kelautan di Kabupaten Sikka baik itu objek komoditas perikanan dan kelautan, kondisi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta kondisi nelayan dan potensi lain yang dapat dikembangkan sehingga mampu memberikan pertimbangan dalam menentukan faktor, kriteria dan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka.
2	Akademisi	Ahli dalam bidang pengembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tenaga ahli maupun pihak akademisi yang pernah melakukan penelitian terkait pengembangan wilayah ataupun yang mengetahui secara teoritis mengenai

No	Komponen (1)	Instansi / Responden (2)	Kepakaran (3)
			variabel-variabel yang mempengaruhi pengembangan wilayah sehingga dapat memberikan pertimbangan dalam menentukan faktor, kriteria dan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka.
		Ahli dalam bidang perikanan dan kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tenaga ahli maupun pihak akademisi yang pernah melakukan penelitian di bidang perikanan dan kelautan, kawasan pesisir, kawasan minapolitan ataupun yang mengetahui secara teoritis mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pengembangan wilayah pesisir dan minapolitan sehingga dapat memberikan pertimbangan dalam menentukan faktor, kriteria dan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka.
3	Masyarakat	Tokoh Masyarakat pesisir Kecamatan Alok Barat	Tokoh masyarakat yang tinggal dan menetap dikawasan pesisir yang memahami dengan baik kegiatan di bidang perikanan dan kelautan, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai kawasan dan mampu memberikan pertimbangan dalam menentukan faktor, kriteria dan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka.
		Masyarakat pesisir Kecamatan Alok Barat	Masyarakat yang tinggal dan menetap dikawasan pesisir serta kehidupan sehari-harinya berhubungan langsung dengan kawasan pesisir yang memahami dengan baik kegiatan di bidang perikanan dan kelautan, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai kawasan dan mampu memberikan pertimbangan dalam

No	Komponen (1)	Instansi / Responden (2)	Kepakaran (3)
			menentukan faktor, kriteria dan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka.
4	Pihak Swasta	Pengusaha/wirusaha di bidang perikanan dan kelautan di Kabupaten Sikka	Pengusaha/wirusaha di bidang perikanan dan kelautan yang dapat memberikan gambaran umum mengenai kawasan dan mampu memberikan pertimbangan dalam menentukan faktor, kriteria dan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka.

Sumber : Hasil Identifikasi Peneliti, 2015

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Teknik pengambilan data dengan survey primer, yang dilakukan dengan cara:

##### a. Observasi

Observasi lapangan dilakukan melalui pengamatan langsung ke wilayah penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting wilayah studi, yang meliputi karakteristik kegiatan subsistem produksi perikanan, dan subsistem minabisnis hilir, dan karakteristik perekonomian kegiatan perikanan di wilayah penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan agar lebih memahami dan mendalami permasalahan di wilayah penelitian. Wawancara dilakukan terhadap instansi-instansi terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka, Dinas Perikanan dan Kelautan, kelompok nelayan serta instansi lainnya yang terkait.

## 2. Data Sekunder

Survey sekunder dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari survey primer berupa kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu juga dilakukan survey pada instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi terkait tujuan penelitian. Adapun instansi-instansi berserta data yang diperlukan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Daftar Data Survei Sekunder

No.	Instansi (1)	Jenis Dokumen (2)
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka	<ul style="list-style-type: none"><li>• RTRW Kabupaten Sikka</li><li>• RZWP3K Kabupaten Sikka</li><li>• RDTRK</li></ul>
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profil perikanan di Kabupaten Sikka</li><li>• Kebijakan terkait pengembangan perikanan di Kabupaten Sikka</li><li>• Kemitraan usaha perikanan</li><li>• Permodalan usaha perikanan</li></ul>
3.	Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sikka	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasaran hasil perikanan</li><li>• Profil usaha kecil dan menengah Kabupaten Sikka</li><li>• Jumlah dan persebaran industri perikanan Kabupaten Sikka</li></ul>
4.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data hierarki dan perkerasan jalan</li></ul>
5.	Dinas Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data jumlah pendapatan daerah dari sektor perikanan</li></ul>
6.	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data jumlah tenaga kerja sektor perikanan di Kabupaten Sikka</li><li>• Data jumlah keseluruhan tenaga kerja Kabupaten Sikka</li></ul>
7.	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monografi</li><li>• Data lembaga swadaya masyarakat Kecamatan</li></ul>

Sumber : Hasil Analisa Kebutuhan Data, 2016

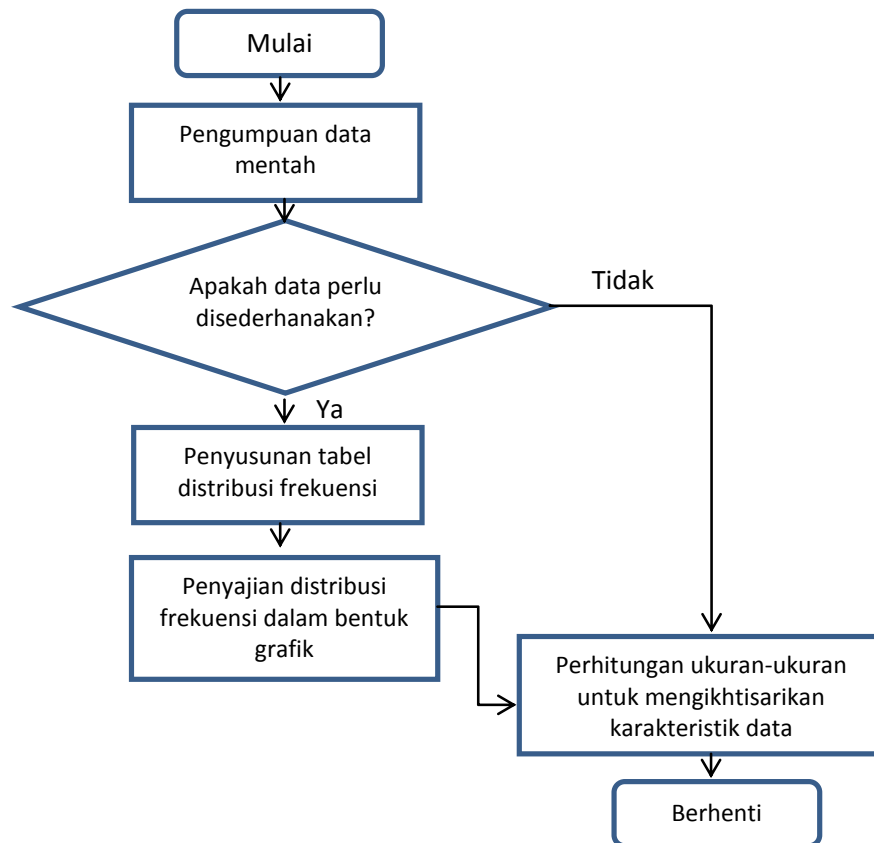
### **3.6. Metode Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif.

#### **3.6.1. Analisis Dalam Mengidentifikasi Karakteristik Kawasan Pesisir di Kecamatan Alok Barat**

Dalam mengidentifikasi karakteristik kawasan pesisir di Kecamatan Alok Barat akan menggunakan alat analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2009). Jika berdasarkan Suprayogi, statistik deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistic (mean, median, modus, standar deviasi, etc), distribusi dan representasi bergambar (grafik), tanpa rumus probabilistic apapun (Walpole, 1993 Correa-Prisant, 2000; Dodge, 2006).

Dalam prosesnya analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik kawasan perikanan dan kelautan di Kecamatan Alok Barat pada setiap variabel terkait yang ada didalamnya. Lokasi penelitian akan dibagi dalam beberapa cluster wilayah sebagai sampel. Dari data setiap sampel dilakukan penyusunan tabel distribusi frekuensi pada setiap variabelnya, dimana tabel distribusi frekuensi merupakan proses analisis pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data setiap kategori (Sugiyono, 2009).



Gambar 3.1 Bagan Air Proses Statistik Deskriptif (Sumber: Bahan ajar ITB, Suprayogi)

Pada tahap selanjutnya penyajian distribusi frekuensi untuk setiap variabel pengembangan kawasan minapolitan disajikan dalam bentuk grafik, diagram pie dan radar. Kemudian tahap akhir dari statistic deskriptif melakukan perhitungan ukuran-ukuran untuk mengikhtisarikan karakteristik data.

### 3.6.2. Analisis Penentuan Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat

Analisa faktor bertujuan untuk mendefinisikan struktur suatu data serta menganalisa struktur yang berkaitan antar faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan hasil identifikasi karakteristik wilayah. Analisa faktor yang

mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana variabel yang didapat dari kajian pustaka akan disesuaikan dengan kondisi existing wilayah penelitian serta studi literatur. Setelah itu variabel yang ada kemiripan selanjutnya akan dikelompokkan dan akan membentuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat.

Tahapan selanjutnya dilakukan analisa Delphi dimana metode ini digunakan karena dibutuhkannya suatu persepsi, asumsi, penilaian, atau prasangka kepada pihak-pihak yang sekiranya memiliki keterkaitan dan kepentingan. Teknik Delphi adalah proses iteratif yang dirancang untuk mencapai konsensus di antara sekelompok ahli pada topik tertentu. Teknik Delphi adalah suatu usaha untuk memperoleh consensus group yang dilakukan secara kontinu sehingga diperoleh konvergensi opini (Piercy:1988). Analisa ini sangat berguna dalam situasi di mana tidak ada kriteria standar yang ada untuk evaluasi (Taleai dan Mansuorian, 2008).

Data yang dibutuhkan dalam analisis Delphi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan dimana sebelumnya telah diperoleh melalui analisis deskriptif yang kemudian diolah melalui eksplorasi dan deskriptif variabel penelitian dengan studi literatur. Berikut merupakan tahapan teknik Delphi :

1. Spesifikasi Permasalahan  
Menentukan isu permasalahan yang akan diangkat dan dikomentari oleh para pakar.
2. Menentukan *Stakeholders* Kunci  
Menentukan siapa saja yang menjadi pakar/ahli yang memiliki kejelasan peran atau kontribusi dalam bidang yang dibutuhkan pada penelitian ini.
3. Merumuskan Kriteria Responden  
Menemukan responden sesuai yang diinginkan dengan menggunakan kriteria-kriteria.



4. Merumuskan Kuesioner

Menentukan item-item mana yang akan diajukan dalam kuesioner berupa daftar pertanyaan untuk dipakai pada putaran pertama dan selanjutnya.

5. Wawancara Delphi (Eksplorasi)

Responden wawancara *Delphi* ini meliputi stakeholders yang didapatkan dari teknik *purposive sampling*. Pertanyaan yang ditanyakan pada saat wawancara berasal dari variabel penelitian, dengan pertanyaan apakah variabel tersebut merupakan variabel yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Variabel yang dijadikan pertanyaan merupakan hasil dari sintesa kajian pustaka yang diperoleh dari beberapa literatur. Selain itu, teknik analisis *Delphi* juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan variabel lain yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Dalam mewawancarai responden, peneliti menggunakan panduan diskusi untuk membantu peneliti pada proses wawancara *Delphi*.

6. Analisis Hasil Putaran I *Delphi* (Iterasi)

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- a. Mengumpulkan dan memverifikasi hasil pendapat pakar.
- b. Menginterpretasi kecenderungan pendapat pakar.
- c. Mengeliminasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan lagi untuk putaran berikutnya.
- d. Menyusun pertanyaan untuk kuisisioner selanjutnya dan mengkomunikasikan hasil analisis putaran I kepada pakar.

7. Pengembangan Kuisisioner Selanjutnya (II, III, dan seterusnya)

Teknik analisis *Delphi* akan berlangsung lebih dari 1 putaran. Sebagai kelanjutan dari putaran 1, maka dilakukan penyusunan pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner untuk putaran berikutnya (II, III dan

seterusnya) dengan catatan bahwa hasil putaran sebelumnya dijadikan basis untuk putaran berikutnya. Dalam penggalian pendapat berikutnya, diperlukan pula argumen-argumen dari para pakar. Iterasi terhenti jika sudah terjadi konsensus, namun jika tidak terjadi konsensus maka yang terpenting adalah mengetahui posisi masing-masing pakar terhadap permasalahan yang diajukan. Pada tahap analisis ini akan diperoleh consensus dari para stakeholders terkait variabel apa saja yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat.

Berikut merupakan tahapan teknik Delphi :



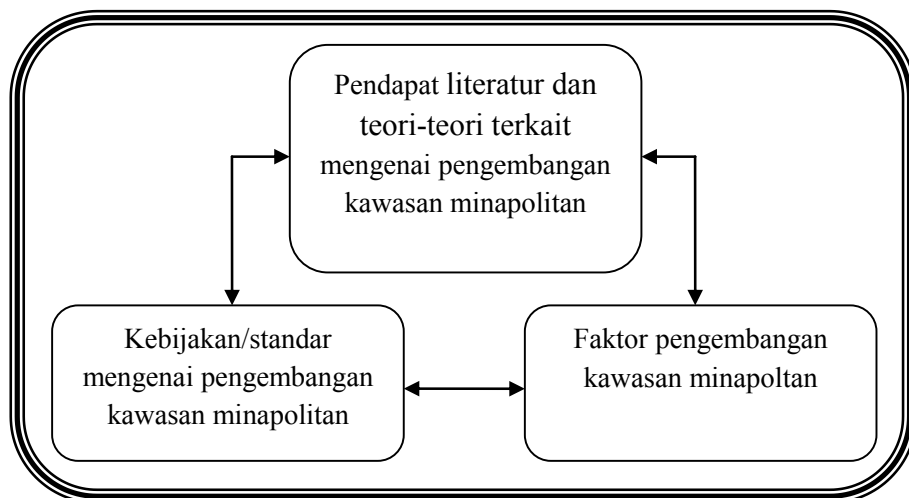
Gambar 3.2 Tahapan Analisis Delphi Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan (Sumber : Penulis, 2015)

### 3.6.3. Analisis Penentuan Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan

Setelah menentukan faktor yang mempengaruhi pengembangan selanjutnya dilakukan teknik analisa triangulasi untuk merumuskan konsep pengembangan kawasan pesisir perkotaan Maumere sebagai kawasan minapolitan ini. Menurut Rianse (2008), analisa triangulasi adalah metode untuk mengatasi masalah sebagai akibat dari kajian yang hanya mengandalkan satu atau beberapa teori, data, atau penelitian saja, sehingga diperlukan disiplin dan pengalaman dari berbagai orang.

Analisa dengan teknik triangulasi berarti mencari data sekaligus menguji kredibilitas data. Analisa triangulasi ini menggunakan 3 sumber data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Dalam penelitian ini, sumber informasi yang akan digunakan adalah :

1. Hasil penelitian berupa faktor pengembangan kawasan minapolitan.
2. Kebijakan/standar mengenai konsep pengembangan kawasan minapolitan yang pernah diterapkan.
3. Pendapat literatur dan teori-teori terkait mengenai konsep pengembangan kawasan minapolitan.



Gambar 3.3 Konsep Analisa Triangulasi (Sumber : Penulis 2016)

Tabel 3.4 Aspek Analisa Triangulasi

No	Aspek (1)	Analisa Triangulasi (2)
1	Sumber Informasi	Pakar yang kompeten, Peneliti sendiri, Wacana empirik
2	Tujuan	Mencari prioritas, intervensi dan jalan keluar dari semua pihak
3	Konflik	Merumuskan bersama-sama untuk mencapai pilihan yang terbaik karena analisa ini berangkat dari teknik partisipatif
4	Alat Analisa	Kuisisioner, wawancara, dan studi literatur dari pengalaman empirik di tempat lain
5	Validasi	Terakomodasinya ketiga sumber informasi menjadi pemecahan masalah yang terbaik menurut peneliti (analisa triangulasi itu sendiri)

Sumber : Sugiyono dalam Syaifudin (2009)

### 3.7 Tahapan Penelitian

Secara umum tahapan dalam penelitian ini akan dilakukan dalam lima tahap. Adapun tahapan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Perumusan Masalah

Tahapan pertama dalam penelitian ini merupakan identifikasi permasalahan yaitu kondisi sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Sikka saat ini masih rendah kontribusinya jika dilihat dari potensi yang ada, menjadikan belum optimalnya fungsi kawasan minapolitan yang telah ditetapkan di Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Setelah itu dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk menentukan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan. Kemudian akan ditentukan sasaran penelitian hingga penentuan batasan pembahasan termasuk ruang lingkup wilayah maupun materi.

## **2. Studi Literatur**

Studi literatur merupakan tahapan kedua dalam penelitian ini. Dalam tahapan akan dikumpulkan segala informasi berupa suatu dokumen, artikel, jurnal, strategi dan konsep, dan hal-hal relevan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Di mana setelah informasi yang dibutuhkan telah terkumpul, akan dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan instrument-instrumen atau variabel-variabel yang berkaitan dengan pengembangan kawasan minapolitan. Hasil dari tahapan ini akan digunakan dari awal penelitian sampai akhir penelitian, hal ini karena dari studi literature didapatkan rumusan variabel-variabel penelitian yang menjadi dasar dalam melakukan analisa.

## **3. Pengumpulan Data**

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Kelengkapan dan keakuratan data akan sangat mempengaruhi proses analisa dan hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data harus memperhatikan instrumen pengumpulan data yang digunakan dan validitas instrumen tersebut. Kebutuhan data disesuaikan dengan analisi dan variabel yang digunakan dalam penelitian.

## **4. Analisis Data**

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah proses analisis data. Dalam penelitian ini, terdapa beberapa tahapan analisis antara lain:

- a) Identifikasi karakteristik kawasan pesisir di Kecamatan Alok Barat
- b) Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat
- c) Menentukan konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan.

## 5. Penarikan Kesimpulan

Hasil dari proses analisa yang telah dilakukan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan permasalahan yang telah ditentukan pada awal penelitian yang kemudian dikaji dalam analisa yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisa kemudian disusun konsep pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan

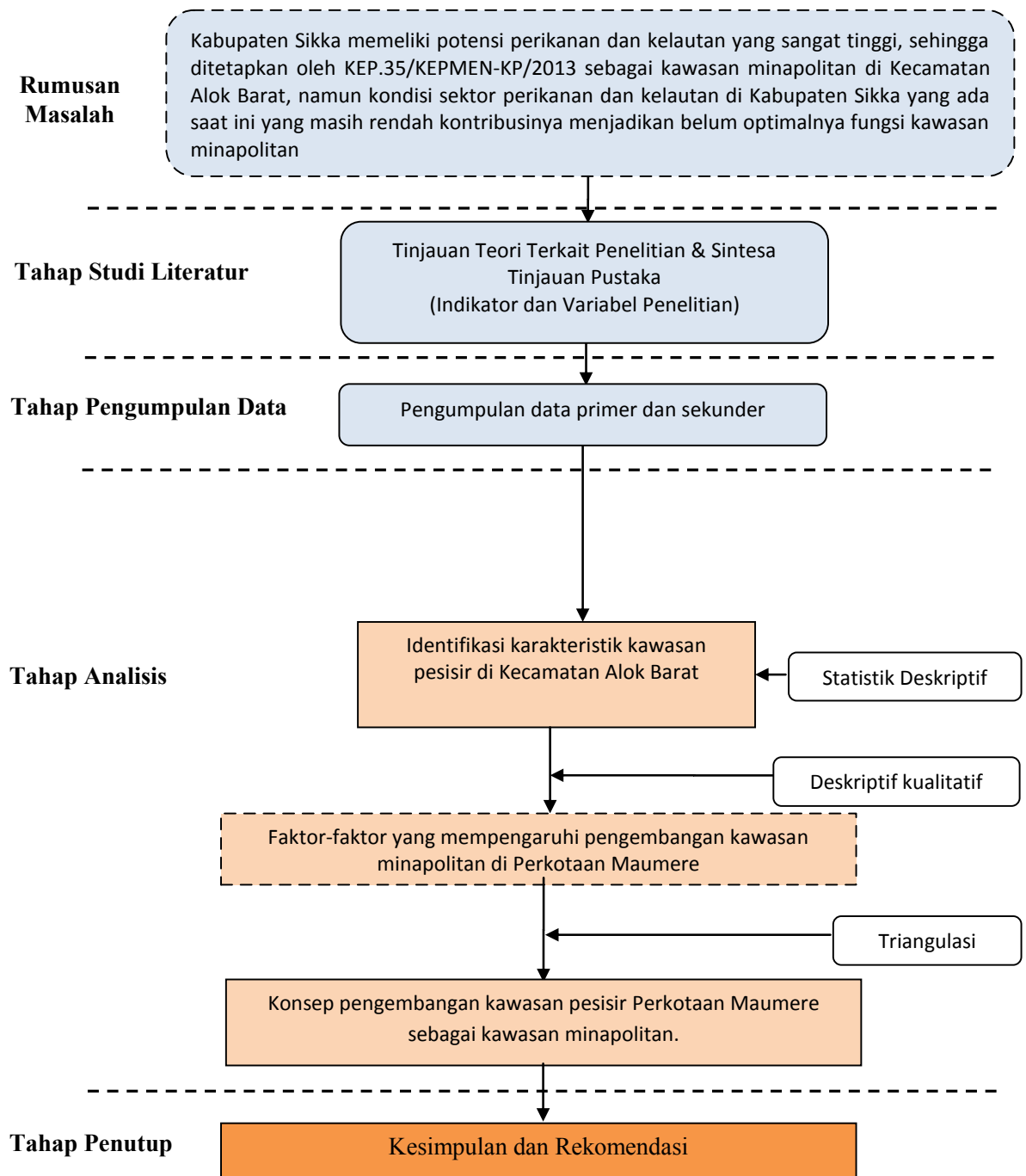
Tabel 3.5 Tahapan Penelitian

No.	Sasaran/Tujuan (1)	Indikator (2)	Teknik Pengambilan Data (3)	Teknik Analisis Data (4)	Output (5)
1	Identifikasi karakteristik kawasan perikanan dan kelautan di Kecamatan Alok Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek sosial budaya: Kemampuan masyarakat pesisir dalam pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>- Potensi ekonomi kawasan di wilayah pesisir yang akan dikembangkan</li> <li>- Aspek fisik lingkungan terkait lahan untuk kebutuhan usaha nelayan di wilayah pesisir.</li> </ul>	Sekunder & Primer	<i>Statistik Deskriptif</i>	Karakteristik kawasan perikanan dan kelautan di Kecamatan Alok Barat
3.	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang mengelola usaha perikanan</li> <li>- Aksesibilitas yang menghubungkan berbagai kegiatan yang ada di kawasan minapolitan</li> <li>- Manajemen Kelembagaan, terkait pengembangan</li> </ul>	Primer	Analisa deskriptif kualitatif dengan validasi <i>Teknik Delphi</i>	Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan sektor perikanan Kecamatan Alok Barat

No.	Sasaran/Tujuan (1)	Indikator (2)	Teknik Pengambilan Data (3)	Teknik Analisis Data (4)	Output (5)
		kawasan minapolitan - Fasilitas pendukung yang terdapat di kawasan minapolitan - Jaringan Infrastruktur yang terdapat di kawasan minapolitan - Teknologi informasi yang digunakan dalam mengelola kawasan minapolitan			
5.	Penentuan konsep pengembangan kawasan pesisir sebagai kawasan minapolitan.	Hasil dari proses analisa pada sasaran keempat	Primer	Analisis Triangulasi	Konsep pengembangan kawasan pesisir Perkotaan Maumere sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Sikka.

Sumber: Perumusan Metode Penelitian, 2016





Gambar 3.5 Kerangka Tahapan Penelitian (Sumber: Penulis, 2016)

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB IV**

### **HASIL & PEMBAHASAN**

Dalam penyusunan bab ini, dijelaskan dan dijabarkan gambaran umum pada wilayah penelitian yaitu Kabupaten Sikka khususnya Kecamatan Alok Barat dan hasil analisa dari tiap sasaran penelitian. Gambaran umum wilayah yang akan dijelaskan meliputi kondisi fisik wilayah, penggunaan lahan, kependudukan, hingga kebijakan terkait sektor perikanan yang ada di lokasi studi.

#### **4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Sikka**

Kabupaten Sikka merupakan salah satu Kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pulau Flores. Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Sikka 7.553,24 Km<sup>2</sup> terdiri atas luas daratan (Pulau Flores) 1731,91 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 5.821,33 Km<sup>2</sup>. Terdapat 18 pulau baik yang didiami ataupun tidak, dimana pulau terbesar adalah Pulau Besar (3.07 persen) dan Pulau Palue (2.37 persen). Sedangkan pulau yang terkecil adalah Pulau kambing (Pulau Pemana Kecil) yang luasnya tidak sampai 1 km<sup>2</sup>. Dari 18 Pulau yang dimiliki pada wilayah administratifnya sebanyak 9 (sembilan) Pulau merupakan pulau yang tidak dihuni dan 9 (sembilan) pulau dihuni.

Ibukota Kabupaten Sikka adalah Maumere yang merupakan juga pusat Kecamatan Alok Timur. Kabupaten Sikka berada pada posisi 8°22' sampai dengan 8° 50' derajat Lintang Selatan dan 121°55'40" sampai 122°41'30" Bujur Timur. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Laut Sawu
- Sebelah Barat : Kabupaten Ende
- Sebelah Timur : Kabupaten Flores Timur

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada Peta 4.1 (Peta Administrasi Kabupaten Sikka).

Kabupaten Sikka memiliki 21 wilayah kecamatan dengan luasnya masing-masing. Luasan per kecamatan dan pembagian wilayah ini dapat dilihat dari tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sikka Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	Desa	Kelurahan
1	Paga	Paga	83	8	0
2	Tanawawo	Wolofeo	80	10	0
3	Mego	Lekebai	111	8	0
4	Lela	Lela	31	9	0
5	Bola	Bola	57	6	0
6	Doreng	Waihawa	30	7	0
7	Mapitara	Hebing	81	4	0
8	Talibura	Talibura	260	12	0
9	Waiblama	Tanarawa	144	6	0
10	Waigete	Waigete	218	9	0
11	Kewapante	Kewapante	24	8	0
12	Hewokloang	Baowunut	18	7	0
13	Kangae	Waipare	38	9	0
14	Nelle	Nelle Urung	15	6	0
15	Koting	Koting D	24	5	0
16	Palue	Uwa	41	8	0
17	Nita	Nita	141	12	0
18	Magepanda	Magepanda	166	5	0
19	Alok	Kota Uneng	15	3	4
20	Alok Barat	Waioti	63	0	4
21	Alok Timur	Wailiti	92	5	5
Jumlah			1.732	147	13

*Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2015*

Dari 21 wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Sikka terdapat 16 kecamatan pantai dengan 66 desa pantai. Kecamatan yang berada di pesisir pantai utara dan menghadap ke laut Flores berjumlah 9 kecamatan dan 7 kecamatan lainnya terletak di pesisir pantai selatan dan menghadap laut Sawu (Profil Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, 2014).

**PROGRAM MAGISTER ARSITEKTUR**  
**BIDANG KEAHLIAN**  
**MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA**  
**JURUSAN ARSITEKTUR FTSP ITS**

**Peta Administrasi**  
**Kabupaten Sikka**

**Keterangan :**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Atteri Primer

Sumber Peta :  
 BPPMD Kabupaten Sikka

**LOKASI PENELITIAN**

Kabupaten Sikka

0 1,25 2,50 5,00 7,50 10,00 Kilometers

N  
E  
S  
W

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

#### 4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Alok Barat

Kecamatan Alok Barat merupakan salah satu Kecamatan pesisir di wilayah Kabupaten Sikka yang terletak di daerah perkotaan Maumere dan menjadi lokasi studi penelitian. Kecamatan Alok Barat merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Sikka yang menjadi pusat kegiatan perikanan dan mendominasi perekonomian di sub sektor perikanan. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu kecamatan yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Kecamatan Alok Barat terbagi dalam 4 wilayah kelurahan yaitu kelurahan Wolomarang, Kelurahan Wailiti, Kelurahan Hewuli dan Kelurahan Wuring (Lihat Tabel 4.2). Luas Kecamatan Alok Barat sebesar 62,75 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nita
- Sebelah Barat : Kecamatan Magepanda
- Sebelah Timur : Kecamatan Alok

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta 4.2 Lokasi Penelitian

Tabel 4.2 Luas Kelurahan dan Persentasi Terhadap Luas Kecamatan Alok Barat

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	% Terhadap Luas Kecamatan
1.	Wolomarang	7	11,16
2.	Wailiti	21	33,47
3.	Hewuli	18,25	29,48
4.	Wuring	16,5	26,29
Jumlah		62,75	100

*Sumber : Alok Barat Dalam Angka 2015*

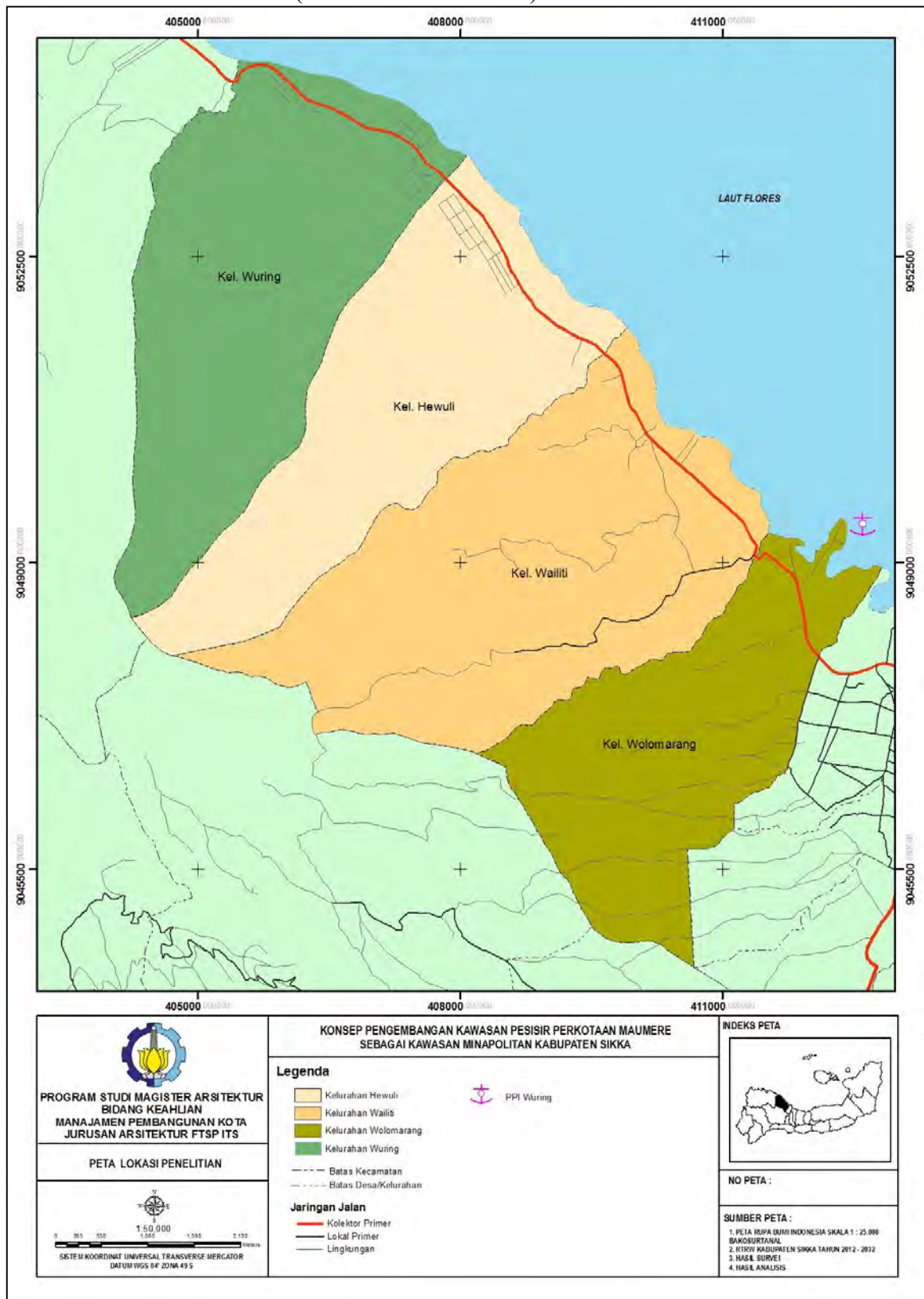
#### **4.1.3. Kondisi Fisik Wilayah Kecamatan Alok Barat**

Kondisi iklim pada wilayah perencanaan secara makro tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim wilayah Kabupaten Sikka pada umumnya dimana wilayah ini beriklim tropis seperti pada daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya. Suhu berkisar antara  $22^{\circ}\text{C}$  -  $33^{\circ}\text{C}$ , suhu maksimum rata-rata  $31,7^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum rata-rata  $24,5^{\circ}\text{C}$  atau rata-rata  $27,6^{\circ}\text{C}$ . kelembaban udara rata-rata 20 knots. Musim panas biasanya berlangsung 7 hingga 8 bulan (April/Mei – Oktober/November) dan musim hujan kurang lebih 4 bulan (November – Desember – Maret – April). Curah hujan pertahun berkisar antara 1000 mm – 1500 mm, dengan jumlah hari hujan sebesar 1-21 hari pertahun (RTRW Kabupaten Sikka, 2012).

Berdasarkan data geologi dan tata lingkungan, maka wilayah Kecamatan Alok Barat dikelompokkan menjadi 5 (lima) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi dataran rendah (kemiringan lereng 0-8 %), menempati daerah yang cukup luas di sepanjang pantai utara dengan luas 2055,22 Ha (32,75 %). Kemudian terus ke arah selatan terdapat satuan morfologi perbukitan landai (kemiringan 8-16 %) dengan luas 1740,25 Ha dan terdapat juga morfologi pegunungan dengan luas 871,30 Ha.



Peta 4.2 Lokasi Penelitian (Kecamatan Alok Barat)



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

#### 4.1.4. Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat

Penggunaan lahan di Kecamatan Alok Barat didominasi oleh lahan tegalan/ladang dengan luas 3089.48 Ha (49,43 %), kemudian diikuti oleh semak belukar 1819 Ha (29,10 %) dan tanah kosong 771,34 Ha (12.34 %). Untuk lahan terbangun di Kecamatan Alok Barat masih sangat kecil jumlahnya diantaranya adalah lahan permukiman dengan luas 136,69 Ha (2,19 %), lahan industri 8,09 Ha (0.13 %) dan lahan tambak 16,27 Ha (0,26 %). Untuk industri yang ada di Kecamatan Alok Barat sebagian besar merupakan industri pengolahan ikan. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kecamatan Alok Barat dapat dilihat pada tabel 4.4 Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat dan Peta 4.4 Penggunaan Lahan.

Tabel 4.3 Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat

Penggunaan Lahan	Luas Penggunaan lahan Desa/Kelurahan (Ha)				Total (Ha)	Persentasi Perkecamatan
	Wuring	Hewuli	Wailiti	Wolomarang		
Hutan	120.48	76.07	16.71	0	213.26	3.41%
Hutan Bakau	0.63	5.97	0	0.84	7.44	0.12%
industri/pegudangan	0	3.29	1.72	3.08	8.09	0.13%
Perkebunan	4.01	48.48	60.27	67.89	180.65	2.89%
Permukiman	31.57	28.87	24.78	51.47	136.69	2.19%
Rumput/Tanah Kosong	319.23	315.01	126.89	10.21	771.34	12.34%
Semak Belukar	401.87	518.53	887.88	10.72	1819	29.10%
Tegalan/Ladang	772.21	803.78	981.75	531.74	3089.48	49.43%
Rawa	0	0	0	7.78	7.78	0.12%
Tambak	0	0	0	16.27	16.27	0.26%
	1650	1800	2100	700	6250	100.00%

*Sumber : Olahan Data Spasial RTRW Kabupaten Sikka, 2012*

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa penggunaan lahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Alok Barat sebagian besar masih berupa lahan kosong/tidak terbangun dan perkebunan. Hal ini tentunya dapat mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan karena lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kawasan-kawasan yang mendukung berbagai kegiatan di sektor perikanan dan kelautan di Kecamatan Alok Barat.

#### 4.1.5. Kependudukan Kecamatan Alok Barat

##### a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Alok Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terdapat 17.062 jiwa penduduk yang tinggal di Kecamatan Alok Barat terus mengalami penambahan penduduk dengan rata-rata pertumbuhan 0.012 penduduk/tahun hingga tahun 2012 berjumlah 17.508 jiwa dan tahun 2014 menjadi 17.889 jiwa.

Jumlah penduduk di Kecamatan Alok Barat terdistribusi di seluruh wilayah kelurahan. Kelurahan Wolomarang menjadi wilayah dengan jumlah persentasi penduduk terbesar yaitu 45,22 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Alok Barat, sedangkan wilayah dengan jumlah persentasi penduduk paling kecil yaitu Kelurahan Hewuli yaitu 9,91 %.

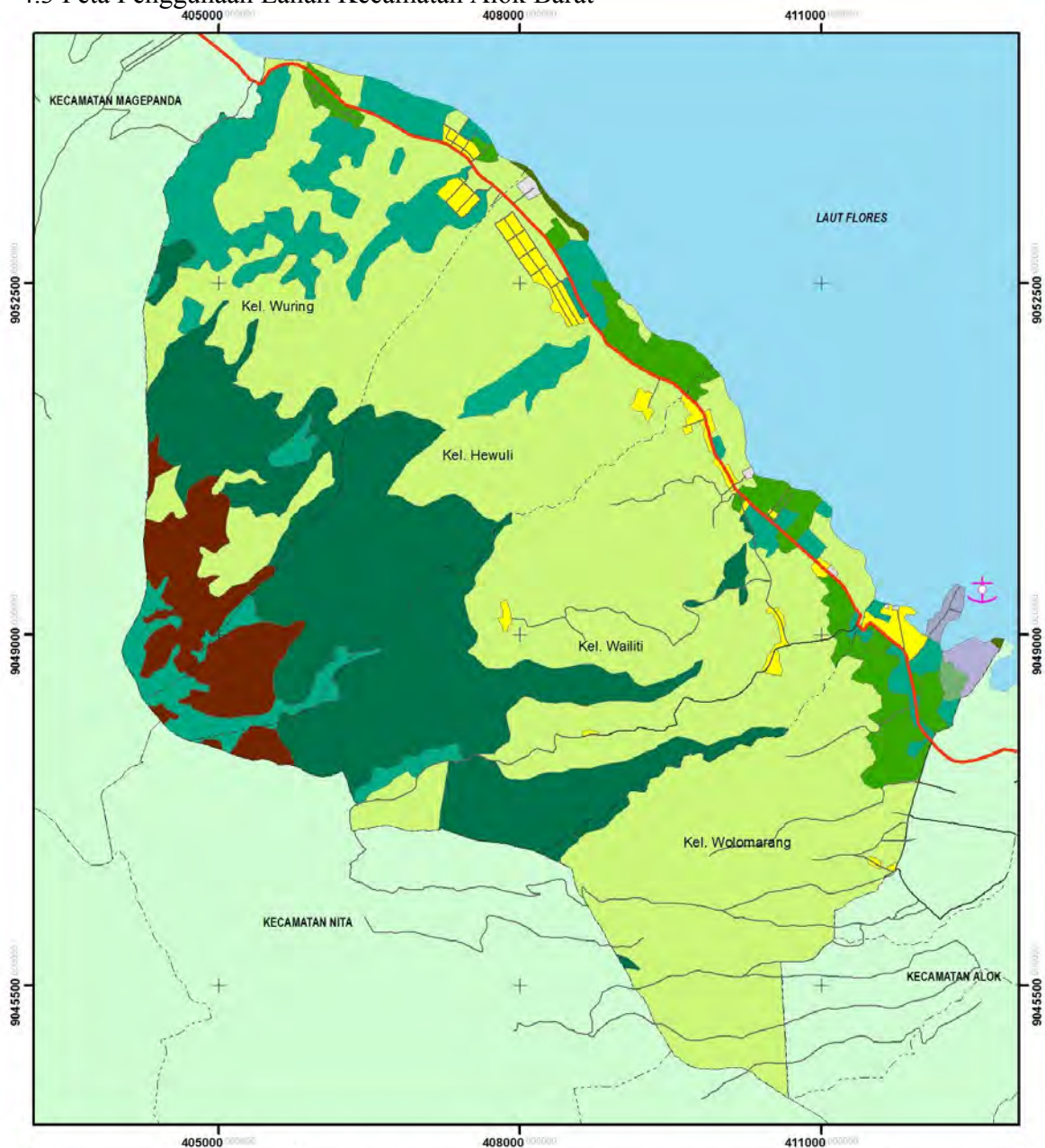
Tabel 4.4 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Alok Barat Tahun 2010-2014

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Rata-rata Pertumbuhan
		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Wolomarang	7552	7703	7852	7977	8089	0,017
2.	Wailiti	2835	2862	2869	2847	2867	0,003
3.	Hewuli	1698	1713	1719	1756	1772	0,011
4.	Wuring	4977	5006	5068	5130	5161	0,009
Jumlah		17062	17248	17508	17710	17889	0,012

*Sumber : Alok Barat Dalam Angka 2011-2015*

Dari data jumlah penduduk yang diperoleh dapat diketahui karakteristik persebaran dan pertumbuhan penduduk yang ada di Kecamatan Alok Barat. Jumlah dan pertumbuhan penduduk berperan penting dalam penentuan kebutuhan fasilitas dan utilitas perkotaan terutama dalam rencana pengembangan kawasan minapolitan. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Alok Barat dapat diprediksi berapa banyak penduduk di wilayah tersebut kedepannya dan kebutuhan fasilitas pendukung.

### 4.3 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

b. Perekonomian Masyarakat setempat

Kondisi perekonomian masyarakat dapat menjadi salah satu gambaran aktifitas sehari-hari penduduk setempat. Kondisi perekonomian masyarakat ini dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat setempat. Dari mata pencaharian ini pasti juga berpengaruh pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi salah satu potensi dalam pengembangan desa wisata di kawasan ini. Pada kawasan ini sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan sebesar 44 %, sebagai petani sebanyak 32% kemudian terdapat masyarakat setempat yang bermatapencaharian sebagai buruh swasta sebanyak 8 %, sebagai PNS sebanyak 7 %, dan sebagai lainnya sebanyak 9 %. Dalam hal ini lainnya yang dimaksud adalah sebagai pedagang seperti usaha rumah makan maupun berjualan barang kebutuhan sehari-hari, sebagai tukang ojek, serta mata pencaharian lainnya.

#### **4.1.6. Perikanan Kecamatan Alok Barat**

Sektor Perikanan yang ada di Kecamatan Alok Barat terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

a. Perikanan Budidaya

Komoditas perikanan budidaya yang ada di Kecamatan Alok Barat adalah rumput laut (*sea weed*) dengan jenis *Kappaphycus alvarezii* atau *Eucheima cottonii*. Rumput laut adalah tanaman air yang hidup di air laut atau air payau, termasuk ke dalam golongan ganggang (alga) yang berupa batang (thallus) saja, tidak berdaun dan tidak berakar. Kabupaten Sikka memiliki potensi pengembangan usaha budidaya rumput laut yang cukup besar. Kabupaten ini memiliki perairan yang terlindungi sepanjang waktu yakni berupa selat di antara pulau-pulau kecil dan pesisir utara pantai Teluk Maumere yang mengandung teluk-teluk kecil yang terlindungi meskipun tidak sepanjang tahun.

Kecamatan Alok Barat merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Teluk Maumere memiliki potensi pengembangan usaha budidaya rumput laut, namun hanya pada musim tertentu. Kelurahan yang memiliki potensi pengembangan rumput laut yaitu Kelurahan Wolomarang, Hewuli dan Wuring. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Potensi Budidaya Rumput Laut Kecamatan Alok Barat Tahun 2012

No. (1)	Kelurahan (2)	Luas lahan potensial (ha) (3)	Luas Efektif (ha) (4)	Produksi (Ton)		Nilai Produksi (Rp 1.000)
				Basah	Kering	
1.	Hewuli	40,8	4,1	396,6	66,1	528.768
2.	Wuring	43	4,3	418,0	69,7	557.280
3.	Wolomarang	101	10,1	981,7	163,6	1.308.960

*Sumber : DKP Kabupaten Sikka 2011*

Dari tabel di atas dapat diketahui Kelurahan Wolomarang memiliki luas lahan potensial maupun luas lahan efektif terbesar di Kecamatan Alok Barat dengan produksi rumput laut basah 981,7 ton dan kering 163,6 ton. Selanjutnya diikuti oleh Kelurahan Wuring dengan luas lahan potensial 43 ha dan lahan efektif 4,3 ha serta produksi basah 418,0 ton dan kering 69,7 ton. Untuk Kabupaten Sikka secara keseluruhan potensi rumput laut yang paling besar terdapat beberapa pulau-pulau kecil di Kecamatan Alok Timur yang memiliki pesisir dan perairan dangkal yang terlindungi oleh karang setiap saat, sehingga bisa dilakukan budidaya rumput laut sepanjang musim.

#### b. Perikanan Tangkap

Kabupaten Sikka memiliki potensi perikanan tangkap yang tinggi. Dengan luas laut sekitar 77,07 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten ini memiliki kandungan ikan yang tinggi, dimana 20% dari produksi ikan berasal dari Kecamatan Alok Barat. Komoditas perikanan tangkap yang terdapat di Kecamatan Alok Barat



mencakup ikan pelagis antara lain tuna, cakalang, tongkol, selar, layang, kembung, teri, tembang dan sebagainya, serta ikan demersial/ikan karang seperti ikan merah, kerapu, kakap, ekor kuning, belanak, bawal, lancam dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Potensi Perikanan Tangkap Kecamatan Alok Barat Tahun 2014

No	Jenis Ikan	Tahun Produksi		
		2011 (ton)	2012 (ton)	2013 (ton)
1	Peperek	45	46	51.78
2	Biji nangka	16	16	27
3	Ikan Merah	66	68	125
4	Kerapu	87	88	116
5	Lencam	10	10	19.74
6	Kakap	50	51	97.95
7	Ekor Kuning	126	127	131
8	Cucut	35	33	32
9	Pari	14	12	11
10	Bawal	26	25	29
11	Alu-alu	23	22	33
12	Layang	1900	1910	1893
13	Selar	2000	2100	1989
14	Kuwe	15	14	26
15	Tatengkek	5	6	11
16	Daun Bambu	14	13	22
17	Sunghir	6	2	15
18	Ikan terbang	110	105	110
19	Balanak	20	18	22
20	Lemuru	150	148	154
21	Julung-julung	140	138	156
22	Teri	475	435	421
23	Japuh	10	10	14
24	Tembang	170	165	161
25	Parang-parang	20	20	25
26	Kembung	175	160	174
27	Tenggiri	65	66	49
28	Layur	50	48	51.77

No	Jenis Ikan	Tahun Produksi		
		2011 (ton)	2012 (ton)	2013 (ton)
29	Tuna	2500	2510	2589
30	Cakalang	2965	2966	2998
31	Anak tongkol/tongkol	400	401	399
32	Gerot-gerot	45	43	51
33	Ikan Lainnya	205	170	198

*Sumber : Sikka Dalam Angka 2014*

Dari data di atas dapat diketahui komoditas yang paling banyak diproduksi adalah ikan cakalang, kemudian ikan tuna, selar, laying dan ikan tongkol. Produksi perikanan tangkap ini rata-rata terus meningkat setiap tahunnya. Untuk ikan cakalang dan tuna yang menjadi komoditas unggulan meningkat dari tahun 2011 hingga 2012. Pada tahun 2011 produksi ikan cakalang sebesar 2965 ton dan terus meningkat hingga tahun 2013 sebesar 2998 ton. Begitu juga dengan ikan tuna, pada tahun 2011 produksi sebesar 2500 ton terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar 2589 ton.

Untuk armada perikanan tangkap yang digunakan mencakup kapal motor, kapal dengan motor temple dan perahu tak bermotor berbagai ukuran (besar, sedang, kecil dan jakung). Perahu tidak bermotor, terutama berukuran kecil dan jakung, mendominasi armada penangkapan ikan di Kecamatan Alok Barat dan Kabupaten Sikka secara keseluruhan. Sedangkan untuk alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan di Kecamatan Alok Barat dan Kabupaten Sikka secara keseluruhan antarlain meliputi jaring insang (gili net), pancing tuna longline, bagan, purse seine mini, pole and line, bubu dan sebagainya.

#### **4.1.7. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Alok Barat**

Sarana dan prasarana adalah salah satu hal dasar yang harus tersedia untuk mendukung kegiatan pada suatu kawasan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai kondisi eksisting pada kawasan ini mengenai kondisi jaringan infrastruktur

dasar meliputi pelayanan jaringan listrik, pelayanan air bersih, aksesibilitas meliputi kondisi jaringan jalan dan fasilitas angkutan umum, serta infrastruktur pendukung lain yang dapat mendukung kegiatan di sub sektor perikanan yang akan dikembangkan.

Listrik dan air merupakan kebutuhan vital bagi setiap rumah tangga dalam aktifitas social dan ekonomi. Pada kawasan ini, seluruh masyarakat telah terlayani dengan listrik dari PLN. Sehingga nantinya jaringan listrik yang sudah terlayani dengan cukup baik ini dapat mendukung berbagai jenis kegiatan yang akan dikembangkan. Begitu juga dengan air bersih, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Alok Barat telah menggunakan sambungan PDAM. Hanya terdapat beberapa keluarga yang masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih.



Gambar 4.1 Gardu Listrik di Kecamatan Alok Barat

Untuk aksesibilitas jalan yang ada di kawasan ini sudah dapat menghubungkan kawasan ini dengan daerah lain, dan menghubungkan antara satu lokasi aktifitas perikanan ke lokasi lainnya. Akan tetapi masih ada beberapa kondisi jalan yang rusak dan memerlukan perbaikan. Jalan yang terdapat di kawasan ini terdiri dari jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan. Untuk jalan kolektor primer

memiliki lebar jalan sebesar 12 meter dan perkerasan jalan berupa aspal. Sedangkan jalan lokal primer merupakan jalan yang menghubungkan antar desa dengan lebar jalan 8 meter dengan perkerasan jalan berupa aspal. Untuk jalan lingkungan dengan perkerasan berupa paving dengan lebar 1,5 meter, jalan lingkungan dengan perkerasan berupa macadam dengan lebar 3 meter, dan jalan lingkungan dengan perkerasan aspal dengan lebar 4 meter. Selain itu terdapat pula jalan lingkungan yang perkerasannya masih berupa tanah.



Gambar 4.2 Jalan Kolektor Primer di Kelurahan Wolomarang



Gambar 4.3 Jalan Lingkungan di Kelurahan Hewuli

Angkutan umum yang melalui Kecamatan Alok Barat hanya terdapat 1 trayek saja dan dengan kondisi yang baik. Namun angkutan umum yang ada ini jarang dimanfaatkan. Selama ini penduduk di Kecamatan Alok Barat lebih banyak menggunakan angkutan pribadi.

Khusus infrastruktur (prasarana) perikanan tangkap yang ada di Kecamatan Alok Barat antara lain mencakup Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Wuring di Kelurahan Wolomarang, stasiun pengisian bahan bakar (solar), pabrik es (cold storage) di PPI Wuring, Pabrik pengolahan dan pengemasan ikan di Kelurahan Hewuli, Wailiti dan Wolomarang. PPI Wuring merupakan pusat bongkar muat hasil perikanan yang memiliki aktifitas usaha relative tinggi di Kabupaten Sikka. Hal ini didukung oleh adanya perkampungan nelayan Wuring yang merupakan perkampungan nelayan terbesar di Kabupaten Sikka menjadikan aktifitas/kegiatan perikanan di PPI Wuring ini sangat tinggi.

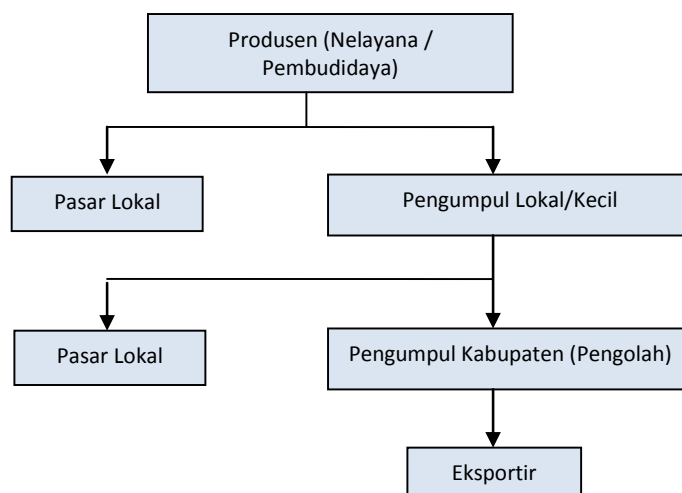


Gambar 4.4 Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Wuring Kelurahan Wolomarang

#### **4.1.8. Alur Rantai Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kecamatan Alok Barat**

Alur pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada di Kecamatan Alok Barat diawali dari produsen dalam hal ini nelayan maupun pembudidaya. Ikan-ikan yang ditangkap para nelayan didaratkan di PPI Wuring kemudian dijual ke pedagang pengumpul lokal (kecil) dan juga ke masyarakat umum (Pasar lokal). Pedagang

pengumpul kecil ini biasanya menggunakan mobil pick up dan membeli ikan langsung ke PPI Wuring. Untuk penjualan kepada masyarakat (pasar lokal) langsung dilakukan di PPI Wuring, dan ada juga yang dibawa ke Pasar Alok di Kota Maumere, hal ini dikarenakan belum adanya Pasar Ikan di Kecamatan Alok Barat. Begitu pula dengan para pembudidaya ikan, hasil mentah budidaya dijual kepada pedagang pengumpul lokal, yang kemudian oleh pedagang ini dikumpulkan hingga mencapai volume yang ekonomis untuk dijual ke pedagang pengumpul kabupaten (menengah) / Pengolah yang berada di sekitar perkotaan Maumere. Pedagang pengumpul Kabupaten ini juga melakukan proses pengolahan ikan berupa pembekuan, pengemasan maupun pengasapan. Hasil olahan oleh pengumpul kabupaten kemudian dikirim ke eksportir yang berlokasi di Surabaya dan Makasar dengan menggunakan kapal penyeberangan. Untuk lebih jelas mengenai alur rantai tataniaga sumberdaya perikanan di Kecamatan Alok Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.5 Bagan Alur Rantai Tataniaga Sumberdaya Perikanan  
Kecamatan Alok Barat

#### **4.1.9. Kebijakan Terkait Sektor Perikanan di Kecamatan Alok Barat**

Kebijakan terkait sektor perikanan di Kecamatan Alok Barat meliputi kebijakan dari tingkat Kementerian hingga kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. Di tingkat Kementerian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, menyebutkan Kecamatan Alok Barat di Kabupaten Sikka sebagai salah satu kawasan Minapolitan dari 197 Kawasan Minapolitan di 33 Provinsi di Indonesia yang telah ditetapkan.

Di tingkat daerah Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok Barat ditetapkan sebagai salah satu kawasan peruntukan perikanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sikka tahun 2009-2013 menetapkan beberapa program diantaranya yaitu program pengembangan budidaya perikanan melalui pendampingan kegiatan minapolitan. Dengan adanya arahan kebijakan ini tentunya sangat mendukung adanya rencana pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan. Kebijakan-kebijakan ini dapat menjadi landasan hukum pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat.

### **4.2 Analisa Dan Pembahasan**

#### **4.2.1 Analisis Karakteristik Kawasan Pesisir di Kecamatan Alok Barat**

Karakteristik kawasan pesisir adalah ciri-ciri khusus suatu wilayah yang terletak pada kawasan pesisir. Untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan pesisir di Kecamatan Alok Barat ini dianalisis menggunakan analisa statistik deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2009). Adapun variabel yang digunakan dalam tahapan identifikasi ini adalah tingkat pendidikan masyarakat pesisir, ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan, tingkat pendapatan dan penghasilan,

kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, ketersediaan lahan usaha tani (budidaya dan tangkap), dan ketersediaan lahan industri (pengolahan).

#### 4.2.1.1 Karakteristik Tingkat Pendidikan Masyarakat Pesisir Kecamatan Alok Barat

Tingkat pendidikan masyarakat pesisir merupakan salah satu penilaian dari aspek sosial budaya masyarakat pesisir. Tingkatan pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kemampuan masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendidikan tertinggi masyarakat di Kecamatan Alok Barat adalah jenjang Diploma/Sarjana, tetapi masih terdapat juga masyarakat yang tidak mengecap pendidikan sama sekali atau tidak sekolah. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Diagram 4.1 dan Tabel 4.7 pada output deskripsi statistik terkait objek penelitian pada variabel tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Alok Barat dibawah ini.

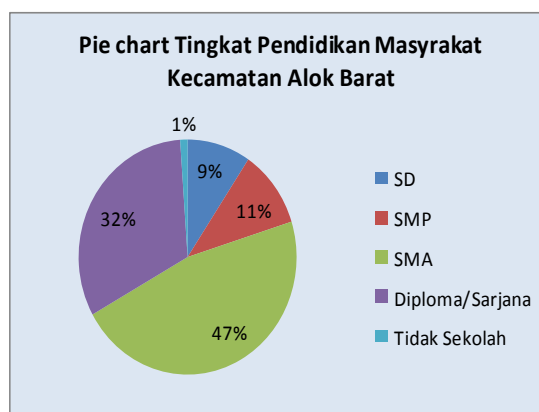


Diagram 4.1 Karakteristik Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Alok Barat

Tabel 4.7 Output Deskriptif Statistik Karakteristik Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Alok Barat

	N	Minimum	Maximum	Sum	Std. Deviation
Jumlah Penduduk	5	89.00	10168.00	17261.00	4344.29496
Valid N (listwise)	5				

Sumber : Hasil analisis Data KDA Alok Barat 2014 menggunakan IBM SPSS Statistic 22



Dari data tabel output statistic deskriptif diatas dapat dilihat pada nilai maximum, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Alok Barat adalah lulusan SMA dengan jumlah 10.168 orang (47 %) dan lulusan Diploma/Sarjana (32 %). Sedangkan sisanya masih berpendidikan rendah yaitu lulusan SD, SMP dan tidak sekolah. Untuk lulusan golongan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dalam hal ini yang tidak sekolah, lulusan SD dan lulusan SMP rata-rata memiliki pekerjaan sebagai nelayan.

Menurut KKP (2010) salah satu prinsip minapolitan adalah berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Menurut Warsito (2002) tolak ukur sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas mereka.

Sesuai dengan pernyataan Warsito (2002) bahwa tolak ukur sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas mereka dan prinsip dari minapolitan sendiri adalah pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas sumberdaya manusia, sehingga sangat dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kualitas SDM yang baik. Melihat kondisi eksisting yang ada saat ini tentunya masih dibutuhkan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung rencana pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sikka.

#### **4.2.1.2 Karakteristik Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat**

Ketersediaan tenaga kerja di Kecamatan Alok Barat dilihat berdasarkan jumlah rumah tangga perikanan baik itu nelayan maupun tenaga kerja/buruh sektor pengolahan yang ada di tiap cluster wilayah Kelurahan. Karakteristik tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan Kecamatan Alok Barat dapat dilihat pada Diagram 4.2 dan Tabel 4.8 pada output deskripsi statistik terkait objek penelitian pada variabel

ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan Kecamatan Alok Barat dibawah ini.

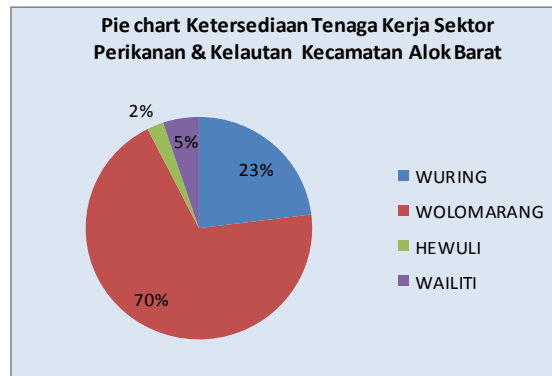


Diagram 4.2 Karakteristik Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat

Tabel 4.8 Output Deskriptif Statistik Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Jumlah_RTP	4	25.00	733.00	1055.00	263.7500	327.42569
Valid N (listwise)	4					

Sumber : Hasil analisis data DKP Kabupaten Sikka tahun 2014 menggunakan IBM SPSS Statistic 22

Dari data diperoleh bahwa jumlah ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan paling besar berasal dari Kelurahan Wolomarang dengan jumlah rumah tangga produksi 733 RTP (70 %) kemudian diikuti oleh Kelurahan Wuring yang menyumbangkan 23 % tenaga kerja. Dari hasil observasi diketahui di Kelurahan Wolomarang dan Kelurahan Wuring terdapat perkampungan nelayan dan beberapa industri pengolahan perikanan serta terdapat pelabuhan pendaratan ikan, hal ini mendukung hasil analisis yang diperoleh dimana kedua Kelurahan ini menyumbangkan tenaga kerja terbanyak di Kecamatan Alok Barat.

Sesuai dengan pernyataan Sunoto (2013) yang menyatakan bahwa penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa fasilitas sentra produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, fasilitas pengolahan ikan ataupun kombinasi kedua hal tersebut dimana dalam semua kegiatan tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup. Dengan pertimbangan pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sikka tentunya akan diikuti dengan peningkatan jumlah industri perikanan yang ada baik di tahap produksi, pengolahan maupun pemasaran yang tentunya ketersediaan tenaga kerja yang hanya berjumlah 1055 rumah tangga produksi dianggap belum cukup oleh karena itu dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih besar.

#### **4.2.1.3 Karakteristik Tingkat Pendapatan/Penghasilan Tenaga Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat**

Karakteristik tingkat pendapatan/penghasilan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan Kecamatan Alok Barat dibagi dalam empat golongan yaitu nelayan penuh, buruh nelayan, karyawan industri pengolahan, dan buruh industri. Nelayan penuh merupakan penduduk yang memiliki kapal sendiri dan profesi utamanya adalah nelayan, sedangkan buruh nelayan merupakan tenaga yang dipekerjakan nelayan penuh untuk membantu proses penangkapan hingga penjualan hasil tangkap. Karyawan industri pengolahan, merupakan tenaga kerja sektor pengolahan perikanan di bidang manajemen industri yang mengatur proses industri hingga pengiriman untuk dipasarkan, sedangkan buruh industri merupakan tenaga kasar yang mengerjakan proses pengolahan ikan. Penggolongan ini diperoleh berdasarkan hasil observasi dimana terdapat perbedaan pendapatan dari tiap golongan ini. Secara umum tingkat pendapatan tenaga kerja sektor perikanan tidak menentu setiap bulannya, tergantung hasil tangkap/produksi. Data yang diperoleh pada analisis ini merupakan angka rata-rata pendapatan pada setiap golongan tenaga kerja.

Untuk lebih detail mengenai karakteristik tingkat pendapatan dapat dilihat pada Diagram 4.3 dan Tabel 4.9 pada output deskripsi statistik terkait objek

penelitian pada variabel tingkat pendapatan/penghasilan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan Kecamatan Alok Barat dibawah ini.



Diagram 4.3 Karakteristik Tingkat Pendapatan/Penghasilan Tenaga Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat

Tabel 4.9 Output Deskriptif Statistik Tingkat Pendapatan/Penghasilan Tenaga Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan Kecamatan Alok Barat

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat_Pendapatan	4	1500000.00	4000000.00	2575000.0000	1150000.00000
Valid N (listwise)	4				

*Sumber : Hasil analisis data observasi menggunakan IBM SPSS Statistic 22*

Dari hasil analisis data yang diperoleh dapat dilihat rata-rata pendapatan nelayan penuh adalah Rp 4.000.000/bulan; sedangkan untuk buruh nelayan memiliki rata-rata pendapatan Rp 1.500.000/bulan. Untuk karyawan industri pengolahan rata-rata tingkat pendapatan Rp 3.000.000/bulan, sedangkan buruh industri berkisar antara Rp 1.800.000/bulan.

Menurut KKP (2010) salah satu sasaran pelaksanaan minapolitan adalah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, peningkatan kemampuan ekonomi ini dapat dilihat dari tingkat pendapat

yang ada. Dari data yang diperoleh diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan tenaga kerja sektor perikanan tidak menentu setiap bulannya, tergantung hasil tangkap/produksi dan masih tergolong kecil. Oleh karena itu dengan adanya rencana pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sikka tentunya diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat terutama dalam hal tingkat pendapatan.

#### 4.2.1.4 Karakteristik Kontribusi Sektor Perikanan Kecamatan Alok Barat terhadap PDRB

Peranan sub sektor perikanan dalam pembentukan PDRB kabupaten Sikka tahun 2011 sebesar 8,05 %, sedikit mengalami penurunan setelah tahun sebelumnya sebesar 8,08 %. Kegiatan perikanan di Kabupaten Sikka umumnya dilaksanakan adalah perikanan laut, karena daerah ini memiliki laut yang sangat luas serta potensi sumber daya yang beraneka ragam. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Diagram 4.4 dan Tabel 4.10 pada output deskripsi statistik terkait objek penelitian pada variabel tingkat kontribusi sektor perikanan dan kelautan Kecamatan Alok Barat terhadap PDRB dibawah ini.

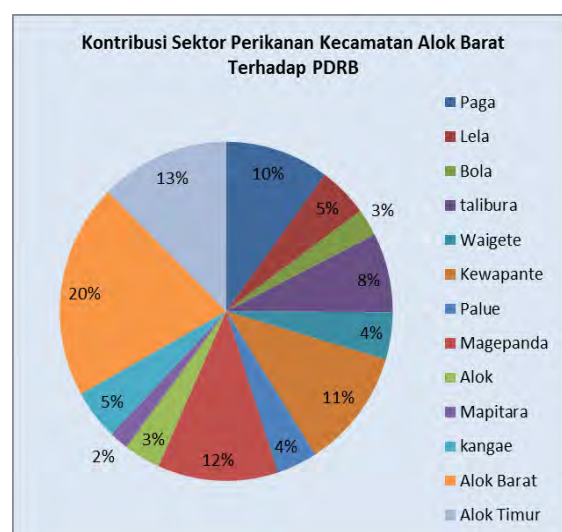


Diagram 4.4 Karakteristik Kontribusi Sektor Perikanan Kecamatan Alok Barat Terhadap PDRB

Tabel 4.10 Output Deskriptif Statistik Kontribusi Sektor Perikanan Kecamatan Alok Barat Terhadap PDRB

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kontribusi_Perikanan	13	1.85	20.55	100.00	7.6923	5.34274
Valid N (listwise)	13					

*Sumber : Hasil analisis data DKP Kabupaten Sikka 2009 menggunakan IBM SPSS  
Statistic 22*

Dari kontribusi perikanan terhadap PDRB dapat diketahui bahwa Kecamatan Alok Barat merupakan Kecamatan yang mendominasi perekonomian. Di Kecamatan ini kontribusi sub sektor perikanannya mencapai lebih dari 20 % pada tahun 2008. Sementara kecamatan yang sub sektor perikanannya berkontribusi lebih dari 10% adalah Kecamatan Paga, Kewapante, Magepanda dan Alok Timur.

Menurut Soenarno (2003) dalam penentuan kawasan minapolitan terlebih dahulu dilakukan identifikasi potensi dan masalah untuk mengetahui kondisi dan potensi lokal (komoditas unggulan). Potensi lokal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap daerah. Dari data yang diperoleh kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sikka cukup besar yaitu sekitar 8 % dimana 20% nya berasal dari Kecamatan Alok Barat. Namun kontribusi ini dianggap masih rendah karena nilai yang diperoleh hanya dari penjualan ikan mentah dan olahan setengah jadi. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya pengembangan kawasan minapolitan dapat meningkatkan usaha industri pengolahan maupun pemasaran ikan yang dapat meningkatkan nilai jual perikanan di Kabupaten Sikka.

#### **4.2.1.5 Karakteristik Ketersediaan Lahan Usaha Tani/Produksi (Budidaya/Tangkap) Kecamatan Alok Barat**

Ketersediaan lahan usaha tani/produksi (budidaya/tangkap) di Kecamatan Alok Barat dilihat dari luas daerah tangkap maupun budidaya yang ada. Karakteristik ketersediaan lahan produksi dapat dilihat pada Diagram 4.5 dan Tabel 4.11 pada

output deskripsi statistik terkait objek penelitian pada variabel ketersediaan lahan produksi perikanan Kecamatan Alok Barat dibawah ini.



Diagram 4.5 Karakteristik Ketersediaan Lahan Produksi Perikanan Kecamatan Alok Barat

Tabel 4.11 Output Deskriptif Statistik Ketersediaan Lahan Produksi Perikanan Kecamatan Alok Barat

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Luas_Lahan_Produksi	4	861.37	2347.37	7084.52	1771.1300	645.61376
Valid N (listwise)	4					

Sumber : Hasil analisis data spasial RTRW Kabupaten Sikka 2012 menggunakan IBM SPSS Statistic 22

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa luas lahan produksi paling besar berada di Kelurahan Hewuli dengan luas wilayah tangkap 2.347,37 Ha (33 %), diikuti oleh Kelurahan Wuring (29 %), Kelurahan Wailiti (26 %) dan yang paling kecil berada di Kelurahan Wolomarang dengan luas wilayah tangkap 861,37 Ha (12 %). Walaupun memiliki luas produksi untuk perikanan tangkap terkecil, untuk produksi perikanan budidaya Kelurahan Wolomarang menjadi satu-satunya wilayah di Kecamatan Alok Barat yang memiliki lahan tambak untuk perikanan budidaya.

Walaupun demikian stok perikanan yang ada di kecamatan bukan hanya berasal dari Alok Barat tapi juga berasal dari sentra produksi perikanan lainnya di Kabupaten Sikka.

Sentra produksi perikanan ini ditandai dengan lokasi tangkap yang ada di hampir setiap kecamatan pesisir di Kabupaten Sikka, namun semua stok ikan tersebut didaratkan ke Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Maumere di Kecamatan Alok dan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Wuring di Kecamatan Alok Barat tergantung kondisi ombak dan angin dari masing-masing PPI. Sentra produksi perikanan yang biasanya mendaratkan ikannya di PPI Wuring (Alok Barat) yaitu berasal dari Nangahure, Wuring, Kampung Buton, Kampung Beru, Magepanda, Pemanu.

Menurut KKP (2010) dalam pengembangan minapolitan harus dilakukan pendekatan sentra produksi, dimana minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat dan menurut Sunoto (2013) sentra-sentra produksi tersebut akan menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dipasarkan dan mempengaruhi sistem perekonomian yang ada di kawasan minapolitan itu sendiri. Sehingga ketersediaan lahan sentra produksi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kawasan minapolitan.

#### **4.2.1.6 Karakteristik Ketersediaan Lahan Industri Kecamatan Alok Barat**

Kegiatan industri yang ada di Kecamatan Alok Barat terdiri atas industri pengolahan perikanan dan industri pengolahan hasil pertanian. Dari hasil observasi hasil pengolahan dari kegiatan industri masih berupa bahan setengah jadi yang akan dijual ke Surabaya dan ada juga yang diekspor ke Jepang maupun Korea Selatan. Untuk lahan industri eksisting yang ada di Kecamatan Alok Barat saat ini hanya terdapat di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Wolomarang, Wailiti dan Hewuli, sedangkan di Kelurahan Wuring tidak terdapat lahan yang digunakan untuk kegiatan industri. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Diagram 4.7 dan Tabel 4.13 pada



output deskripsi statistik terkait objek penelitian pada variabel ketersediaan lahan permukiman Kecamatan Alok Barat dibawah ini.



Diagram 4.6 Karakteristik Ketersediaan Lahan Industri Kecamatan Alok Barat

Tabel 4.12 Output Deskriptif Statistik Ketersediaan Lahan Industri Kecamatan Alok Barat

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Luas_Lahan_Industri	4	.00	3.29	8.09	2.0225	1.51733
Valid N (listwise)	4					

Sumber : Hasil analisis data spasial RTRW Kabupaten Sikka 2012 menggunakan IBM SPSS  
Statistic 22

Luas lahan industri terbesar terdapat di Kelurahan Hewuli dengan luas 3,29 Ha atau 41 % dari total lahan industri yang ada di Kecamatan Alok Barat. Di kelurahan Hewuli ini terdapat industri pengolahan ikan milik PT. Shita Ratian yang bergerak di bidang pengemasan ikan dan pengasapan. Selanjutnya ada dua industri pengolahan ikan di Kelurahan Wolomarang dengan luas lahan industri 3,08 Ha atau 38 % dari total luas lahan industri Kecamatan Alok Barat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Alok Barat terdapat empat sentra industri pengolahan ikan dengan total luas lahan industri 8,09 Ha dan kemampuan menyerap tenaga kerja 20-55 orang. Keempat sentra industri pengolahan ikan ini terletak di Kelurahan Wolomarang, Wailiti dan Hewuli. Industri yang ada meliputi industri yang bergerak di bidang pengemasan ikan, pengasapan, pengeringan, pengasinan, dan pemindangan. Hasil industri dipasarkan ke daerah Jawa dan juga ada yang diekspor ke Jepang dan Korea.

Namun sesuai dengan penjelasan Dahuri (2001) bahwa pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya pengolahan hasil perikanan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen sampai produk siap dipasarkan maka dibutuhkan lebih banyak lagi fasilitas sentra pengolahan ikan dengan konsep pengolahan yang lebih baik sehingga ikan yang dipasarkan bukan hanya menjadi bahan setengah jadi tapi juga merupakan produk jadi yang siap dipasarkan dengan nilai jual yang cukup tinggi.

#### *Kesimpulan analisa karakteristik kawasan pesisir di Kecamatan Alok Barat*

Dari hasil analisa karakteristik kawasan pesisir di Kecamatan Alok Barat dapat diketahui bahwa :

✓ *Karakteristik tingkat pendidikan masyarakat pesisir Kecamatan Alok Barat*

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Alok Barat adalah lulusan SMA dengan jumlah 10.168 orang (47 %) dan lulusan Diploma/Sarjana (32 %). Sedangkan sisanya masih berpendidikan rendah yaitu lulusan SD, SMP dan tidak sekolah. Untuk lulusan golongan yang memiliki tingkat pendidikan rendah dalam hal ini yang tidak sekolah, lulusan SD dan lulusan SMP rata-rata memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan tenaga kerja di sektor industri pengolahan memiliki tingkat pendidikan SMA hingga Sarjana. Sehingga dapat diketahui bahwa karakteristik masyarakat pesisir khususnya yang bermatapencaharian

sebagai nelayan masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Melihat kondisi eksisting yang ada saat ini tentunya masih dibutuhkan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung rencana pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sikka.

✓ *Karakteristik ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan Kecamatan Alok Barat*

Ketersediaan tenaga kerja di Kecamatan Alok Barat dilihat berdasarkan jumlah rumah tangga perikanan baik itu nelayan maupun tenaga kerja/buruh sektor pengolahan yang ada di tiap cluster wilayah Kelurahan. Jumlah total rumah tangga produksi yang ada yaitu 1055 rtp, sebagian besar berasal dari Kelurahan Wolomarang dengan jumlah rumah tangga produksi 733 RTP (70 %). Dengan pertimbangan pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sikka diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan jumlah industri perikanan yang ada baik di tahap produksi, pengolahan maupun pemasaran yang tentunya membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih besar.

✓ *Karakteristik tingkat pendapatan sektor perikanan dan kelautan Kecamatan Alok Barat*

Tingkat pendapatan tenaga kerja sektor perikanan tidak menentu setiap bulannya, tergantung hasil tangkap/produksi dan masih tergolong kecil. rata-rata pendapatan nelayan penuh adalah Rp 4.000.000/bulan; buruh nelayan memiliki rata-rata pendapatan Rp 1.500.000/bulan. Untuk karyawan industri pengolahan rata-rata tingkat pendapatan Rp 3.000.000/bulan, sedangkan buruh industri berkisar antara Rp 1.800.000/bulan. Dengan adanya rencana pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sikka diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat terutama dalam hal tingkat pendapatan.

✓ *Karakteristik kontribusi sektor perikanan dan kelautan Kecamatan Alok Barat terhadap PDRB*

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sikka yaitu sekitar 8 % dimana 20% nya berasal dari Kecamatan Alok Barat. Kontribusi ini masih rendah karena nilai yang diperoleh hanya dari penjualan ikan mentah dan olahan setengah jadi. Diharapkan dengan adanya pengembangan kawasan minapolitan dapat meningkatkan usaha industri pengolahan maupun pemasaran ikan yang dapat meningkatkan nilai jual perikanan di Kabupaten Sikka.

✓ *Karakteristik ketersediaan lahan usaha tani/produksi perikanan Kecamatan Alok Barat*

Luas lahan produksi perikanan yang ada di Kecamatan Alok Barat adalah 7084.52 Ha, dimana Kelurahan Hewuli memiliki luas lahan produksi terbesar yaitu 2347.37 Ha (33%). Stok perikanan yang ada di kecamatan bukan hanya berasal dari Alok Barat tapi juga berasal dari sentra produksi perikanan lainnya di Kabupaten Sikka. Sentra produksi perikanan ini ditandai dengan lokasi tangkap yang ada di hampir setiap kecamatan pesisir di Kabupaten Sikka. Sentra produksi perikanan yang biasanya mendaratkan ikannya di PPI Wuring (Alok Barat) yaitu berasal dari Nangahure, Wuring, Kampung Buton, Kampung Beru, Magepanda, Pema.ana.

✓ *Karakteristik ketersediaan lahan industri perikanan Kecamatan Alok Barat*

Di Kecamatan Alok Barat terdapat empat sentra industri pengolahan ikan dengan total luas lahan industri 8,09 Ha dan kemampuan menyerap tenaga kerja 20-55 orang. Keempat sentra industri pengolahan ikan ini terletak di Kelurahan Wolomarang, Wailiti dan Hewuli. Industri yang ada meliputi industri yang bergerak di bidang pengemasan ikan, pengasapan, pengeringan, pengasinan, dan pemindangan. Hasil industri dipasarkan ke daerah Jawa dan juga ada yang diekspor ke Jepang dan Korea. Untuk pengembangan minapolitan dibutuhkan lebih banyak lagi fasilitas sentra pengolahan ikan dengan konsep pengolahan yang lebih baik sehingga ikan yang dipasarkan bukan hanya menjadi bahan

setengah jadi tapi juga merupakan produk jadi yang siap dipasarkan dengan nilai jual yang cukup tinggi.

#### **4.2.2 Analisa Penentuan Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Alok Barat**

Pada analisis penentuan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat ini menggunakan analisa deskriptif yang kemudian hasil dari analisa deskriptif tersebut diperkuat lagi dengan analisa Delphi. Analisa deskriptif dilakukan untuk mendapatkan faktor yang kemudian akan dikunci terhadap stakeholder terkait. Pada analisa karakteristik kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat yang telah dilakukan sebelumnya juga ikut menjadi masukan bagi penentuan faktor pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat ini.

##### *Analisa Deskriptif*

Analisa deskriptif yang dilakukan adalah berupa *theoritical deskriptive*, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

**Tabel 4.13 Analisa Deskriptif Penentuan Faktor Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Alok Barat**

<b>Variabel</b>	<b>Karakteristik kawasan</b>	<b>Tinjauan Literatur</b>	<b>Pembahasan</b>
Kondisi jalan yang menghubungkan kegiatan produksi terhadap aktifitas terkait lainnya	Karakteristik yang ada meliputi jalan kolektor primer memiliki lebar jalan sebesar 12 meter dan perkerasan jalan berupa aspal dengan kondisi baik; jalan lokal primer merupakan jalan yang menghubungkan antar desa dengan lebar jalan 8 meter dengan perkerasan jalan berupa aspal namun masih banyak terdapat jalan yang rusak. Untuk jalan lingkungan dengan perkerasan berupa paving dengan lebar 1,5 meter, jalan lingkungan dengan perkerasan berupa macadam dengan lebar 3 meter, dan jalan lingkungan dengan perkerasan aspal dengan lebar 4 meter.	Menurut Gufron (2008), lokasi kegiatan perikanan harus dijangkau dengan mudah dari berbagai arah agar produksi, pemasaran dan keperluan kebutuhan lainnya dapat berjalan lancar, untuk dapat dijangkau dengan mudah dibutuhkan kondisi jalan yang baik.	Saat ini akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Alok Barat dengan wilayah lainnya sudah cukup lancar, terdapat jalan kolektor primer yang menghubungkan Kecamatan ini dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Sikka dengan kondisi permukaan jalan baik. Tetapi untuk jalan lokal primer dan beberapa jalan lingkungan memiliki kondisi yang buruk. Sesuai dengan pernyataan Gufron (2008) bahwa lokasi kegiatan perikanan harus dijangkau dengan mudah dari berbagai arah agar produksi, pemasaran dan keperluan kebutuhan lainnya dapat berjalan lancar, untuk dapat dijangkau dengan mudah dibutuhkan kondisi jalan yang baik maka beberapa titik lokasi jalan primer dan jalan lingkungan tersebut harus ditingkatkan kondisi jalannya. Dilihat dari kondisi eksisting dan tinjauan literatur yang ada maka dibutuhkan faktor <b>Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat</b>
Sarana transportasi yang menghubungkan kegiatan produksi terhadap aktifitas terkait lainnya	Kecamatan Alok Barat saat ini memiliki aksesibilitas yang cukup lancar karena dapat diakses oleh berbagai jenis kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil hingga truck besar. Untuk angkutan umum yang melalui Kecamatan Alok Barat	Menurut Gufron (2008) lokasi kawasan minapolitan harus memiliki sarana transportasi yang telah memadai guna memperlancar kegiatan produksi maupun pemasaran perikanan.	Kondisi sarana transportasi yang menghubungkan Kecamatan Alok Barat dengan wilayah lainnya di Kabupaten Sikka sudah cukup baik saat ini, karena dapat diakses oleh berbagai jenis kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil hingga truck besar. Untuk kegiatan perikanan angkutan yang digunakan adalah mobil pick-up. Sesuai dengan pernyataan Gufron (2008) bahwa lokasi kawasan minapolitan harus

Variabel	Karakteristik kawasan	Tinjauan Literatur	Pembahasan
	hanya terdapat 1 trayek saja dan dengan kondisi yang baik. Namun angkutan umum yang ada ini jarang dimanfaatkan. Selama ini penduduk di Kecamatan Alok Barat lebih banyak menggunakan angkutan pribadi. Untuk kegiatan angkutan perikanan lebih banyak digunakan mobil pick-up.		memiliki sarana transportasi yang telah memadai guna memperancar kegiatan produksi maupun pemasaran perikanan. Dilihat dari kondisi eksisting sarana transportasi dan kajian literatur yang ada dibutuhkan faktor <b>Peningkatan sarana transportasi angkutan perikanan</b>
Jumlah tenaga kerja sektor perikanan	Ketersediaan tenaga kerja di Kecamatan Alok Barat dilihat berdasarkan jumlah rumah tangga perikanan baik itu nelayan maupun tenaga kerja/buruh sektor pengolahan yang ada di tiap cluster wilayah Kelurahan cukup banyak. Dari data diperoleh bahwa jumlah ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan dan kelautan di Kecamatan Alok Barat adalah 1055 RTP, dengan 70% nya berada di Kelurahan Wolomarang. Selain itu terdapat empat industri pengolahan ikan yang mampu menyerap tenaga kerja 20-50 jiwa.	Menurut Sunoto (2013) menjelaskan bahwa penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa fasilitas sentra produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, fasilitas pengolahan ikan ataupun kombinasi kedua hal tersebut. Dari sentra-sentra produksi tersebut akan menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kegiatan produksi hingga pemasaran dibutuhkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup.	Ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan yang ada di Kecamatan Alok Barat sudah cukup banyak karena sebagian besar penduduk Alok Barat terutama di Kelurahan Wolomarang bermatapencarian sebagai nelayan. Sesuai dengan pernyataan Sunoto (2013) yang menyatakan bahwa penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup maka dengan pertimbangan pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sikka tentunya akan diikuti dengan peningkatan jumlah industri perikanan yang ada baik di tahap produksi, pengolahan maupun pemasaran yang tentunya membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih besar. Dilihat dari kondisi eksisting dan kajian literature yang ada maka dibutuhkan faktor <b>Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan</b>
Kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan	Kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan yang ada di Kecamatan Alok Barat saat ini	Menurut KKP (2010) salah satu prinsip minapolitan adalah berkualitas, pelaksanaan	Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Alok Barat saat ini 20 % masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Tidak sekolah-



Variabel	Karakteristik kawasan	Tinjauan Literatur	Pembahasan
	dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ada. Sebagian besar nelayan yang ada di Kelurahan Wolomarang memiliki tingkat pendidikan SD-SMA. Sedangkan tenaga kerja di sektor industri pengolahan memiliki tingkat pendidikan SMA hingga Sarjana. Untuk penduduk Kecamatan Alok Barat sendiri hampir 80% memiliki tingkat pendidikan SMA-Sarjana.	pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Menurut Waristo (2002) tolak ukur sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pendidikan yang lebih tinggi dapat memperoleh pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas mereka.	SMP) dan golongan yang berpendidikan rendah ini hampir seluruhnya memiliki matapencarian sebagai nelayan. Sesuai dengan pernyataan Waristo (2002) bahwa tolak ukur sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pendidikan yang lebih tinggi dapat memperoleh pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas mereka dan prinsip dari minapolitan sendiri adalah pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas sumberdaya manusia, sehingga sangat dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kualitas SDM yang baik. Melihat kondisi eksisting yang ada saat ini tentunya masih dibutuhkan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung rencana pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sikka oleh karena itu dibutuhkan faktor <b>Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan</b>
Ketersediaan Masyarakat (Kelompok nelayan)	Ketersediaan lembaga masyarakat di Kecamatan Alok Barat dalam hal ini kelompok nelayan hanya bersifat insidental, artinya kelompok-kelompok nelayan ini hanya ada di waktu-waktu tertentu sesuai kondisi yang dibutuhkan, misalnya ketika akan diberikan bantuan baik berupa dana ataupun alat tangkap. Jadi tidak dapat di data jumlah kelompok nelayan yang ada saat ini.	Sunoto (2013) menjelaskan strategi pengembangan kawasan minapolitan ini lebih ke pendekatan kelembagaan, penguatan kelembagaan menjadi syarat mutlak pengembangan minapolitan dimana salah satunya adalah lembaga masyarakat nelayan. Dengan adanya lembaga nelayan diharapkan dapat memperlancar arus informasi dari pemerintah maupun lembaga lainnya serta diantara	Ketersediaan lembaga masyarakat di Kecamatan Alok Barat dalam hal ini kelompok nelayan hanya bersifat insidental, artinya hingga saat ini belum ada kelompok nelayan yang memiliki struktur kepengurusan yang baik. Sesuai dengan pernyataan Sunoto (2013) yang menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi syarat mutlak pengembangan minapolitan, dimana salah satunya adalah lembaga masyarakat nelayan, dengan adanya lembaga nelayan diharapkan dapat memperlancar arus informasi dari pemerintah maupun lembaga lainnya serta diantara para nelayan sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan keberadaan dari lembaga masyarakat/kelompok nelayan itu sendiri sebagai

Variabel	Karakteristik kawasan	Tinjauan Literatur	Pembahasan
		para nelayan sendiri.	bentuk partisipasi masyarakat guna mendukung rencana pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Dilihat dari kondisi eksisting dan kajian literatur yang ada maka dibutuhkan faktor <b>Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan .</b>
Ketersediaan Lembaga permodalan (Koperasi)	Di Kecamatan Alok Barat belum terdapat suatu lembaga khusus yang memberikan modal usaha untuk sektor perikanan dan kelautan. Tidak terdapat juga koperasi nelayan yang bisa menjalankan peran tersebut. Untuk modal usaha sebagian besar nelayan diperoleh dari kredit Bank, diantaranya yang memberi kredit khusus untuk sektor perikanan dan kelautan adalah Bank BRI.	Sunoto (2013) menjelaskan strategi pengembangan kawasan minapolitan ini lebih ke pendekatan kelembagaan, penguatan kelembagaan menjadi syarat mutlak pengembangan minapolitan, salah satu wujud kelembagaan yaitu lembaga permodalan. Menurut Dahuri (2001) pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan diantaranya adalah koperasi perikanan yang dapat menjadi lembaga permodalan.	Lembaga permodalan khusus bagi sektor perikanan belum terdapat di Kecamatan Alok Barat, namun menurut Sunoto (2013) penguatan kelembagaan menjadi syarat mutlak pengembangan minapolitan, dan salah satu wujud kelembagaan yaitu tersedianya lembaga permodalan yang dapat membantu memberikan modal usaha bagi para nelayan, ataupun pengusaha lainnya di sektor perikanan. Untuk mendukung adanya rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat maka dibutuhkan adanya faktor <b>Pembentukan lembaga permodalan khusus usaha sektor perikanan</b>
Ketersediaan Lembaga penyuluhan/pelatihan	Di Kecamatan Alok Barat dan Kabupaten Sikka belum terdapat suatu lembaga yang berfungsi khusus untuk memberikan penyuluhan atau pelatihan bagi para nelayan atau pelaku industri di sektor perikanan dan kelautan. Tetapi dari pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan sering melakukan	Menurut KKP (2010) dalam pengembangan minapolitan salah satunya harus melalui pendekatan penyuluhan. Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan Minapolitan. Penyuluh akan berperan	Di Kecamatan Alok Barat belum terdapat suatu lembaga yang berfungsi khusus untuk memberikan penyuluhan atau pelatihan bagi para nelayan atau pelaku industri di sektor perikanan dan kelautan. Menurut KKP (2010) penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan Minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan

Variabel	Karakteristik kawasan	Tinjauan Literatur	Pembahasan
	penyuluhan bagi para nelayan, terkait sektor perikanan.	sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.	hasil perikanan. Walaupun pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan sering melakukan penyuluhan bagi para nelayan, terkait sektor perikanan tetapi butuh intensitas yang lebih banyak dan juga keterlibatan akademisi sektor perikanan untuk mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan, maka dibutuhkan faktor <b>peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan</b>
Ketersediaan pengelola kawasan minapolitan	Di Kecamatan Alok Barat dan Kabupaten Sikka belum terdapat suatu Badan khusus yang berfungsi sebagai pengelola kawasan minapolitan. Kegiatan terkait minapolitan masih menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka.	Sunoto (2013) menjelaskan strategi pengembangan kawasan minapolitan ini lebih ke pendekatan kelembagaan dimana pemerintah memiliki kewenangan penuh didalamnya, kewenangan tersebut dapat membentuk suatu kelembagaan khusus yang dapat mengelola kawasan minapolitan.	Di Kecamatan Alok Barat dan Kabupaten Sikka belum terdapat suatu Badan khusus yang berfungsi sebagai pengelola kawasan minapolitan. Kegiatan terkait minapolitan masih menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka. Sesuai dengan pendapat Sunoto (2013) yang menjelaskan bahwa menjelaskan strategi pengembangan kawasan minapolitan ini lebih ke pendekatan kelembagaan dimana pemerintah memiliki kewenangan penuh didalamnya, dan kewenangan tersebut dapat berupa pembentukan suatu kelembagaan khusus yang dapat mengelola kawasan minapolitan maka untuk mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dibutuhkan faktor <b>pembentukan badan pengelola kawasan minapolitan</b>
Ketersediaan sentra produksi perikanan	Sentra produksi perikanan di Kabupaten Sikka tersebar hampir diseluruh Kecamatan pesisir yang ada. Sentra produksi perikanan ini ditandai dengan lokasi tangkap yang ada di hampir setiap kecamatan pesisir	Menurut KKP (2010) pendekatan yang harus dilakukan pengembangan minapolitan salah satunya adalah pendekatan sentra produksi, minapolitan berada dalam	Dalam pengembangan minapolitan harus dilakukan pendekatan sentra produksi, minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat dan menurut Sunto (2013) sentra-sentra produksi tersebut akan menghasilkan produk-produk

Variabel	Karakteristik kawasan	Tinjauan Literatur	Pembahasan
	di Kabupaten Sikka, namun semua stok ikan tersebut didaratkan ke Pelabuhan Pelabuhan Ikan (PPI)Maumere di Kecamatan Alok dan Pelabuhan Pelabuhan Ikan (PPI) Wuring di Kecamatan Alok Barat tergantung kondisi ombak dan angin dari masing-masing PPI. Sentra produksi perikanan yang biasanya mendaratkan ikannya di PPI Wuring (Alok Barat) yaitu berasal dari Nangahure, Wuring, Kampung Buton, Kampung Benu, Magepanda, Pemana.	kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu menurut Sunoto (2013) menjelaskan bahwa penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa fasilitas sentra produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, fasilitas pengolahan ikan ataupun kombinasi kedua hal tersebut. Dari sentra-sentra produksi tersebut akan menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.	unggulan yang nantinya akan dipasarkan dan mempengaruhi sistem perekonomian yang ada di kawasan minapolitan itu sendiri. Sehingga peningkatan sentra produksi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kawasan minapolitan. Peningkatan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas produksi. Untuk mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat tentunya dibutuhkan pengembangan sentra produksi itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan faktor <b>Peningkatan kualitas produksi perikanan</b>
Ketersediaan tempat pelelangan ikan	Di Kecamatan Alok Barat terdapat satu Tempat Pelelangan Ikan yang merangkap dengan pelembuan pendaratan ikan Wuring yang terletak di Kelurahan Wolomarang. Kondisi tempat pelelangan ikan ini cukup baik dengan aktifitas yang cukup ramai setiap harinya.	Menurut Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya adalah perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelembuan, pelelangan, infrastruktur pada sentra produksi, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (Seperti BBM, benih, mesin	Menurut Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya adalah perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan salah satunya adalah tempat pelelangan ikan. Di Kecamatan Alok Barat sudah terdapat tempat pelelangan ikan yang merangkap dengan pelembuan pendaratan ikan Wuring yang terletak di Kelurahan Wolomarang. Namun untuk mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat akan membutuhkan kegiatan pelelangan ikan yang lebih

Variabel	Karakteristik kawasan	Tinjauan Literatur	Pembahasan
		dan alat tangkap), serta sistem informasi tentang teknologi baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien.	besar lagi oleh karena itu dibutuhkan faktor pengembangan <b>Peningkatan ketersediaan tempat pelelangan ikan</b>
Ketersediaan fasilitas sentra pengolahan ikan	Di Kecamatan Alok Barat terdapat empat sentra industri pengolahan ikan dengan kemampuan menyerap tenaga kerja 20-55 orang. Keempat sentra industri pengolahan ikan ini terletak di Kelurahan Wolomarang, Waititi dan Hewuli. Industri yang ada meliputi industri yang bergerak di bidang pengemasan ikan, pengeringan, pengasinan, pemundungan dan pengasapan. Hasil industri dipasarkan ke daerah Jawa dan juga ada yang diekspor ke Jepang dan Korea.	Menurut Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya pengolahan hasil perikanan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen sampai produk siap dipasarkan. Dengan adanya pengolahan ikan dapat menaikkan nilai jual ikan dan meningkatkan pendapatan.	Dengan adanya industri pengolahan ikan di bidang pengemasan dan pengasapan ikan tentunya dapat menaikkan nilai jual ikan yang berasal dari Kabupaten Sikka. Namun sesuai dengan penjelasan Dahuri (2001) bahwa pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya pengolahan hasil perikanan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen sampai produk siap dipasarkan maka dibutuhkan lebih banyak lagi fasilitas sentra pengolahan ikan sehingga ikan-ikan yang ada di Kecamatan Alok Barat maupun Kabupaten Sikka dapat dinaikkan nilai jualnya dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Dengan melihat kondisi eskisting, tinjauan literature dan mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan maka dibutuhkan faktor <b>Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan</b>
Ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan	Jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan yang ada di Kecamatan Alok Barat meliputi Stasiun SPBU sebagai sumber bahan bakar bagi nelayan terletak di Kelurahan Wolomarang dan Wuring, pelabuhan ikan yang ada di	Menurut Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya adalah perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, pelelangan, infrastruktur pada	Ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan di Kecamatan Alok Barat sudah cukup memadai diantaranya dengan adanya beberapa jasa pelayanan umum seperti SPBU, <i>cold storage</i> , pelabuhan pelelangan ikan. Hal ini tentunya mendukung penjelasan Dahuri (2001) bahwa pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya adalah tersedianya

Variabel	Karakteristik kawasan	Tinjauan Literatur	Pembahasan
	kampung Wuring Lama, <i>cold storage</i> di kampung Wuring lama dan di Waliti.	sentra produksi, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (Seperti BBM, benih, mesin dan alat tangkap), serta sistem informasi tentang teknologi baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien.	jasa-jasa pelayanan umum tersebut. Namun beberapa jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan di Kecamatan Alok Barat masih belum ada diantaranya adalah sentra penjualan alat tangkap maupun mesin kapal dan juga benih. Untuk mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat tentunya dibutuhkan jasa pelayanan umum yang lengkap oleh karena itu maka dibutuhkan faktor <b>Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan</b>
Ketersediaan pasar ikan	Di Kecamatan Alok Barat terdapat pasar Wuring dang juga tempat pelelangan ikan di wuring, tetapi belum terdapat pasar yang khusus memasarkan produk-produk perikanan baik itu yang sudah diolah maupun yang belum diolah.	Menurut KKP (2010) sasaran minapolitan adalah meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional salah satunya melalui revitalisasi sentra pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat.	Kegiatan pemasaran tidak bergantung hanya pada ketersediaan pasar tetapi juga bagaimana proses pemasaran yang dilakukan. Sesuai dengan penjelasan KKP (2010) bahwa sasaran minapolitan adalah meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional salah satunya melalui revitalisasi pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat maka untuk mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dibutuhkan faktor <b>Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan</b>
Ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan	Kondisi jaringan infrastruktur dasar di Kecamatan Alok Barat meliputi pelayanan jaringan listrik, pelayanan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, drainase, dan persampahan sudah terlayani dengan baik. Pada kawasan ini, seluruh masyarakat telah terlayani dengan listrik dari	Menurut Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya adalah perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, pelelangan, infrastruktur dasar. Selain itu menurut KKP (2010) minapolitan dikembangkan	Kondisi jaringan infrastruktur dasar di Kecamatan Alok Barat meliputi pelayanan jaringan listrik, pelayanan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, drainase, dan persampahan sudah terlayani dengan baik. Namun sesuai dengan penjelasan KKP (2010) bahwa minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha diantaranya adalah penyedia air bersih, listrik, telekomunikasi, dan informasi maka untuk

Variabel	Karakteristik kawasan	Tinjauan Literatur	Pembahasan
	PLN. Begitu juga dengan air bersih, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Alok Barat telah menggunakan sambungan PDAM. Hanya terdapat beberapa keluarga yang masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih.	dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha diantaranya adalah penyedia air bersih, listrik, telekomunikasi, dan informasi.	pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dibutuhkan faktor <b>Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan</b>
Jenis teknologi yang digunakan dalam kegiatan/aktivitas perikanan	Jenis teknologi yang digunakan dalam kegiatan perikanan di Kecamatan Alok Barat hanya terdapat pada sentra pengolahan perikanan. Jenis teknologi yang digunakan hanya berupa teknologi pengemasan dan pengasapan ikan. Untuk nelayan yang menangkap ikan belum memproduksi ikan belum menggunakan teknologi baik dari alat tangkap maupun alat pendukung lainnya.	Menurut KKP (2010) salah satu prinsip minapolitan adalah berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi, teknologi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan market share produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.	Dengan melihat jenis teknologi yang digunakan baik pada tahap produksi perikanan maupun pengolahan perikanan di Kecamatan Alok Barat maupun Kabupaten Sikka secara luas dapat dikatakan masih sangat sederhana. Sesuai dengan penjelasan KKP (2010) prinsip minapolitan adalah berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi, teknologi dan kebijakan terobosan serta untuk mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat maka dibutuhkan faktor <b>Pemanfaatan teknologi yang dalam kegiatan/aktivitas perikanan</b>
Kondisi jaringan informasi	Jaringan informasi yang digunakan dalam kegiatan perikanan di Kecamatan Alok Barat hanya terdapat pada sentra pengolahan perikanan. Jaringan informasi ini dimanfaatkan untuk proses pemasaran produk	Menurut Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya adalah perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan,	Dengan melihat jaringan informasi yang digunakan baik pada tahap produksi perikanan maupun pengolahan perikanan di Kecamatan Alok Barat maupun Kabupaten Sikka secara luas dapat dikatakan masih sangat sederhana. Sesuai dengan penjelasan Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait

<b>Variabel</b>	<b>Karakteristik kawasan</b>	<b>Tinjauan Literatur</b>	<b>Pembahasan</b>
	yang dimiliki:	pelelangan, infrastruktur dasar. Selain itu menurut KKP (2010) minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha diantaranya adalah penyedia air bersih, listrik, telekomunikasi, dan informasi.	diantaranya prasaran pendukung dalam hal ini jaringan informasi untuk meningkat efisiensi proses produksi maka untuk mendukung rencana pengembangan kawasan minapolitan dibutuhkan faktor <b>Pemanfaatan jaringan informasi dalam kegiatan/aktifitas perikanan</b>

*Sumber : Hasil Analisa Penulis, 2016*



Dari hasil analisa deskriptif di atas diperoleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat
2. Peningkatan sarana transportasi angkutan perikanan
3. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan
4. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan
5. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan
6. Pembentukan lembaga permodalan khusus usaha sektor perikanan
7. Peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan
8. Pembentukan badan pengelola kawasan minapolitan
9. Peningkatan kualitas produksi perikanan
10. Peningkatan ketersediaan tempat pelelangan ikan
11. Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan
12. Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan
13. Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan
14. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan
15. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktifitas perikanan
16. Pemanfaatan penggunaan jaringan informasi dalam kegiatan/aktifitas perikanan

Dari hasil analisa deskriptif di atas untuk faktor peningkatan ketersediaan tempat pelelangan ikan dapat dimasukkan dalam faktor peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan. Sedangkan untuk faktor pemanfaatan penggunaan jaringan informasi dalam kegiatan/aktifitas perikanan dapat disatukan menjadi faktor peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan. Faktor-faktor pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan hasil analisa deskriptif yang dilakukan antara lain adalah :

1. Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat
2. Peningkatan sarana transportasi angkutan perikanan
3. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan
4. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan
5. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan
6. Pembentukan lembaga permodalan khusus usaha sektor perikanan
7. Peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan
8. Pembentukan badan pengelola kawasan minapolitan
9. Peningkatan kualitas produksi perikanan
10. Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan
11. Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan
12. Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan
13. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan
14. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktifitas perikanan

Setelah mendapatkan faktor-faktor di atas, maka faktor-faktor tersebut akan ditanyakan kepada para *stakeholder* yang telah ditentukan sebelumnya (Lampiran).

#### Wawancara Eksplorasi Analisis Delphi

Dalam melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat menggunakan alat analisa Delphi sebagai fiksasi terhadap faktor-faktor berdasarkan analisa deskriptif agar didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Pada tahapan ini dilakukan wawancara kepada enam stakeholders yang telah ditentukan sebelumnya mengenai faktor apa saja yang berpengaruh pada pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan Minapolitan. Dalam mengeksplorasi pendapat responden, peneliti menggunakan kuisisioner wawancara dan panduan diskusi untuk membantu peneliti dalam proses wawancara. Penggunaan

kuisioner wawancara tersebut memungkinkan responden untuk dapat mengungkapkan pendapatnya secara langsung dan lebih mendalam.

Hasil eksplorasi pendapat masing-masing responden dalam menentukan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dapat dilihat pada lampiran, sedangkan hasil eksplorasi pendapat responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14 Hasil Eksplorasi Analisis Delphi

No	FAKTOR	1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat	V	X	X	V	V	V
2	Peningkatan sarana transportasi angkutan perikanan	X	X	X	X	X	X
3	Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan	X	V	X	V	X	X
4	Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan	V	X	X	X	V	V
5	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan	V	V	V	V	V	V
6	Pembentukan lembaga permodalan khusus usaha sektor perikanan	X	X	X	V	V	V
7	Peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan	V	V	V	V	V	V
8	Pembentukan badan pengelola kawasan minapolitan	X	X	X	X	X	X
9	Peningkatan kualitas produksi perikanan	V	V	V	V	V	V
10	Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan	V	V	V	V	V	V
11	Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan	V	V	V	V	V	V
12	Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan	V	V	V	V	V	V
13	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan	V	V	V	V	V	V
14	Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktifitas perikanan	V	V	V	V	V	V

Sumber: Hasil Wawancara Delphi, 2016

KETERANGAN:

V : Setuju

X : Tidak Setuju

 : Tidak konsensus

Dari hasil eksplorasi Delphi yang telah dilakukan di atas, telah disepakati 8 faktor yang berpengaruh, 2 faktor yang tidak berpengaruh dan 4 faktor yang belum disepakati sebagai faktor pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan minapolitan. Faktor yang telah disepakati berpengaruh terhadap pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat meliputi :

1. **Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Pembentukan kelompok nelayan dianggap dapat memiliki beberapa nilai positif dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan yaitu mempercepat arus informasi di kalangan nelayan, mempercepat penyaluran bantuan baik alat tangkap maupun modal, serta memudahkan pendataan status nelayan.
2. **Peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Partisipasi pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka dalam memberikan regulasi dan bantuan lainnya dianggap dapat meningkatkan kualitas sektor perikanan, selain itu pengetahuan yang dimiliki akademisi juga dianggap dapat membantu pengembangan nelayan maupun pengusaha di sektor perikanan.
3. **Peningkatan kualitas produksi perikanan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan kualitas produksi perikanan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Dengan kualitas produksi perikanan yang terus meningkat dan terjaga,

stabilitas pasar juga akan tetap terjaga sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

4. **Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Ketersediaan industri pengolahan dianggap sangat penting dalam peningkatan nilai jual komoditi perikanan. Jumlah industri pengolahan ikan yang sangat minim di Kabupaten Sikka menunjukkan belum begitu banyak masyarakat yang melihat peluang pengembangan industri perikanan di Kabupaten Sikka.
5. **Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Jasa pelayanan umum terkait misalnya stasiun pengisian bahan bakar, cold storage, tempat pelelangan ikan merupakan fasilitas yang sangat diperlukan nelayan dalam mendukung aktifitasnya oleh karena itu dianggap sangat penting dalam upaya pengembangan suatu kawasan minapolitan.
6. **Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Sistem pemasaran produksi perikanan yang masih sangat sederhana dianggap belum begitu mampu menjual hasil komoditas perikanan yang ada.
7. **Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Infrastruktur dasar seperti

listrik dan air bersih merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam pengembangan kawasan minapolitan. Untuk jaringan air bersih, masih banyak masyarakat di pesisir Alok Barat yang belum menggunakan PDAM. Pengembangan kawasan minapolitan diharapkan bisa meningkatkan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang belum terpenuhi.

8. **Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktifitas perikanan.** Semua responden setuju bahwa pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktifitas perikanan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Pemanfaatan teknologi dianggap dapat meningkatkan nilai jual komoditas perikanan yang ada di Kabupaten Sikka. Selama ini masih sangat minim penggunaan teknologi baik dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasaran perikanan sehingga hasil produksi maupun pengolahan memiliki nilai jual yang rendah.

Sedangkan 2 faktor yang disepakati tidak berpengaruh dalam pengembangan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat yaitu :

1. **Peningkatan sarana transportasi angkutan perikanan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan sarana transportasi angkutan perikanan merupakan faktor yang tidak mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Sarana transportasi angkutan perikanan yang sering di Kecamatan Alok Barat dianggap sudah cukup baik dan belum terlalu dibutuhkan peningkatannya baik itu sarana angkutan di darat seperti mobil *pick up* maupun angkutan di laut yaitu perahu/kapal. Rata-rata nelayan penuh memiliki perahu/kapal sendiri, begitu juga pengumpul yang biasanya mengumpulkan ikan dari para nelayan sudah memiliki mobil *pick-up* sendiri.
2. **Pembentukan badan pengelola kawasan minapolitan.** Semua responden setuju bahwa pembentukan badan pengelola kawasan minapolitan merupakan faktor yang tidak mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Pembentukan badan pengelola kawasan minapolitan

dianggap belum dibutuhkan selain itu pembentukan kelembagaan berbentuk badan membutuhkan prosedur yang tidak mudah dan pengelolaan kawasan minapolitan masih bisa menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka.

Selain bertujuan untuk mendapatkan consensus dari para responden terhadap faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan, analisis *Delphi* juga memungkinkan untuk mendapatkan faktor lain yang berpengaruh menurut responden diluar dari faktor yang ditanyakan oleh peneliti. Berdasarkan hasil eksplorasi yang berupa kuesioner dan wawancara dengan responden, responden mengungkapkan bahwa adanya faktor lain yang juga mempengaruhi pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan minapolitan berdasarkan kondisi eksisting di lapangan yaitu perlu adanya pembagian zona pemanfaatan ruang untuk kawasan minapolitan.

Hasil eksplorasi *Delphi* dalam tahap ini dijadikan basis untuk putaran selanjutnya (iterasi) hingga mencapai konsensus terkait faktor yang mempengaruhi pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan minapolitan. Faktor yang sebelumnya belum disepakati dan faktor lain yang ditambahkan oleh responden akan menjadi faktor-faktor yang akan ditanyakan kepada responden pada tahap iterasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Basis Faktor Untuk Tahap Iterasi

No	Faktor	Keterangan
1.	Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat	Belum konsensus
2.	Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan	Belum konsensus
3.	Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan	Belum konsensus
4.	Pembentukan lembaga permodalan khusus usaha sektor perikanan	Belum konsensus
5.	Pembagian zona pemanfaatan ruang kawasan minapolitan	Faktor Baru

*Sumber : Hasil analisa, 2016*

#### Wawancara Iterasi I Analisis Delphi

Setelah didapatkan hasil eksplorasi analisis *Delphi*, maka dilakukan pengembangan kuesioner pada tahap selanjutnya. Pada tahap eksplorasi masih terdapat faktor yang belum mencapai konsensus maka dilakukan wawancara ulang agar mendapatkan hasil yang konsensus. Faktor yang belum mencapai konsensus dan penambahan berupa faktor baru yang didapatkan dari tahap eksplorasi sebelumnya yang dijadikan basis dalam penyusunan kuesioner wawancara di tahap iterasi. Kuesioner wawancara *Delphi* pada tahap iterasi ini pada dasarnya sama dengan kuesioner tahap 1, namun faktor yang ditanyakan merupakan faktor yang belum mencapai konsensus dan faktor baru yang didapatkan dari pendapat para responden.

Responden dalam tahap ini sama dengan responden dalam tahap sebelumnya. Pada tahap ini diperlukan penggalan pendapat responden terhadap faktor yang belum mencapai konsensus dan faktor tambahan. Hasil iterasi pendapat responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Hasil Iterasi Analisis Delphi

No	FAKTOR	1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat	V	V	V	V	V	V
2.	Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan	V	V	V	V	V	V
3.	Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan	V	V	V	V	V	V
4.	Pembentukan lembaga permodalan khusus usaha sektor perikanan	X	X	X	X	X	X
5.	Pembagian zona pemanfaatan ruang kawasan minapolitan	V	V	V	V	V	V

Sumber: Hasil Wawancara *Delphi*, 2016

#### KETERANGAN:

V : Setuju

X : Tidak Setuju

Berdasarkan hasil wawancara *Delphi* Iterasi I telah mencapai konsensus dimana pendapat dari responden bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dan 2 faktor



yang dianggap tidak mempengaruhi pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan minapolitan. Faktor di tahap iterasi yang telah disepakati berpengaruh terhadap pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat meliputi :

1. **Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat.** Semua responden setuju bahwa peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan yang ada di Kecamatan Alok Barat masih buruk, banyak jalan rusak dan berlubang yang dianggap dapat mengganggu kelancaran arus perpindahan orang dan barang terutama yang terkait dengan aktifitas di sektor perikanan.
2. **Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Dengan berkembangnya kawasan minapolitan diharapkan dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja baru baik di sektor produksi, pengolahan, pemasaran maupun sektor penunjang lainnya sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
3. **Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan.** Semua responden setuju bahwa peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Sikka khususnya di Kecamatan Alok Barat memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan minim pengetahuan mengenai perikanan.
4. **Pembagian zona pemanfaatan ruang kawasan minapolitan.** Semua responden setuju bahwa pembagian zona kawasan minapolitan merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Dengan adanya zoning regulation diharapkan pemanfaatan lahan di kecamatan Alok Barat dapat mendukung rencana

pengembangan kawasan minapolitan, mengingat Kecamatan Alok Barat memiliki lahan kosong yang sangat luas dan memiliki prospek yang bagus dalam perluasan kawasan Kota Maumere sehingga rawan untuk dimanfaatkan sebagai lahan yang tidak sejalan pengembangan kawasan minapolitan.

Sedangkan faktor di tahap iterasi yang disepakati tidak berpengaruh dalam pengembangan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat yaitu :

**Pembentukan lembaga permodalan khusus usaha sektor perikanan.**

Semua responden setuju bahwa pembentukan lembaga permodalan khusus usaha perikanan merupakan faktor yang tidak mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Penyaluran modal usaha di Kabupaten Sikka yang sebagian besar berasal dari kredit bank dianggap sudah cukup mampu melayani usaha di sektor perikanan, selain itu pemerintah daerah juga sering membantu memberikan modal usaha bagi industri rumahan. Lembaga permodalan khusus belum terlalu dibutuhkan

Secara keseluruhan konsensus yang dihasilkan dari analisis *Delphi* ini adalah 11 faktor yang mempengaruhi pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan minapolitan sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan
2. Peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan.
3. Peningkatan kualitas produksi perikanan.
4. Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan
5. Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan
6. Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan
7. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan
8. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktifitas perikanan

9. Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat.
10. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan
11. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan
12. Pembagian zona pemanfaatan ruang kawasan minapolitan

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan, oleh karena itu selanjutnya faktor-faktor pengembangan ini akan dikelompokkan berdasarkan zona-zona pemanfaatan ruang di kawasan minapolitan dari hasil komparasi antara kebijakan pedoman penyusunan rencana induk pengembangan kawasan minapolitan (Permen KP No 18/ 2012) dan kondisi karakteristik wilayah yang ada. Adapun zona-zona pemanfaatan ruang di kawasan minapolitan adalah sebagai berikut :

1. Zona inti (Sentra Produksi) adalah pusat kegiatan minapolitan yang merupakan sentra kegiatan produksi sentra kegiatan pelayanan dan jasa berupa pelabuhan perikanan, pusat permukiman nelayan serta kegiatan utama lainnya.
2. Zona Pendukung (Sentra Pengolahan) adalah wilayah diluar zona inti yang diperuntukan bagi pengembangan usaha berbasis perikanan (pengolahan) dan berintegrasi dengan usaha penangkapan ikan.
3. Zona Terkait (Pemasaran) adalah wilayah diluar zona inti dan zona pendukung yang memiliki keterkaitan erat dan langsung dalam kelancaran bisnis perikanan yaitu pasar yang merupakan konsumen dari produk perikanan yang dihasilkan maupun produsen yang menghasilkan produk perikanan tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian faktor berdasarkan zona pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel berikut

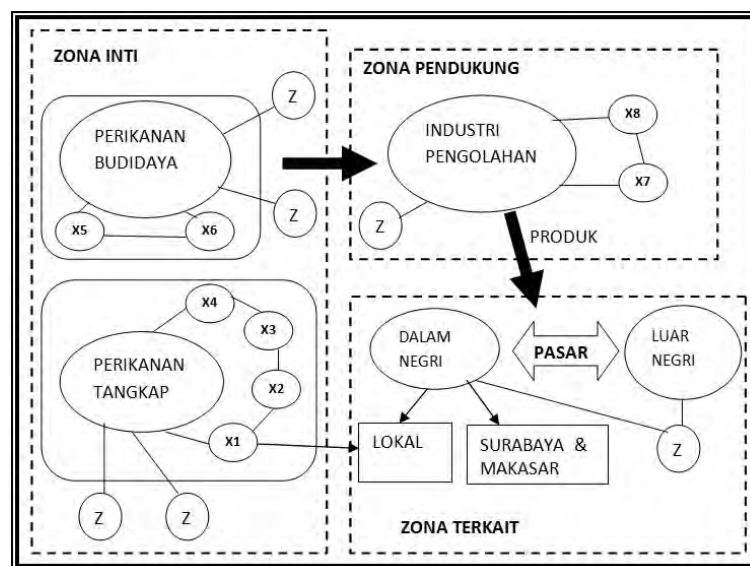
Tabel 4.17 Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan  
Berdasarkan Zona Pemanfaatan Ruang

Zona/Kawasan	Faktor yang mempengaruhi
Zona Inti	Peningkatan kualitas produksi perikanan
	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan
	Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan
	Peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan
	Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan
	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan
	Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat.
	Pembagian zona pemanfaatan ruang kawasan minapolitan
Zona Pendukung	Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan
	Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktifitas perikanan
	Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan
Zona Terkait	Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan

Sumber : Hasil analisis, 2016

#### 4.2.3 Analisis Penentuan Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan

Pada tahap analisis ini merupakan tahap penentuan konsep pengembangan kawasan pesisir perkotaan Maumere sebagai kawasan minapolitan. Dalam konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dan karakteristik kawasan di Kecamatan Alok Barat maka pengembangan kawasan minapolitan akan dilakukan dengan skema konsep sebagai berikut :



Gambar 4.6 Skema Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Alok Barat (Hasil Analisa, 2016)

##### Keterangan

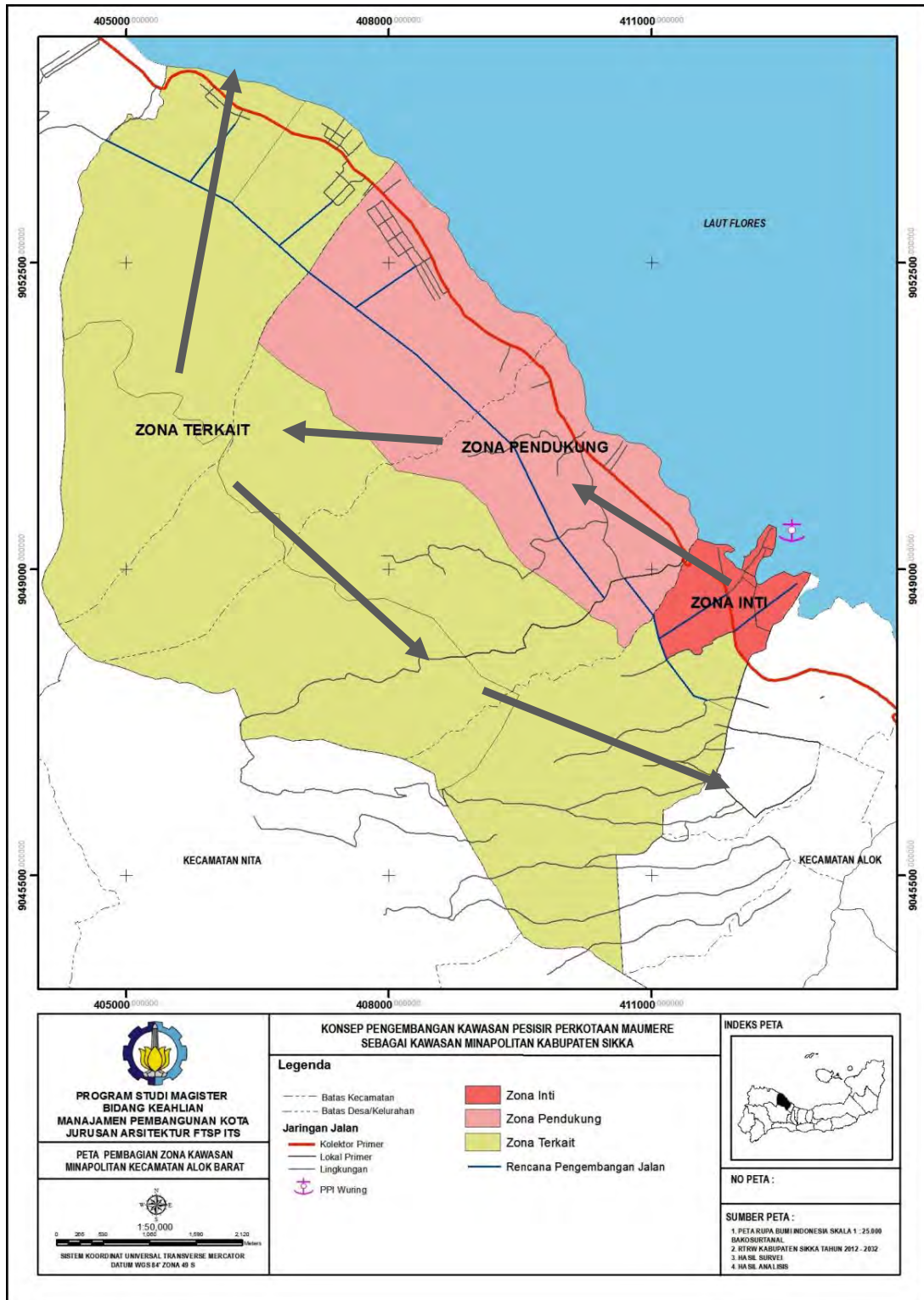
- X1 : Nelayan
- X2 : Pedagang eceran
- X3 : Pedagang grosir
- X4 : Pengumpul (Perikanan tangkap)
- X5 : Petani ikan (budidaya)
- X6 : Pengumpul (budidaya)
- X7 : Pengolahan ikan tradisional
- X8 : Pengolahan ikan modern
- Z : Sarana & Prasarana Pendukung

Dari gambar skema konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dapat dilihat bahwa konsep pengembangan kawasan minapolitan dikelompokkan dalam tiga zona yaitu zona inti yang di dalamnya terdapat aktifitas produksi yang dibagi menjadi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan berbagai pihak yang terlibat serta sarana dan prasarana pendukung. Dari zona inti ini produksi perikanan akan diarahkan ke zona pendukung yang merupakan sentra industri pengolahan dengan tujuan menambah nilai jual produksi perikanan yang ada. Pengolahan perikanan ini terdiri atas pengolahan secara tradisional dan pengolahan secara modern dengan menggunakan teknologi. Hasil dari pengolahan pada zona pendukung ini selanjutnya dapat dipasarkan baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Pemasaran dalam negeri dibagi lagi menjadi dua yaitu pemasaran secara lokal (Kabupaten Sikka) dimana dibutuhkan pasar sebagai sarana penunjang. Sentra pemasaran ini berada pada zona terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 4.4. Dari masing-masing zona pemanfaatan ruang akan dijabarkan konsep pengembangan kawasan minapolitan di pesisir perkotaan maumere dengan teknik analisa triangulasi.

Analisa dengan teknik triangulasi berarti mencari data sekaligus menguji kredibilitas data. Analisa triangulasi ini menggunakan 3 sumber data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat. Dalam penelitian ini, sumber informasi yang akan digunakan adalah hasil penelitian berupa faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat, kebijakan/standar mengenai konsep pengembangan kawasan minapolitan yang pernah diterapkan dan pendapat literatur dan teori-teori terkait mengenai konsep pengembangan kawasan minapolitan. Analisa triangulasi dalam penentuan konsep pengembangan kawasan minapolitan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.18

Analisis Trinangulasi Penentuan Konsep

Peta 4.4 Pembagian Zona Kawasan Minapolitan Kecamatan Alok Barat



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



Tabel 4.18 Analisis Triangulasi Penentuan Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan

No	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat	Kebijakan/Standar mengenai terkait pengembangan kawasan minapolitan	Tinjauan literatur/ teori-teori terkait	Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan
Zona Inti				
1	<p>Peningkatan Kualitas Produksi Perikanan</p> <p>-Sentra produksi perikanan di Kabupaten Sikka tersebar hampir diseluruh Kecamatan pesisir yang ada.</p> <p>-Komoditas perikanan tangkap unggulan adalah jenis ikan pelagis yaitu tuna dan cakalang</p> <p>-Teknik penangkapan, armada dan alat yang digunakan masih sederhana</p>	<p>Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2011, tujuan pengembangan minapolitan adalah untuk:</p> <p>- Meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk</p>	<p>Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi perikanan adalah sarana penangkapan ikan yang terdiri dari armada dan alat tangkap (Prasetyawan, 2011).</p> <p>Ikan golongan pelagis seperti ikan tuna dan cakalang memiliki mobilitas tinggi dan distribusi yang jauh dari pantai (Masryhuri, 1999)</p>	<p>Konsep ini menekankan pada peningkatan produksi komoditas unggulan dan komoditas potensial melalui peningkatan kualitas nelayan :</p> <p>1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan antara lain dengan penambahan kekuatan kekuatan motor kapal (&gt; 30 GT) dan peralatan navigasi serta penambahan alat tangkap berupa pukat kantong dan <i>Long line</i></p>
2	<p>Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan</p>	<p>Dalam Rencana Strategis Bidang Pembangunan Kelautan dan Perikanan DKP</p>	<p>Sunoto (2013) menjelaskan strategi pengembangan kawasan minapolitan ini</p>	<p>2. Revitalisasi lembaga masyarakat/kelompok nelayan yang sebelumnya telah ada</p>

No	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat	Kebijakan/Standar mengenai terkait pengembangan kawasan minapolitan	Tinjauan literatur/ teori-teori terkait	Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan
	<p>-Belum ada lembaga masyarakat/kelompok nelayan yang aktif, baik dibentuk oleh nelayan maupun pemerintah daerah</p> <p>-lembaga masyarakat /kelompok nelayan yang ada bersifat insidental</p>	Kabupaten Sikka 2013-2017 menyebutkan bahwa salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pengendalian sumberdaya kelautan adalah pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	<p>lebih ke pendekatan kelembagaan, penguatan kelembagaan menjadi syarat pengembangan minapolitan dimana salah satunya adalah lembaga masyarakat nelayan.</p>	untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya pesisir melalui kegiatan rutin seperti bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah daerah.
3	<p>Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan</p> <p>-Sebagian besar masyarakat nelayan di Alok Barat memiliki tingkat pendidikan yang rendah</p> <p>-Sebagian besar nelayan minim pengetahuan tentang teknik penangkapan yang baik dan benar</p>	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012, Konsep minapolitan didasarkan pada 3 asas yang salah satunya adalah keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat	Menurut Gufron (2008) salah satu prinsip minapolitan adalah berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia.	3. Peningkatan kualitas nelayan melalui kegiatan penyuluhan secara rutin dan pelatihan kelompok nelayan

No	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat	Kebijakan/Standar mengenai terkait pengembangan kawasan minapolitan	Tinjauan literatur/ teori-teori terkait	Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan
4	<p>Peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan</p> <p>-Bentuk partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan yang sering dilakukan adalah kegiatan penyuluhan</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012, pelibatan pemerintah dalam pengembangan minapolitan adalah sebagai penanggungjawab utama penyusunan rencana induk sedangkan akademisi yaitu turut membantu penyusunan rencana induk melalui masukan pertimbangan dasar teoritis dan maskan dari hasil-hasil studi</p>	<p>Menurut Susilo (2003) salah satu atribut pembangunan wilayah pesisir adalah kelembagaan yang mencerminkan seberapa jauh tersedia perangkat kelembagaan dan hukum yang dapat mendorong keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang terkait.</p>	<p>4. Peningkatan partisipasi pemerintah melalui pemberian bantuan modal, alat tangkap hingga kapal motor</p>
5	<p>Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan</p> <p>-Belum adanya stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan (SPDN)</p> <p>-Belum adanya TPI, aktifitas pelelangan ikan dilakukan langsung di PPI</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012, salah satu syarat kawasan minapolitan adalah memiliki sarana dan prasarana perikanan seperti Pelabuhan perikanan, BBI, cold storage, pabrik es, dll</p>	<p>Menurut Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya adalah perencanaan penyediaan prasarana perikanan seperti pelelangan, infrastruktur pada sentra</p>	<p>5. Pengadaan stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan yang dikenal dengan istilah SPDN (Solar packed dealer for nelayan) di PPI Wuring Kelurahan Wolomarang</p> <p>6. Pembangunan TPI pusat di Kelurahan Wolomarang</p> <p>7. Perbaikan dan perawatan</p>

No	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat	Kebijakan/Standar mengenai terkait pengembangan kawasan minapolitan	Tinjauan literatur/ teori-teori terkait	Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan
	<p>-Sering terjadi pendangkalan pada dermaga PPI Wuring akibat banjir.</p> <p>-Belum adanya pusat penjualan alat dan bahan penangkapan ikan</p>		produksi, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (Seperti BBM, benih, mesin dan alat tangkap), serta sistem informasi tentang teknologi baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien.	<p>dermaga PPI Wuring</p> <p>8. Pembangunan pusat penjualan alat dan bahan penangkapan ikan di kelurahan Wolomarang</p>
6	<p>Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan</p> <p>-Infrastruktur dasar yang masih dibutuhkan pelayannya ada jaringan air bersih</p>	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012, salah satu syarat kawasan minapolitan adalah memiliki prasarana pengairan, energy dan informasi	Menurut Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya adalah perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, infrastruktur dasar. Selain itu menurut KKP (2010) minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha	<p>9. Pemasangan jaringan air bersih (PDAM) di perkampungan nelayan Kelurahan Wolomarang</p>

No	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat	Kebijakan/Standar mengenai terkait pengembangan kawasan minapolitan	Tinjauan literatur/ teori-teori terkait	Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan
7	<p>Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat.</p> <p>-Kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan yang ada di Kecamatan Alok Barat masih buruk, banyak jalan rusak dan berlubang yang diaggap dapat mengganggu kelancaran arus perpindahan orang dan barang terutama yang terkait dengan aktifitas di sektor perikanan</p>	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012, salah satu syarat kawasan minapolitan adalah memiliki aksesibilitas yang lancar	Menurut Gufton (2008), lokasi kegiatan perikanan harus dijangkau dengan mudah dari berbagai arah agar produksi, pemasaran dan keperluan kebutuhan lainnya dapat berjalan lancar, untuk dapat dijangkau dengan mudah dibutuhkan kondisi jalan yang baik.	10. Perbaikan kondisi jalan dan pembangunan jalan tembus ke lokasi budidaya perikanan dan ke lokasi industri pengolahan
8	Penetapan zonasi kawasan minapolitan	Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah mengarahkan Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan perikanan, perikanan dan pariwisata.	Konsep Minapolitan pada dasarnya merupakan perpaduan teori-teori lokasi yang berkembang dalam konsep agropolitan seperti teori Christaller, teori Losh dan teori Von Thunen,	11. Penetapan zona inti di kelurahan Wolomarang, zona pendukung untuk industri pengolahan di kelurahan Waititi dan Hewuli dan Zona Terkait di Kelurahan Wuring dan Kecamatan lainnya.

No	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat	Kebijakan/Standar mengenai terkait pengembangan kawasan minapolitan	Tinjauan literatur/ teori-teori terkait	Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan
			kesemua teori ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa setiap wilayah memiliki hirarki dan fungsi yang berbeda, sehingga membentuk suatu interaksi yang tetap dan berlanjut antara kota dan desa	
<b>Zona Pendukung</b>				
9	<p>Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan</p> <p>-Industri yang ada meliputi industri yang bergerak di bidang pengemasan ikan, pengeringan, pengasinan, pemindangan dan pengasapan.</p> <p>-Hasil industri dipasarkan ke daerah Jawa dan juga ada yang diekspor ke Jepang dan Korea.</p>	Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2011, tujuan pengembangan minapolitan adalah untuk: Meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk;	Menurut Dahuri (2001) pengembangan minapolitan membutuhkan beberapa komponen yang terkait diantaranya pengolahan hasil perikanan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen	<p>Konsep ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah produk dan juga dapat memberikan nilai tambah untuk wilayah penelitian. Konsep pengembangan di sektor pengolahan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian insentif pemanfaatan ruang bagi pelaku industri di bidang pengolahan ikan</li> <li>2. Peningkatan diversifikasi produk komoditas unggulan (ikan tuna dan cakalang) melalui pengolahan ikan</li> </ol>



No	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat	Kebijakan/Standar mengenai terkait pengembangan kawasan minapolitan	Tinjauan literatur/ teori-teori terkait	Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan
10	Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktivitas perikanan  -Pemanfaatan teknologi dalam industri pengolahan masih sederhana, seperti mesin pembekuan ikan dan pengemasan -Untuk pengolahan seperti pengeringan, pengasasinan, pemindangan dan pengasapan masih menggunakan cara tradisional	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012, salah satu prinsip Konsep minapolitan adalah berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, inovasi teknologi, inovasi kebijakan terobosan.	Menurut Dahuri (2001) Pengolahan hasil perikanan di kawasan minapolitan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen sampai produk siap dipasarkan	4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan khusus industri pengalengan ikan  3. Pembangunan jalan lokal primer sebagai jalan tembus dari zona inti dan zona terkait di Kelurahan Wailiti dan Kelurahan Hewuli  sehingga akan memberikan nilai tambah produk dan membuka lapangan kerja baru.
11	Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan	Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun	Menurut Sunoto (2013) menjelaskan	5. Pembinaan dan pelatihan masyarakat pesisir khusus

No	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat	Kebijakan/Standar mengenai terkait pengembangan kawasan minapolitan	Tinjauan literatur/ teori-teori terkait	Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan
	-Ketersediaan tenaga kerja di sektor pengolahan perikanan masih sangat kurang karena minimnya kemampuan /pengetahuan dalam pengolahan ikan	2012, salah satu karakteristik kawasan minapolitan adalah mampu menampung dan mengerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya.	penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa fasilitas sentra produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, fasilitas pengolahan ikan ataupun kombinasi kedua hal tersebut. Dari sentra-sentra produksi tersebut akan menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kegiatan produksi hingga pemasaran dibutuhkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup.	kemampuan pengolahan ikan
Zona terkait				
12	Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012, salah satu prinsip	Menurut Dahuri (2001) Pengolahan hasil perikanan di kawasan minapolitan pemasaran hasil perikanan,	Konsep ini bertujuan untuk memberikan dukungan pada kegiatan pemasaran produk unggulan. Konsep
	-Skala pemasaran komoditas	2012, salah satu prinsip	pemasaran hasil perikanan,	unggulan. Konsep



No	Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat	Kebijakan/Standar mengenai terkait pengembangan kawasan minapolitan	Tinjauan literatur/ teori-teori terkait	Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan
	<p>perikanan di Kecamatan Alok Barat memiliki lingkup lokal, domestic, dan luar negeri. -Belum ada Pasar Ikan yang khusus menjual hasil-hasil olahan ikan</p>	<p>Konsep minapolitan adalah berakselerasi tinggi, yang diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari Negara-negara competitor, melalui peningkatan market share produk-produk kelautan dan perikanan</p>	<p>meliputi kegiatan distribusi dan pemasaran hasil-hasil perikanan atau olahannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk pula di dalamnya kegiatan pemantauan distribusi informasi pasar (<i>market development</i>) dan pengembangan produk (<i>product development</i>)</p>	<p>pengembangannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pasar ikan yang khusus menjual hasil-hasil olahan ikan</li> <li>2. Pengembangan sentra wisata kuliner yang khusus menjadikan komoditas unggulan sebagai produk khas</li> <li>3. Pembentukan network yang mampu menyebarkan informasi pasar, harga yang realtime dan online.</li> </ol>

Sumber : Hasil Analisa, 2016



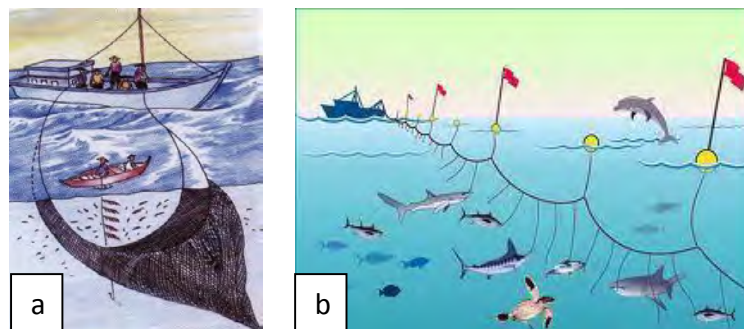
### **A. Konsep Pengembangan Zona Inti**

Konsep pengembangan di zona ini merupakan konsep yang mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan. Zona inti adalah pusat kegiatan minapolitan yang merupakan sentra kegiatan produksi, sentra kegiatan pelayanan dan jasa berupa pelabuhan perikanan, pusat permukiman nelayan serta kegiatan utama lainnya. Zona inti kawasan minapolitan Kecamatan Alok Barat diarahkan terletak pada sisi utara Kelurahan Wolomarang yang dimana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan perkampungan nelayan Wuring (Peta 4.4 Pembagian Zona Kawasan Minapolitan). Pengembangan zona inti kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu peningkatan kualitas produksi perikanan, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan, peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan, peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan, peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan, peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat, dan penetapan zonasi kawasan minapolitan. Berdasarkan tinjauan kebijakan terkait dan tinjauan literatur maka konsep pengembangan zona inti yang diarahkan adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan antara lain dengan penambahan kekuatan motor kapal ( $> 30$  GT) dan peralatan navigasi serta penambahan alat tangkap berupa pukat kantong dan *Long line*

Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi perikanan adalah sarana penangkapan ikan yang terdiri dari armada dan alat tangkap (Prasetyawan, 2011). Dari kondisi eksisting dapat diketahui bahwa nelayan di Kecamatan Alok barat masih menggunakan armada dan alat tangkap yang sederhana. Armada yang digunakan antara lain perahu tidak bermotor dan Kapal motor dengan kekuatan sedang ( $< 30$  GT). Perahu tidak bermotor, terutama yang berukuran kecil dan jakung, mendominasi armada perikanan di Kecamatan Alok Barat. Hal ini menunjukkan kemampuan

eksploitasi dan kapasitas produksi nelayan tergolong rendah. Dengan perahu tidak bermotor beberapa maka kemampuan jelajah nelayan dalam mencari ikan hanya sebatas perairan laut pantai. Beberapa komoditas penting perikanan tangkap dari golongan pelagis seperti ikan tuna dan cakalang yang juga merupakan komoditas unggulan Kabupaten Sikka umumnya memiliki distribusi yang jauh dari pantai, sehingga sulit bagi nelayan tanpa motor memanennya (Masyhuri, 1999). Untuk alat tangkap yang digunakan di Kecamatan Alok Barat meliputi pukat pantai, jaring insang, longline, pole and line, pancing dan bubu. Menurut Mukthar (2008) teknologi penangkapan yang digunakan untuk jenis ikan pelagis yaitu pukat kantong dan long line. Pukat Kantong adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yg terbuat dari jaring & terdiri dari 2 (dua) bagian sayap, badan dan kantong jaring. Sedangkan longline adalah alat penangkapan ikan yang terdiri dari deretan tali-tali utama dan pada tali utama jaring tertentu terdapat beberapa tali cabang yang lebih pendek dan lebih kecil diameternya.



Gambar 4.7 Ilustrasi alat tangkap (a) Pukat Kantong (b) Longline

Sumber : Google, 2016

Untuk menangkap komoditas unggulan seperti ikan tuna dan cakalang yang tergolong ikan pelagis dengan mobilitas yang sangat tinggi dan distribusi diperlukan teknologi penangkapan yang memadai. Oleh karena itu konsep pengembangan yang dibutuhkan adalah pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penangkapan

ikan antara lain dengan penambahan kekuatan motor kapal ( $> 30$  GT) dan peralatan navigasi serta penambahan alat tangkap berupa pukat kantong dan *Long line*.

2. Revitalisasi lembaga masyarakat/kelompok nelayan melalui kegiatan rutin seperti bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah daerah.

Kondisi eksisting di Kecamatan Alok Barat, kelompok nelayan bersifat insidental, dalam artian hanya terlihat ada pada moment tertentu seperti pemberian bantuan dll. Pembentukan kelompok nelayan dapat dilakukan dengan mengaktifkan kelompok-kelompok nelayan yang sudah pernah ada sebelumnya atau yang sudah pernah ada pada kegiatan tertentu. Kelompok nelayan dibentuk dengan tujuan memperkuat kelembagaan dan SDM nelayan secara terintegrasi sehingga dapat mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan produktifitas, dan daya saing nelayan (Zakiah, 2011). Revitalisasi lembaga masyarakat/kelompok nelayan yang sebelumnya telah ada untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dapat dilakukan melalui kegiatan rutin seperti bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah daerah. Bimbingan dan penyuluhan dapat berupa penjelasan mengenai pentingnya peran kelompok nelayan sebagai wadah untuk menjalin kerjasama, bertukar informasi, dan juga sebagai sarana untuk saling berbagi dalam pengadaan peralatan tangkap. Bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan secara rutin ini dapat mengoptimalkan fungsi kelompok nelayan yang telah ada.

3. Peningkatan kualitas nelayan melalui kegiatan penyuluhan secara rutin dan pelatihan kelompok nelayan.

Sebagian besar masyarakat nelayan di Alok Barat memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta minim pengetahuan tentang teknik penangkapan yang baik dan benar. Salah satu upaya peningkatan kualitas SDM nelayan adalah melalui penyampaian informasi dalam penyuluhan dan pelatihan secara rutin. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara rutin dapat menjadikan nelayan lebih paham tentang teknik-teknik penangkapan ikan, armada dan alat tangkap yang

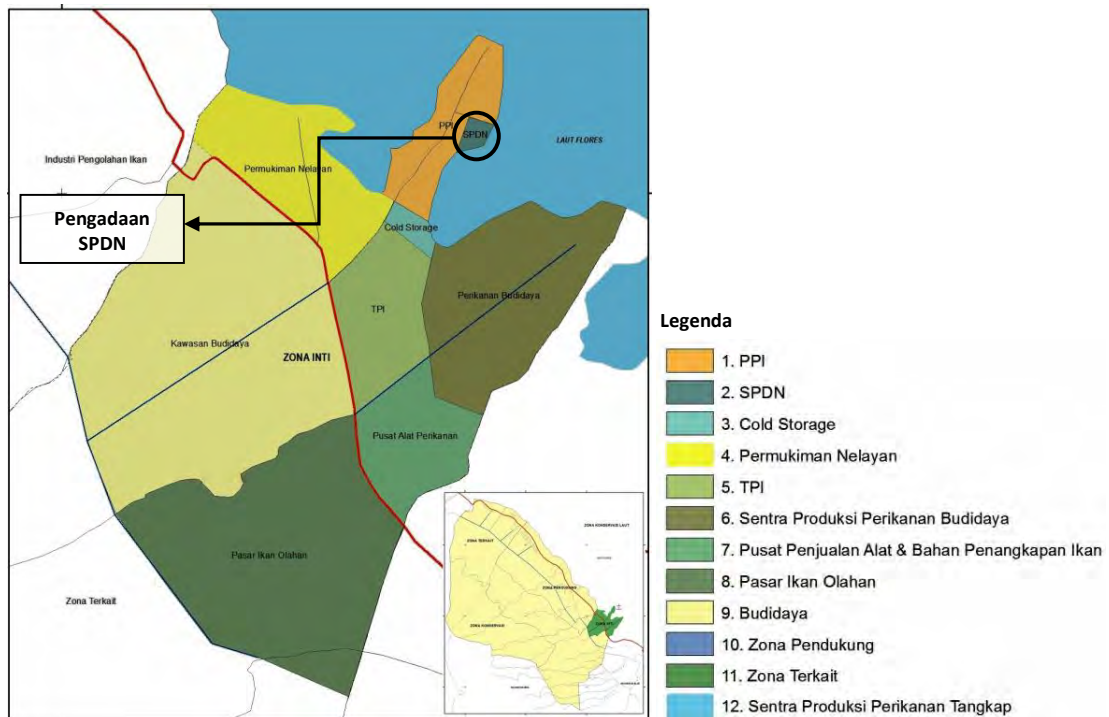
tepat, serta berbagai informasi terkait lainnya. Penyuluhan dan pelatihan kelompok nelayan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka serta pihak akademisi di bidang perikanan.

4. Pemberian bantuan modal, alat tangkap dan armada kapal motor.

Partisipasi pemerintah dan akademisi tidak hanya terbatas pada pemberian pelatihan atau penyuluhan, tetapi bisa dalam bentuk bantuan modal khususnya dalam bentuk sarana penangkapan ikan yaitu armada kapal dan alat tangkap. Dalam penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan di Kecamatan Alok Barat antara lain dengan penambahan kekuatan motor kapal ( $> 30$  GT) dan peralatan navigasi serta penambahan alat tangkap berupa pukat kantong dan *Long line*. Tidak semua nelayan memiliki modal untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi penangkapan ikan ini. Oleh karena itu pihak pemerintah maupun akademisi dapat berpartisipasi dalam pengembangan sektor perikanan dengan memberikan bantuan berupa armada kapal dan juga alat tangkap khusus pukat kantong dan long line.

5. Pengadaan stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan yang dikenal dengan istilah SPDN (Solar packed dealer for nelayan) di PPI Wuring Kelurahan Wolomarang.

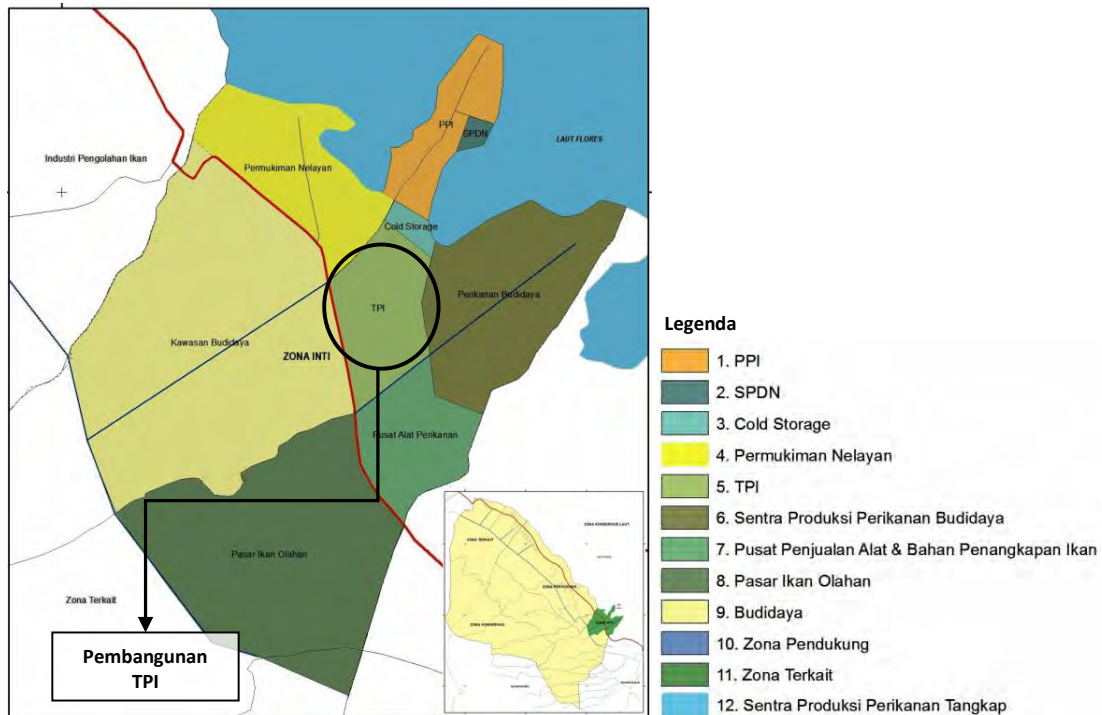
Hingga saat ini para nelayan yang akan melaut melakukan pembelian solar untuk bahan bakar kapal di SPBU Wolomarang karena belum adanya SPDN ini. Kebutuhan solar di pelabuhan pendaratan ikan Wuring mencapai 80 ton perbulan, sementara pasokan hanya 50-55 ton perbulan. Dengan demikian terjadi kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 30 ton perbulan. SPBU Wolomarang hanya mampu melayani kapal nelayan dengan bobot maksimum 30 GT. Sedangkan untuk kapal yang memiliki bobot  $> 30$  GT membutuhkan solar sekitar 900-1,3 ton per hari (DKP Kabupaten Sikka, 2013). Oleh karena itu dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan perlu diadakan atau dibangun SPDN di pelabuhan pendaratan ikan Wuring di Kelurahan Wolomarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.8. Arahana Lokasi Pengadaan Stasiun SPDN



Gambar 4.8 Arahkan Lokasi Konsep Pengadaan SPDN Di Kecamatan Alok Barat  
Sumber : Hasil Analisis, 2016

#### 6. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pusat di Kelurahan Wolomarang

Salah satu prasarana / jasa pelayanan umum di sektor perikanan adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kecamatan Alok Barat belum mempunyai Tempat Pelelangan ikan (TPI). Aktivitas pelelangan ikan selama ini langsung dilakukan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Wuring. Selain itu terdapat pula TPI yang berada di Kecamatan Alok tetapi dengan skala kecil. Dalam upaya pengembangan kawasan minapolitan perlu adanya pembangunan tempat pelelangan ikan dengan skala yang cukup besar yang menjadi pusat aktivitas pelelangan ikan di Kecamatan Alok Barat dan Kabupaten Sikka. Oleh karena itu perlu adanya arahan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pusat di Kelurahan Wolomarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.9 Arahkan Lokasi Konsep Pembangunan TPI



Gambar 4.9 Arahan Lokasi Konsep Pembangunan TPI Di Kecamatan Alok Barat  
Sumber : Hasil Analisis, 2016

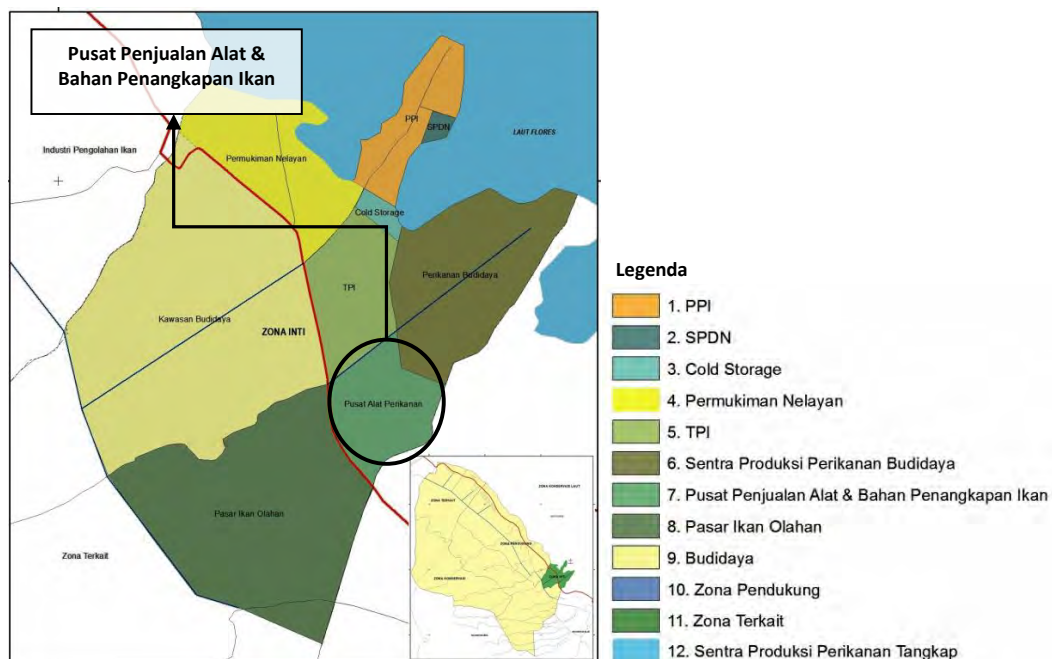
#### 7. Perbaikan dan perawatan dermaga PPI Wuring

Pelabuhan/Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Wuring yang terletak di Kelurahan Wolomarang merupakan wilayah pendaratan ikan dengan aktifitas yang cukup tinggi selain PPI Alok di Utara Kecamatan Alok. Sering terjadi pendangkalan pada dermaga PPI Wuring akibat banjir. Banjir melalui sungai sering membawa material lumpur yang menjadikan pendangkalan di laut sekitar dermaga. Dengan kedalaman perairan yang relatif dangkal, kapal nelayan yang memiliki bobot >20 GT akan mengalami kesulitan ketika akan mendarat. Untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan fasilitas PPI harus terus berada pada kondisi yang baik sehingga dapat digunakan secara maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan upaya perbaikan dan perawatan dermaga secara rutin.



8. Pembangunan pusat penjualan alat dan bahan penangkapan ikan di kelurahan Wolomarang

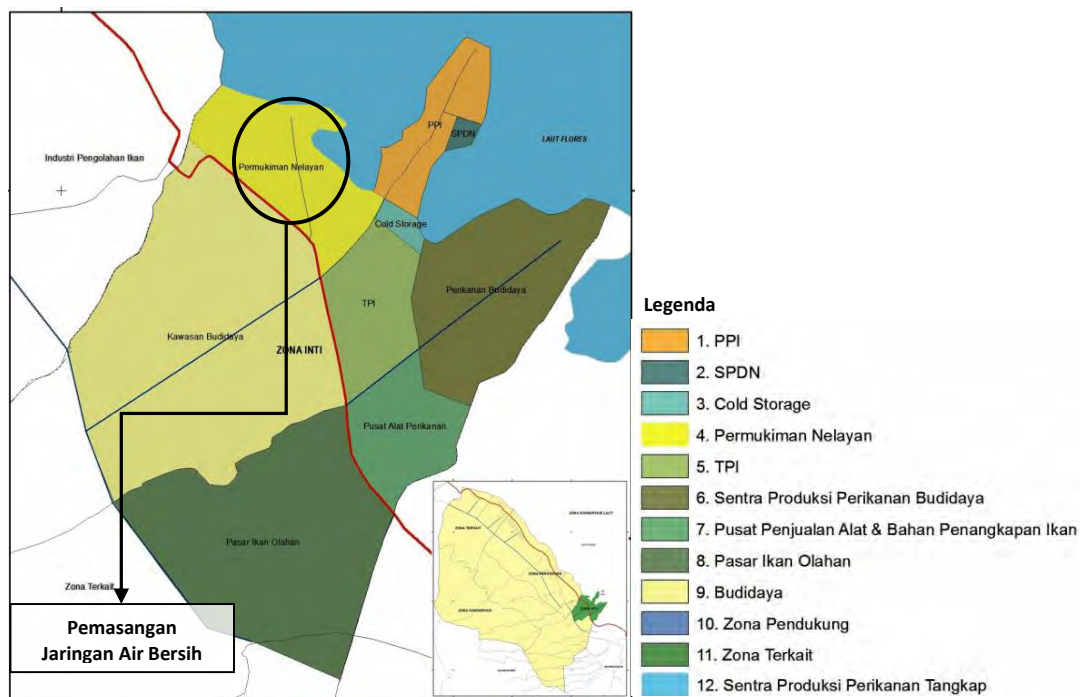
Pengembangan dan pembangunan minapolitan memiliki prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. Efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan produk-produk ekonomi kompetitif. Salah satu upaya memperpendek mata rantai produksi adalah meningkatkan pelayanan prasarana umum terkait perikanan. Salah satu jasa pelayanan umum sector perikanan adalah penjualan alat dan bahan penangkapan ikan yang tentunya dibutuhkan oleh para nelayan untuk mendukung aktifitasnya. Arahan lokasi pengembangan lokasi pusat penjualan alat dan bahan penangkapan ikan yaitu di Kelurahan Wolomarang dan berdekatan dengan prasaran umum pendukung aktifitas perikanan lainnya yaitu TPI, cold storage, PPI dan SPDN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.10 Arahan Lokasi Konsep Pembangunan Pusat Penjualan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan



Gambar 4.10 Arahan Lokasi Konsep Pusat Penjualan Alat & Bahan Penangkapan Ikan Di Kecamatan Alok Barat; Sumber : Hasil Analisis, 2016

9. Pemasangan jaringan air bersih (PDAM) di perkampungan nelayan Kelurahan Wolomarang.

Prasarana atau infrastruktur adalah alat yang paling utama dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi. Infastruktur dasar yang masih dibutuhkan pelayanannya adalah jaringan air bersih. Belum semua masyarakat di Kecamatan Alok Barat menggunakan air bersih dari PDAM terutama di perkampungan nelayan wuring. Supply air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung aktifitas perikanan yang dilakukan. Oleh karena itu dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat diharapkan adanya pelayanan jaringan air bersih secara menyeluruh terhadap masyarakat. Arahan peningkatan pelayanan PDAM melalui pemasangan jaringan air bersih ditujukan kepada permukiman nelayan kampung Wuring di Kelurahan Wolomarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.11 Arahan lokasi konsep pemasangan jaringan air bersih (PDAM).

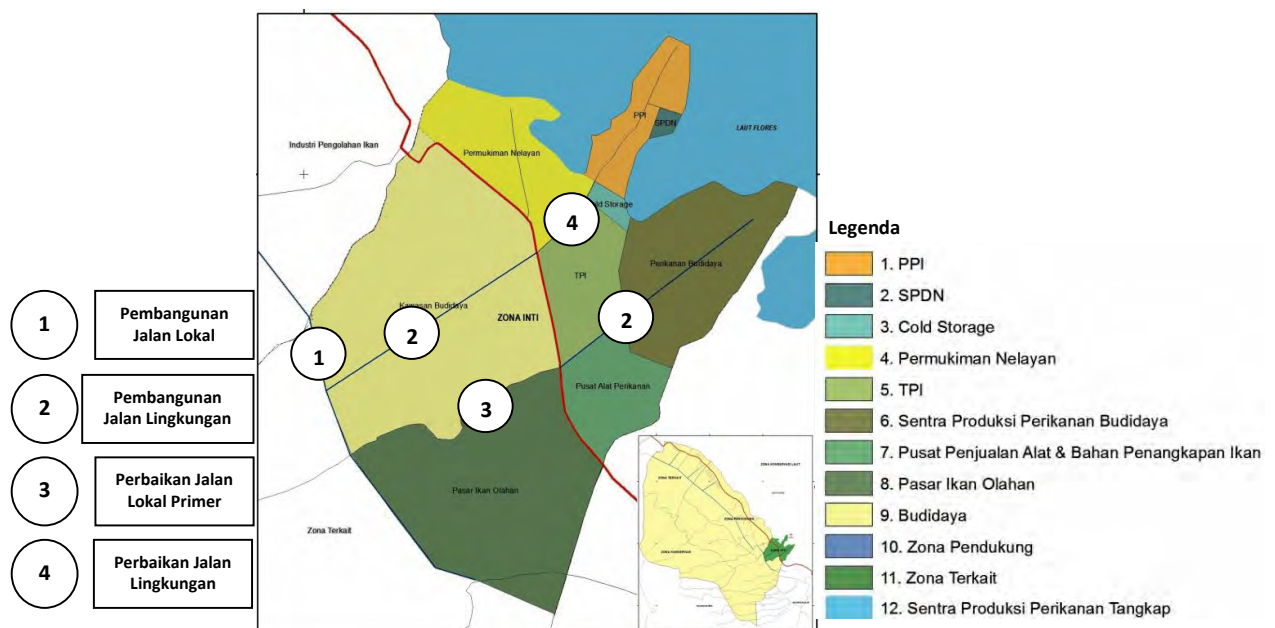


Gambar 4.11 Arahan Lokasi Konsep Pemasangan Jaringan Air Bersih di Perkampungan Nelayan Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat

Sumber : Hasil Analisis, 2016

10. Perbaikan kondisi jalan dan pembangunan jalan lingkungan ke lokasi budidaya perikanan dan jalan lokal primer ke industri pengolahan

Akses jaringan jalan di Kecamatan Alok Barat sudah cukup baik, dimana terdapat jalan kolektor primer yang menghubungkan seluruh wilayah Kelurahan dan kecamatan lainnya di Kabupaten Sikka. Namun untuk kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan yang ada di Kecamatan Alok Barat masih buruk, beberapa ruas jalan rusak dan berlubang. Selain itu belum terdapat jalan yang menghubungkan lokasi tambak dalam hal ini sentra produksi perikanan budidaya di utara Kelurahan Wolomarang. Permasalahan lainnya adalah terjadinya ketimpangan perkembangan wilayah di sisi utara dan sisi selatan Kecamatan Alok Barat. Wilayah yang berkembang hanya terjadi di sisi utara, hal ini disebabkan oleh belum adanya akses jalan di sisi selatan Kecamatan Alok Barat. Untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dibutuhkan upaya perbaikan kondisi jalan yang ada dan juga pembangunan jalan lingkungan dan lokal primer baru yang menghubungkan beberapa titik lokasi perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.12 Arahan lokasi perbaikan dan pembangunan jalan.



Gambar 4.12 Arahan Lokasi Perbaikan & Pembangunan Jalan Kelurahan Wolomarang; Sumber : Hasil Analisis, 2016

11. Penetapan zona inti di kelurahan Wolomarang, zona pendukung untuk industri pengolahan di kelurahan Wailiti dan Hewuli dan Zona Terkait di Kelurahan Wuring dan Kecamatan lainnya.

Penentuan zona kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dibagi ke dalam tiga zona dasar yaitu zona inti, zona pendukung dan zona terkait. Dasar pengembangan zona hasil komparasi antara kebijakan pedoman penyusunan rencana induk pengembangan kawasan minapolitan (Permen KP No 18/ 2012) dengan kondisi karakteristik wilayah yang ada.

Zona inti (Sentra Produksi) adalah pusat kegiatan minapolitan yang merupakan sentra kegiatan produksi sentra kegiatan pelayanan dan jasa berupa pelabuhan perikanan, pusat permukiman nelayan serta kegiatan utama lainnya. Zona inti kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dibagi dalam beberapa zona spesifik yaitu Pusat/Pelabuhan Pendaratan Ikan, permukiman nelayan, TPI, sentra perikanan budidaya, cold storage, SPDN, Pusat penjualan alat dan bahan perikanan, dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya yang dimaksud adalah kawasan pemanfaatan ruang lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan sektor perikanan seperti kawasan ibadah, perkatoran, perumahan, pendidikan dan sebagainya.

Zona Pendukung (Sentra Pengolahan) adalah wilayah diluar zona inti yang diperuntukan bagi pengembangan usaha berbasis perikanan (pengolahan) dan berintegrasi dengan usaha penangkapan ikan. Zona pendukung dibagi dalam zona spesifik industri pengolahan modern, industri pengolahan ikan tradisional, dan kawasan budidaya. Zona Terkait (Pemasaran) adalah wilayah diluar zona inti dan zona pendukung yang memiliki keterkaitan erat dan langsung dalam kelancaran bisnis perikanan yaitu pasar yang merupakan konsumen dari produk perikanan yang dihasilkan maupun produsen yang menghasilkan produk perikanan tersebut. Zona terkait dibagi dalam zona spesifik Pasar ikan olahan, kawasan wisata kuliner, kawasan budidaya dan kawasan konservasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.19 Klasifikasi Zona Kawasan Minapolitan dan peta 4.5 Klasifikasi zonasi kawasan minapolitan

Tabel 4. 19 Klasifikasi Zona Kawasan Minapolitan Kecamatan Alok Barat

No	Zona Dasar		Zona Spesifik	
1	I	Zona Inti	I1	PPI
			I2	SPDN
			I3	Cold Storage
			I4	Permukiman Nelayan
			I5	TPI
			I6	Sentra Produksi Perikanan Budidaya
			I7	Pusat penjualan alat & bahan penangkapan ikan
			I8	Kawasan Budidaya
			I9	Sentra produksi perikanan tangkap
2	P	Zona Pendukung	P1	Industri pengolahan ikan modern
			P2	Industri pengolahan ikan tradisional
			P3	Kawasan Budidaya
3	T	Zona Terkait	T1	Pasar Ikan Olahan
			T2	Kawasan wisata kuliner
			T3	Kawasan konservasi
			T4	Kawasan budidaya

Sumber : Hasil Analisis, 2016

### **B. Konsep Pengembangan Zona Pendukung**

Konsep pengembangan zona pendukung bertujuan untuk memberikan dukungan pada kegiatan pengolahan produk perikanan. Zona Pendukung (Sentra Pengolahan) adalah wilayah diluar zona inti yang diperuntukan bagi pengembangan usaha berbasis perikanan (pengolahan) dan berintegrasi dengan usaha penangkapan ikan. Zona pendukung kawasan minapolitan Kecamatan Alok Barat diarahkan pada Kelurahan Wailiti dan Hewuli dimana terdapat beberapa lokasi industri pengolahan ikan. (Peta 4.4 Pembagian Zona Kawasan Minapolitan). Pengembangan zona pendukung

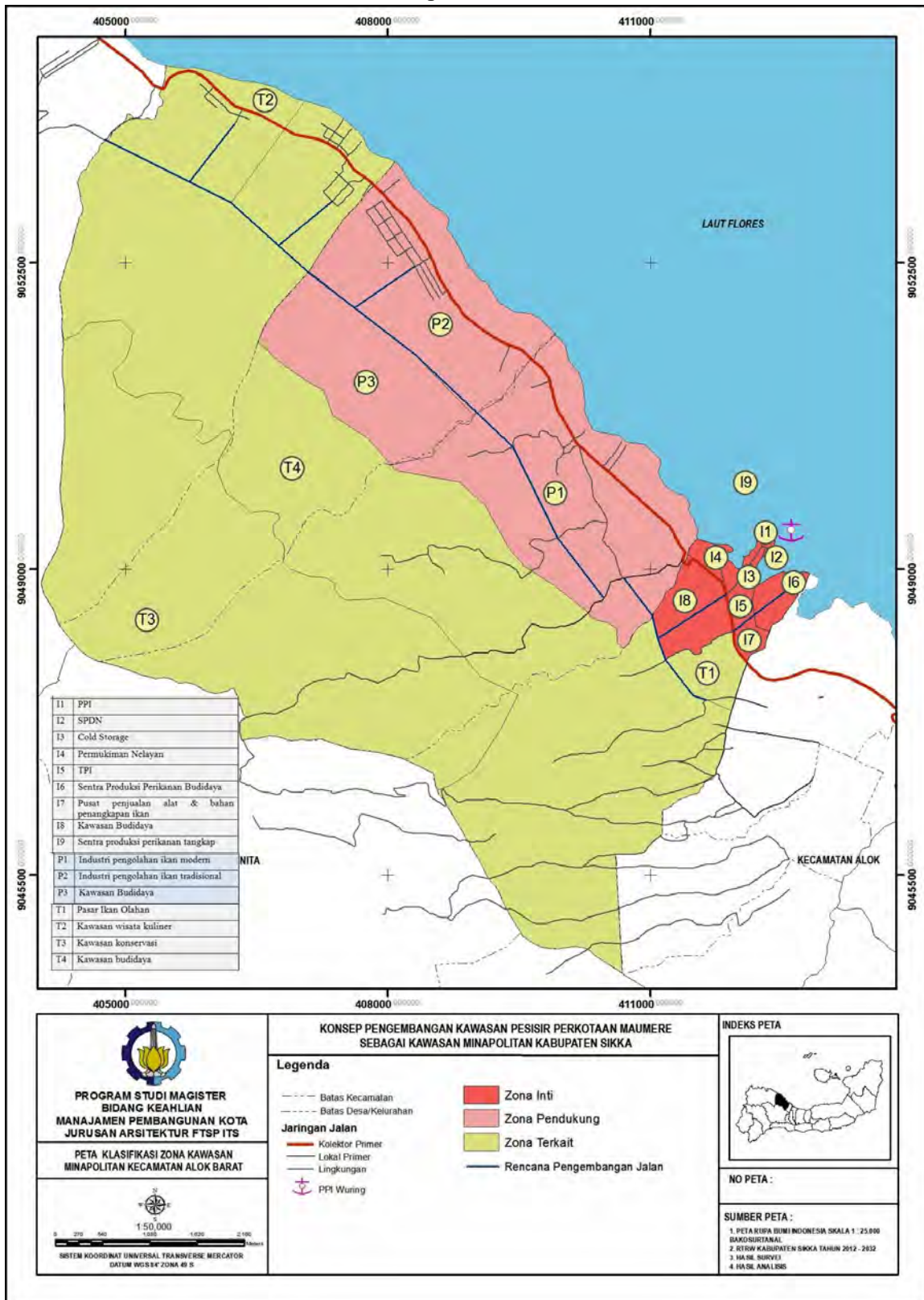
kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan perikanan, dan peningkatan ketersediaan tenaga kerja sector perikanan. Berdasarkan tinjauan kebijakan terkait dan tinjauan literatur maka konsep pengembangan sektor pemasaran yang diarahkan adalah :

1. Pemberian insentif pemanfaatan ruang bagi pelaku industri di bidang pengolahan ikan

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya dengan tetap menghormati hak orang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif diberikan kepada perorangan atau swasta, dan dapat juga diberikan oleh pemerintah daerah yang lebih atas ke pemerintah daerah di bawahnya, dan juga dari pemerintah daerah yang satu kepada pemerintah daerah lainnya yang terkait. Insentif bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Kondisi eksisting saat ini, belum banyak industri di Kecamatan Alok Barat maupun di Kabupaten Sikka secara umum yang beroperasi di bidang pengolahan ikan. Untuk merangsang para investor agar mau membuka usaha industri pengolahan ikan maka dapat diterapkan pemberian insentif bagi pelaku industri tersebut di Kelurahan Wailiti dan Hewuli yang diarahkan sebagai lokasi industri pengolahan ikan. Pemberian insentif pemanfaatan ruang tersebut dapat berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; pembangunan serta pengadaan infrastruktur; serta kemudahan prosedur perizinan.



Peta 4.5 Klasifikasi zonasi kawasan minapolitan



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

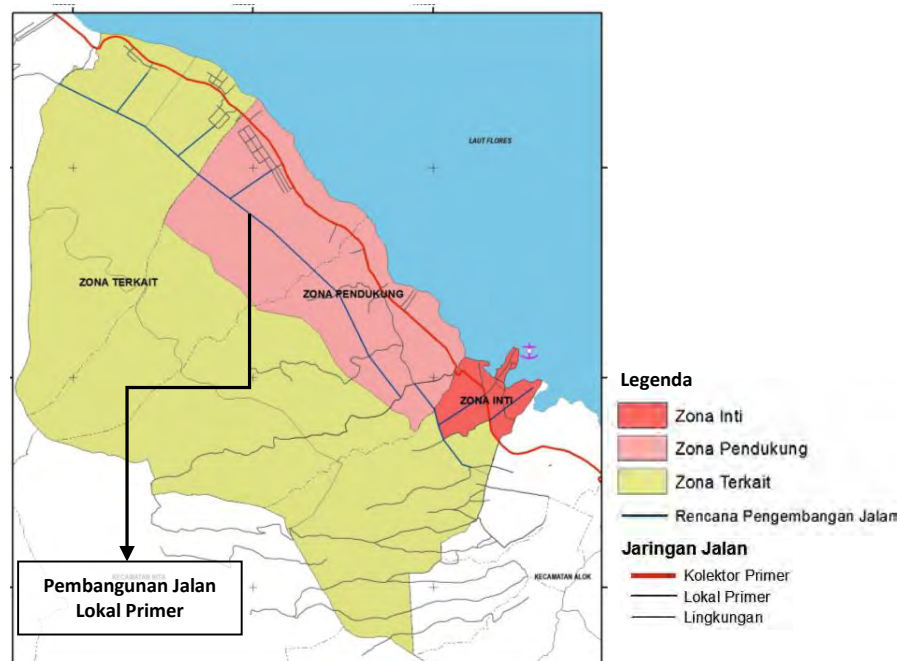


2. Peningkatan diversifikasi produk komoditas unggulan (ikan tuna dan cakalang) melalui pengolahan ikan sehingga akan memberikan nilai tambah produk dan membuka lapangan kerja baru.

Pengolahan perikanan adalah usaha untuk mendekatkan produk perikanan kepada konsumen sambil menciptakan nilai tambah produk perikanan. Usaha pengolahan ikan di Kabupaten Sikka mencakup antara lain pengasapan, pembekuan, pengeringan, pengasinan dan pemindangan. Selain dari jenis pengolahan ikan tersebut untuk memberikan nilai tambah produk dan membuka lapangan kerja baru maka perlu adanya upaya diversifikasi produk komoditas unggulan. Diversifikasi tersebut dilakukan untuk memperoleh produk-produk perikanan yang baru, bervariasi serta memiliki nilai gizi yang tinggi, sehingga dapat menarik minat masyarakat atau konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut.

3. Pembangunan jalan lokal primer sebagai jalan tembus dari zona inti dan zona terkait di Kelurahan Wailiti dan Kelurahan Hewuli

Salah satu wujud pemberian insentif sebagai rangsangan agar pelaku industri pengolahan ikan mau berinvestasi di lokasi yang telah diarahkan adalah pembangunan serta pengadaan infrastruktur. Pembangunan jalan merupakan satu upaya pengadaan infrastruktur yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka agar merangsang pertumbuhan industri. Di Kelurahan Wailiti dan Hewuli akses jalan utama hanya berada di sisi utara yang dilalui oleh jalan kolektor primer. Untuk mendukung pengembangan kawasan minapolitan perlu adanya pembangunan jalan di sisi selatan sehingga dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa yang mendukung kegiatan industri pengolahan ikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.13 Arah lokasi konsep pembangunan jalan lokal primer di Kelurahan Wailiti dan Hewuli



Gambar 4.13 Arahan Lokasi Konsep Pembangunan Jalan Lokal Primer di Kelurahan Wailiti dan Hewuli  
Sumber : Hasil Analisis, 2016

#### 4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan khusus industri pengalengan ikan

Salah satu upaya peningkatan nilai tambah produk perikanan adalah dengan pengembangan industri pengolahan ikan kaleng. Sebagian usaha pengolahan ikan di Kabupaten Sikka masih bersifat tradisional seperti pengeringan, pengasinan dan pemindangan. Sedangkan industri yang telah menggunakan teknologi modern antara lain usaha pengasapan, pembekuan, hingga pengemasan. Menurut Afrianto dan Liviawaty (1989), ikan kaleng merupakan salah satu produk hasil pengawetan dan pengolahan yang telah disterilkan dan dikemas dalam kaleng. Proses pengalengan ikan umumnya dilakukan oleh perusahaan besar, disamping beberapa *home industri*. Jenis ikan tuna merupakan komoditas yang nilai jual tinggi apabila diolah menjadi ikan kaleng. Di Kabupaten Sikka salah satu komoditas unggulan adalah ikan tuna, oleh perlu adanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi khusus untuk pengembangan industri pengalengan ikan.

5. Pembinaan dan pelatihan masyarakat pesisir khusus kemampuan pengolahan ikan.

Upaya pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja perikanan tidak hanya dilakukan di sektor produksi. Untuk mendukung aktifitas ekonomi, kelangsungan usaha dan kemampuan pengolahan ikan perlu ada pengetahuan dan keahlian khusus terutama bagi pelaku industri kecil, menengah maupun home industri. Pembinaan dan pelatihan khusus kewirausahaan pengolahan ikan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama instansi terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Industri dan Perdagangan. Selain itu, pihak akademisi dan swasta juga dapat diupayakan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan tersebut.

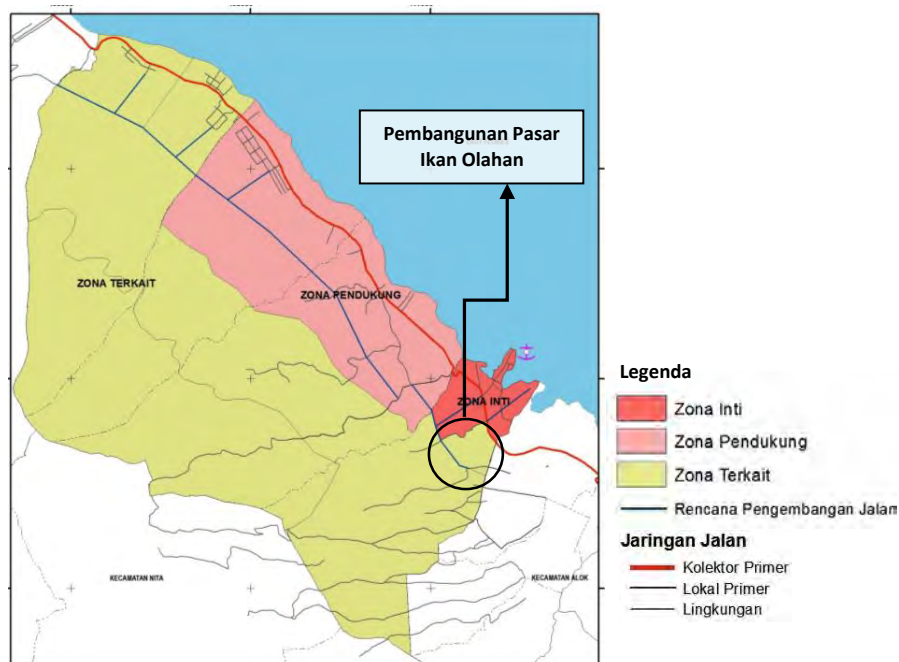
### **C. Konsep Pengembangan Zona Terkait**

Konsep ini bertujuan untuk memberikan dukungan pada kegiatan pemasaran produk unggulan. Zona Terkait (Pemasaran) adalah wilayah diluar zona inti dan zona pendukung yang memiliki keterkaitan erat dan langsung dalam kelancaran bisnis perikanan yaitu pasar yang merupakan konsumen dari produk perikanan yang dihasilkan maupun produsen yang menghasilkan produk perikanan tersebut. Zona terkait kawasan minapolitan Kecamatan Alok Barat diarahkan di sisi selatan Kelurahan Wolomarang, Wailiti, Hewuli dan Wuring (Peta 4.4 Pembagian Zona Kawasan Minapolitan). Berdasarkan tinjauan kebijakan terkait dan tinjauan literature maka konsep pengembangan sektor pemasaran yang diarahkan adalah :

1. Pembangunan pasar ikan yang khusus menjual hasil-hasil olahan ikan

Hasil-hasil olahan ikan seperti ikan asap, ikan asin, krupuk ikan, abon ikan hingga ikan kaleng atau sarden sebagai upaya diversifikasi komoditas perikanan dipasarkan ke daerah luar dan dieksport ke luar negeri, selain itu produk tersebut juga dapat dijadikan sebagai produk makanan oleh-oleh khas Kabupaten Sikka. Untuk memasarkan produk oleh-oleh dari hasil olahan ikan tersebut maka diarahkan konsep pembangunan pasar ikan yang khusus menjual hasil-hasil olahan ikan. Lokasi pasar

ikan olahan diarahkan di Kelurahan Wolomarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.14 Arahkan lokasi konsep pembangunan pasar ikan olahan di Kelurahan Wolomarang

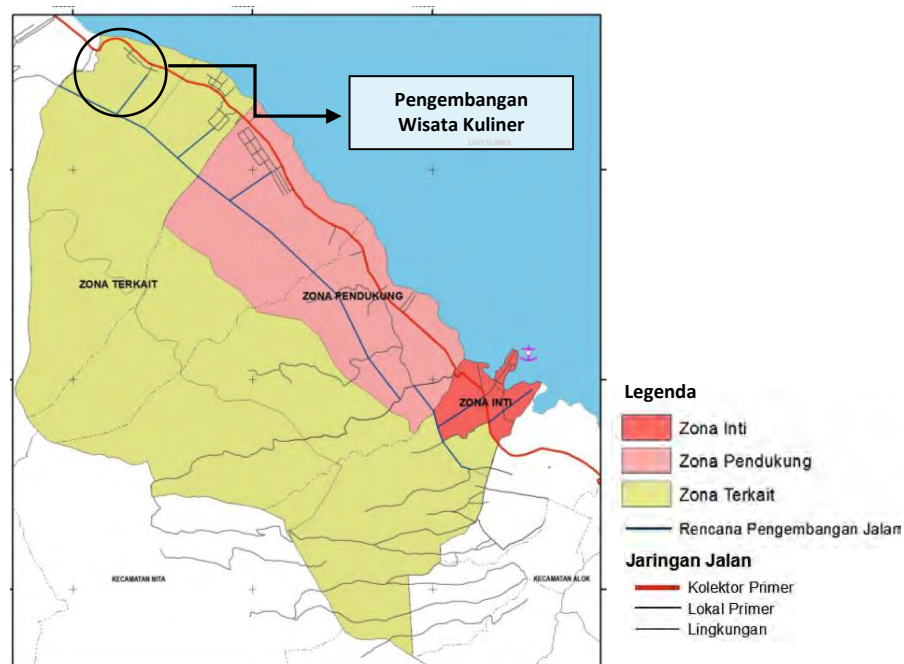


Gambar 4.14 Arahkan Lokasi Konsep Pembangunan Pasar Ikan Olahan di Kelurahan Wolomarang (Sumber : Hasil Analisis, 2016)

2. Pengembangan sentra wisata kuliner yang khusus menjadikan komoditas unggulan sebagai produk khas

Wisata kuliner adalah suatu perjalanan yang di dalamnya meliputi kegiatan mengonsumsi makanan lokal dari suatu daerah; perjalanan dengan tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman dan atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner, seperti sekolah memasak, mengunjungi pusat industri makanan dan minuman; serta untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika mengonsumsi makanan dan minuman (Maulani, 2013). Konsep pengembangan wisata kuliner di Kecamatan Alok Barat diarahkan sebagai konsep wisata kuliner yang khusus menjual makanan-makanan tradisional dengan bahan baku utama hasil laut seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, cumi, dan udang . Lokasi konsep wisata kuliner ini diarahkan di

Pantai Waturia yang terletak di Kelurahan Wuring yang merupakan pantai dengan pemandangan yang bagus dan sering dikunjungi para wisatawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.15 Arahkan lokasi konsep pengembangan sentra wisata kuliner Pantai Waturia



Gambar 4.15 Arahkan Lokasi Konsep Pengembangan Wisata Kuliner  
(Sumber : Hasil Analisis, 2016)

3. Pembentukan network yang mampu menyebarkan informasi pasar, harga yang realtime dan online.

Untuk mendukung pemasaran ke luar daerah maupun ekspor ke luar negeri sangat dibutuhkan adanya pembentukan network yang mampu menyebarkan informasi harga yang realtime dan online. Jaringan informasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan promosi, dengan adanya jaringan informasi pengetahuan akan nilai jual dan lokasi pasar dapat diketahui. Upaya pembentukan jaringan usaha yang mampu menyebarkan informasi pasar dan harga ini dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dapat juga dilakukan oleh para pelaku industri perikanan yang ada.

Dari hasil analisis triangulasi dan penjabarannya telah diketahui konsep-konsep pengembangan di tiap zona pengembangan. Konsep Pengembangan di tiap zona dapat dikelompokkan menjadi pengembangan yang bersifat spasial maupun non spasial. Konsep pengembangan yang bersifat spasial dapat digambarkan dalam peta konsep pengembangan sedangkan yang bersifat nonspasial lebih kepada konsep pengembangan berupa arahan kebijakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.20 Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Alok Barat Serta Peta 4.6 Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat dan Peta (Komparasi Kondisi eksisting dan Konsep Pengembangan) 4.7 Peta Konsep Pengembangan

Tabel 4.20 Konsep Pengembangan Kawasan Mimapolitan Di Kecamatan Alok Barat

No	Zona Pengembangan	Konsep Pengembangan	
		Non Spasial	Spasial
1.	Zona Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan kekuatan kekuatan motor kapal (&gt; 30 GT) dan peralatan navigasi serta penambahan alat tangkap berupa pukat kantong dan <i>Long line</i></li> <li>2. Revitalisasi lembaga masyarakat/kelompok nelayan melalui kegiatan rutin seperti bimbingan dan penyuluhan dari pemerintah daerah.</li> <li>3. Peningkatan kualitas nelayan melalui kegiatan penyuluhan secara rutin dan pelatihan kelompok nelayan</li> <li>4. Peningkatan partisipasi pemerintah melalui pemberian bantuan modal, alat tangkap hingga kapal motor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan yang dikenal dengan istilah SPDN (Solar packed dealer for nelayan) di PPI Wuring Kelurahan Wolomarang (Peta 4.7 No. 1)</li> <li>2. Pembangunan TPI pusat di Kelurahan Wolomarang (Peta 4.7 No 2)</li> <li>3. Perbaikan dan perawatan dermaga PPI Wuring (Peta 4.7 No 3)</li> <li>4. Pembangunan pusat penjualan alat dan bahan penangkapan ikan di Kelurahan Wolomarang (Peta 4.7 No 4)</li> <li>5. Pemasangan jaringan air bersih (PDAM) di perkampungan nelayan Kelurahan Wolomarang (Peta 4.7 No. 5)</li> <li>6. Perbaikan kondisi jalan dan pembangunan jalan tembus ke lokasi budi daya perikanan dan ke lokasi industri pengolahan (Peta 4.7 No. 6)</li> </ol>

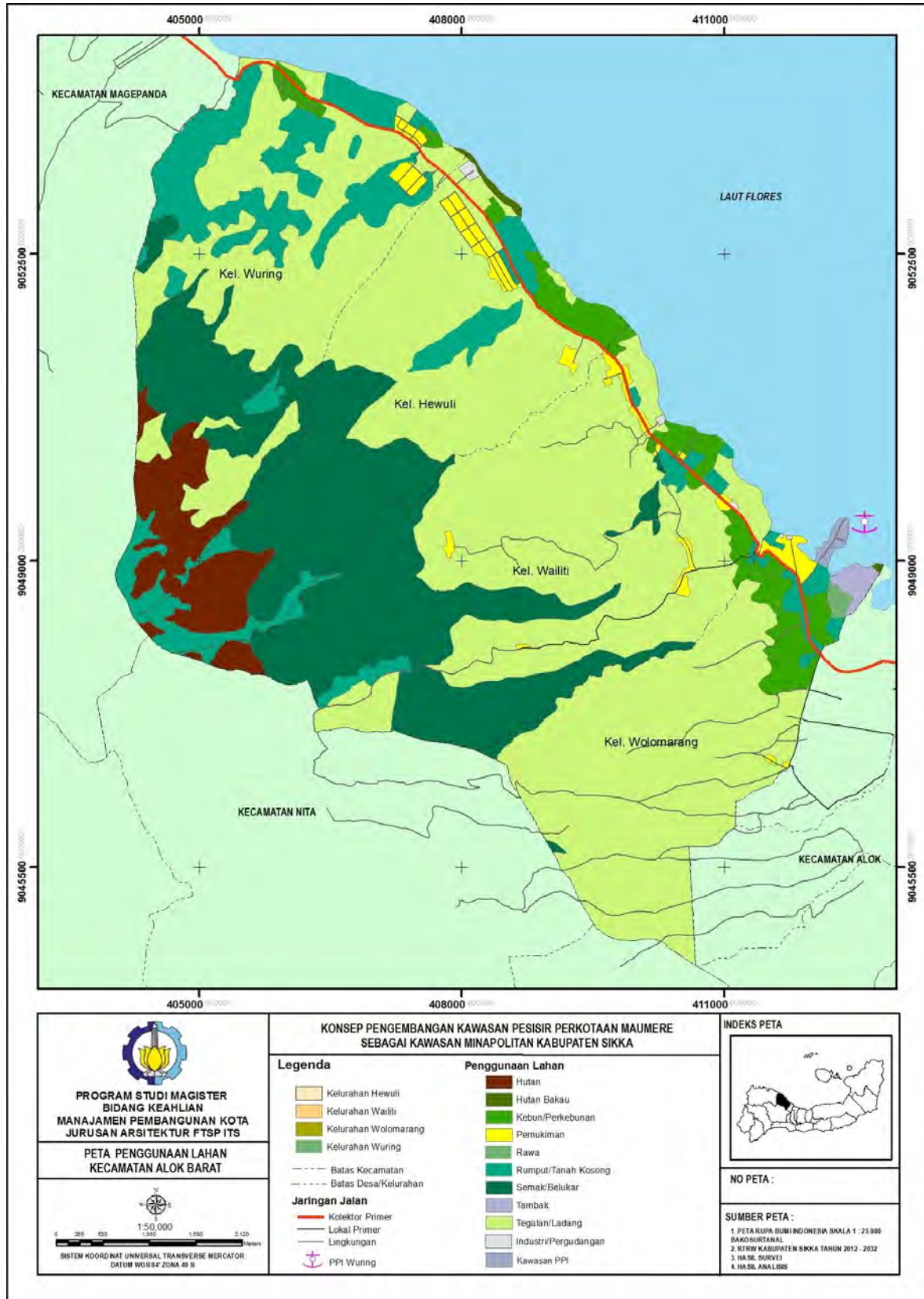
2.	Zona Pendukung	<p>5. Pemberian insentif pemanfaatan ruang bagi pelaku industri di bidang pengolahan ikan</p> <p>6. Peningkatan diversifikasi produk komoditas unggulan (ikan tuna dan cakalang) melalui pengolahan ikan sehingga akan memberikan nilai tambah produk dan membuka lapangan kerja baru.</p> <p>7. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan khusus industri pengalengan ikan</p> <p>8. Pembinaan dan pelatihan masyarakat pesisir khusus kemampuan pengolahan ikan</p>	<p>7. Pembangunan jalan lokal primer sebagai jalan tembus dari zona inti dan zona terkait di Kelurahan Wailiti dan Kelurahan Hewuli (Peta 4.7 No. 7)</p>
3.	Zona Terkait	<p>9. Pembentukan network yang mampu menyebarkan informasi pasar, harga yang realtime dan online.</p>	<p>8. Pembangunan pasar ikan yang khusus menjual hasil-hasil olahan ikan (Peta 4.7 No. 8)</p> <p>9. Pengembangan sentra wisata kuliner yang khusus menjadikan komoditas unggulan sebagai produk khas (Peta 4.7 No. 9)</p>

*Sumber : Hasil Analisa, 2016*

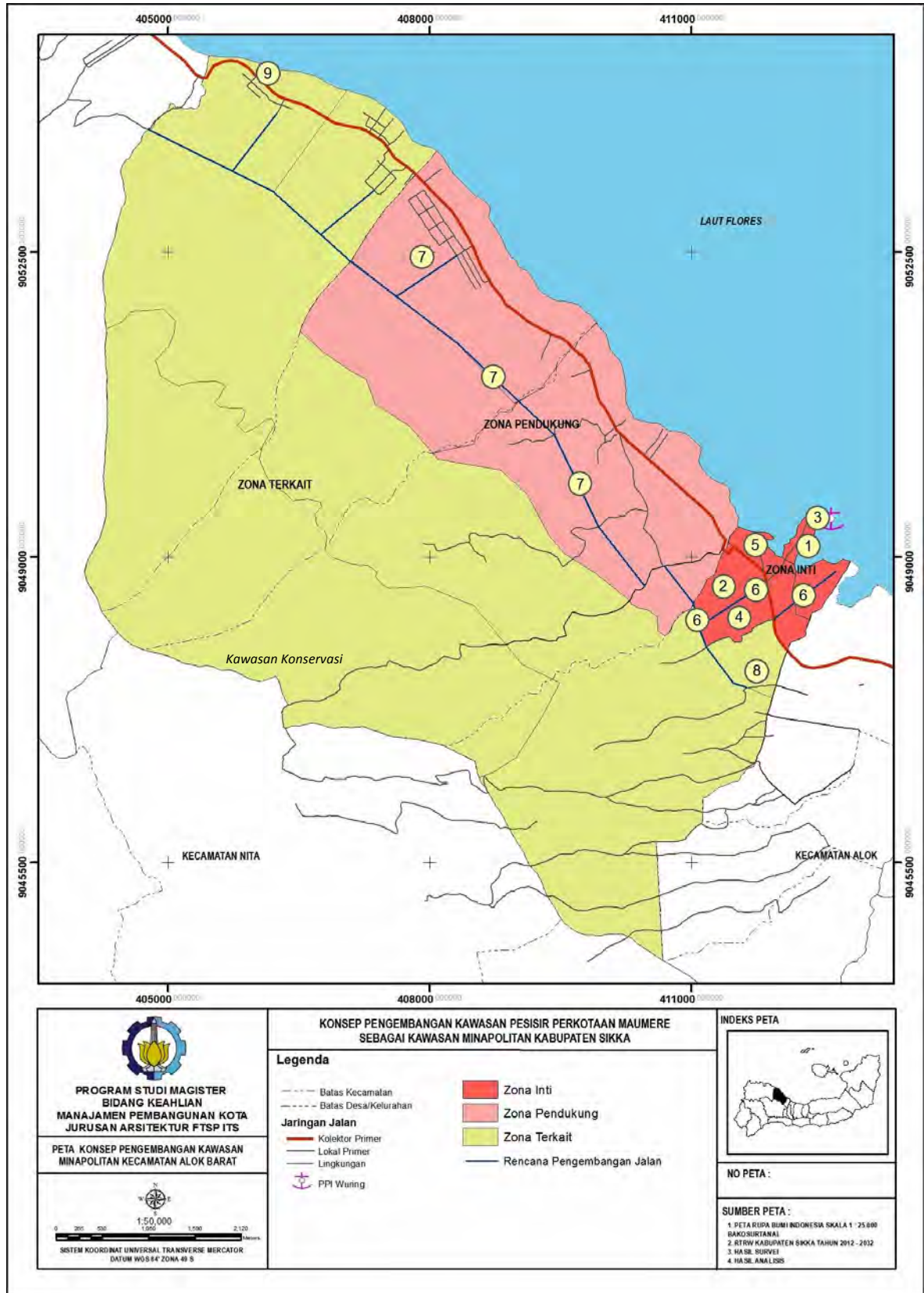


*Halaman ini sengaja dikosongkan*

Peta 4.6 Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan Kecamatan Alok Barat



Peta 4.7 Peta Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Alok Barat



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan serangkaian tahap penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan antarlain :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Kecamatan Alok Barat sebagai Kawasan minapolitan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan; Peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan, Peningkatan kualitas produksi perikanan, Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan, Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan, Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan, Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan, Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktifitas perikanan, Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat, Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan, Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan dan Pembuatan zoning regulation kawasan minapolitan
2. Konsep pengembangan Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere sebagai Kawasan Minapolitan yaitu :

Konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat dikelompokkan dalam tiga zona yaitu zona inti yang di dalamnya terdapat aktifitas produksi yang dibagi menjadi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, zona pendukung yang merupakan sentra indutri pengolahan dengan tujuan menambah nilai jual produksi perikanan yang ada dan yang terakhir adalah Zona terkait yaitu

terkait sector pemasaran produksi. Masing-masing zona memiliki konsep pengembangan yang merupakan penjabaran dari factor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat.

Konsep pengembangan di zona inti meliputi pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan melalui penambahan kekuatan motor kapal (>30GT), peralatan navigasi, dan alat tangkap berupa pukat kantong dan Longline; revitalisasi lembaga masyarakat/kelompok nelayan, peningkatan kualitas nelayan melalui kegiatan penyuluhan secara rutin dan pelatihan, pemberian bantuan modal, alat tangkap hingga kapal motor, pengadaan stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan di PPI Wuring Kelurahan Wolomarang, pembangunan TPI, perbaikan dan perawatan dermaga PPI Wuring, pembangunan pusat penjualan alat dan bahan penangkapan ikan, pemasangan jaringan air bersih (PDAM) di perkampungan nelayan Kelurahan Wolomarang, perbaikan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat, penetapan zona inti di kelurahan Wolomarang, zona pendukung untuk industri pengolahan di kelurahan Wailiti dan Hewuli dan Zona Terkait di Kelurahan Wuring dan Kecamatan lainnya.

Konsep pengembangan di zona pendukung meliputi pemberian insentif bagi pelaku industri di bidang pengolahan ikan, peningkatan diversifikasi produk komoditas unggulan melalui pengolahan ikan, pembangunan jalan lokal primer, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan khusus pengalengan ikan, serta pembinaan dan pelatihan masyarakat pesisir khusus kemampuan pengolahan ikan.

Konsep pengembangan di zona terkait meliputi pengembangan kegiatan pemasaran antara lain pembangunan pasar ikan khusus menjual hasil olahan ikan, pengembangan sentra wisata kuliner yang khusus menjadikan komoditas unggulan sebagai produk khas, dan pembentukan network yang mampu menyebarkan informasi pasar dan harga secara realtime dan online.

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, perlu adanya beberapa saran baik yang bersifat praktis maupun ilmiah dimana saran atau rekomendasi yang diberikan merupakan saran yang bersifat penyempurnaan bagi pemerintah maupun penelitian selanjutnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka diharapkan terlibat aktif dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama di wilayah pengembangan minapolitan
2. Diperlukan koordinasi yang baik antar tiap stakeholder di bidang perikanan yaitu nelayan, pedagang, pelaku industri pengolahan ikan, pemerintah dan akademisi dalam menjalankan perannya masing-masing sehingga pengembangan kawasan minapolitan dengan pemanfaatan komoditas unggulan dapat optimal.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka diharapkan lebih berperan aktif dalam pengembangan kawasan minapolitan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terutama pihak investor terkait bidang perikanan.
4. Perlu adanya insentif pemanfaatan ruang yang dapat mendorong pelaku industri untuk mau mengembangkan usaha di bidang perikanan mengingat komoditas perikanan cukup potensial untuk dikembangkan dan mendukung pengembangan kawasan minapolitan

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



**Kuesioner Penelitian**

**Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere Sebagai Kawasan  
Minapolitan Kabupaten Sikka (Studi Kasus Kecamatan Alok Barat)**

**A. Latar Belakang**

Bapak/ibu yang kami hormati,

Saya selaku mahasiswa program magister bidang keahlian Manajemen Pembangunan Kota (MPK) Jurusan Arsitektur ITS sedang mengadakan penelitian tentang **Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere Sebagai Kawasan Kabupaten Sikka**. Kawasan Pesisir Kabupaten Sikka memiliki potensi kelautan dan perikanan yang mempunyai prospek ekonomi yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Namun sejumlah permasalahan masih harus diatasi antara lain masih rendahnya produktifitas, tingkat pendapatan nelayan, kegiatan distribusi dan perdagangan masih sederhana, kurangnya infrastruktur serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai konsep pengembangan kawasan pesisir perkotaan Maumere sebagai kawasan minapolitan kabupaten Sikka.

Dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan perumusan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan. Rumusan faktor-faktor diperoleh dari hasil tinjauan pustaka. Maka dengan menggunakan kuesioner ini diharapkan dapat menemukan faktor yang tepat dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sikka tersebut. Dengan ini peneliti mengharapkan kesediaan bapak/ ibu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih atas kesediaan Anda.

Hormat saya

**Primus Aryunto**

**NRP 3214205002**

**Program Magister**

**Bidang Keahlian Manajemen Pembangunan Kota**

**Jurusan Arsitektur- FTSP**

**Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya**

***Definisi Kata Kunci***

*Kawasan minapolitan : Suatu kawasan dengan konsep pembangunan dan pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan meliputi prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi agar wilayah tersebut dapat berkembang dan mengalami percepatan pertumbuhan layaknya sebuah kota.*

## B. Identitas Responden

1. Nama : .....
2. Profesi : .....
3. Instansi/Jabatan : .....
4. Alamat : .....
5. No. Hp : .....

## C. Kuesioner

1. Apakah faktor-faktor di bawah ini berpengaruh pada pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Alok Barat - Kabupaten Sikka?

No	Faktor *	Tanggapan		Alasan
		S	TS	
1	Peningkatan kondisi jalan lokal primer dan jalan lingkungan di pesisir Kecamatan Alok Barat			
2	Peningkatan sarana transportasi angkutan perikanan			
3	Peningkatan ketersediaan tenaga kerja sektor perikanan			
4	Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja sektor perikanan			
5	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok nelayan			
6	Pembentukan lembaga permodalan khusus usaha sektor perikanan			
7	Peningkatan partisipasi pemerintah dan akademisi bidang perikanan			

No	Faktor *	Tanggapan		Alasan
		S	TS	
8	Pembentukan badan pengelola kawasan minapolitan			
9	Peningkatan kualitas produksi perikanan			
10	Peningkatan ketersediaan industri pengolahan ikan			
11	Peningkatan ketersediaan jasa pelayanan umum terkait sektor perikanan			
12	Peningkatan kualitas sistem pemasaran produksi perikanan			
13	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan			
14	Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan/aktifitas perikanan			

Pilih salah satu antara S dan TS dengan memberikan tanda ✓

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

2. Menurut anda, apakah ada faktor lain yang belum disebutkan yang dapat mempengaruhi pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Alok Barat sebagai kawasan minapolitan? Berikan alasan anda menambahkan faktor tersebut

.....  
 .....

## DAFTAR PUSTAKA

- Bengen,D.G.2001. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut*. Sinopsis. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. ISBN
- Bengen, D. G, dan Achmad Rizal. 2002. *Menyoal Pengaturan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan*. Artikel Warta INCUNE. Edisi Tahun 2 Nomor 1.
- Bengen, DG, 2004. *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*, Pusat kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor.
- Bungin, Burhan, HM. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Cahyadin, Malik dkk. (2006). *Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia*. Jurnal.11(3),261-277.
- Charles AT. 2001. *Fishery Conflicts: A unified framework*. Marine Policy
- Cicin-Sain, Billiana and Robert W.Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management- Concept and Practices*. Island Press. Washington, D.C. Covelo, California.
- Dahuri, R., J, Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Cetakan kedua. Pradya Paramitha. Jakarta.
- Dahuri, R., J, Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Cetakan ketiga. Pradya Paramitha. Jakarta.
- Dodge, Y. (2006). *The Oxford dictionary of statistical terms*. New York: Oxford University Press.
- Effendi, Irzal. 2006. *Manajemen Agribisnis Perikanan*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- FAO. 1995.*Code Of Conduct For Responsible Fisheries*. FAO, Rome
- Friedman, J and M. Douglas, 1976. *Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Reginal Planning in Asia*.
- Ghufron, M. 2008. *Budidaya Perairan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hoover, E.M. 1977. *Pengantar Ekonomi Regional (Terjemahan A. Chandra)*. Lembaga Penerbit FE UI :Jakarta
- Kay, R., dan J. Alder. 1999, *Coastal Planning and Management*. E&FN Spon. London.
- Kay dan Alder. 2005. *Coastal Planning and Management*. Taylor & Francis. London and New York.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung : Humaniora
- Masyhuri. 1999. *Usaha Penangkapan Ikan di Jawa dan Madura: Produktivitas dan Pendapatan Buruh Nelayan, Masyarakat Indonesia*, XXIV. No.1.
- Munsinghe M. 1994. Making Development Sustainable : From Concept to Action, Environmentally Sustainable Development Occasional. Paper Series No.2. The World Bank, Washington DC
- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 1993. *Coastal zone management: integrated policies*. OECD Publications.
- Parr, John B. 1999. *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View*. Carfax Publishing.
- Pitcher T.J., dan D.Preikshot. 2001. *RAPFISH: a Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries*. Journal of Fisheries Research
- Poernomosidi, H., 1975. *Suatu Pendekatan Terhadap Regional Planning Indonesia*. Balai Pembinaan Administrasi UGM. Yogyakarta.
- Prasetyawan, A. Wahyu. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Nelayan Di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Rianse, Usman. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Rustiadi, Ernan. 2001. *Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah*. Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (ICZM). DKP
- Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Subagyo, 2004. *Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sudianto, Arief dkk. 2010. *Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Bali.
- Sugiyono.2009.*Statistika untuk Penelitian*. P.115,122.Bandung: Alfabeta.
- Sorensen, J.C. and Mc Creary. 1990. *Coast : Institutional Arrangements for Managing Coastal Resources*. University of California of Barkeley.
- Soenarno. 2003. *Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam rangka Pengembangan Wilayah*, Makalah seminar nasional agroindustri dan pengembangan wilayah.
- Sunoto. 2010. *Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia*. Buletin Tata Ruang Edisi Maret-April 2010
- Suprihayono, 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Susilo, Y. 2003. Menuju Keselarasan Lingkungan. Averroes Press. Jakarta
- Suyanto, Bagong dkk. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Edisi 1. Jakarta : Perdana Media.
- Walpole, R. E. (1993). *Pengantar statistika*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, Hadi. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zakiah, Dwi Maulidatuz. 2011. *Arahan Pengembangan Sektor Perikanan Berbasis Minapolitan (Studi Kasus: Perikanan Tambak Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Malang: Fakultas Teknik. Universitas Brawijaya.

### **Peraturan dan Kebijakan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Rencana Induk Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2013

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Kepmen-Kp/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per 12/Men/2010 Tentang Minapolitan. Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

### **Internet**

Anonim (<http://www.sikkakab.go.id/potensi-unggulan/kelautan.html>, 2013). Diunduh tanggal 11 November 2014 Pukul 16.30 WIB

Mukhtar, 2008. <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/09/mengenal-alat-penangkapan-ikan.html> 2 Mei 2016 Pukul 17.40 WIB

Profil Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka <http://bkpm-nttprov.web.id/data-wilayah/profil-kabupaten-sikka/> 12 November 2014 Pukul 22.00 WIB

Website Pemkab Sikka, 2013/ <http://www.sikkakab.go.id/potensi-unggulan/kelautan.html> 11 November 2014 Pukul 16.30 WIB

Maulani, Farhan. 2013 <http://travelling-qu.blogspot.co.id/2013/06/wisata-kuliner.html#.V0xmBUbW5cE> 12 Mei 2016 Pukul 12.35